

**PERILAKU PEMILIH PILKADA SERENTAK 2015 DALAM PERSPEKTIF
SIYASAH (STUDI DI DUSUN PUGERAN KELURAHAN MAGUWO HARJO
KECAMATAN DEPOK KABUPATEN SLEMAN YOGYAKARTA)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGAI SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM ISLAM (SHI)**

OLEH:

**MUKHYIDDIN
NIM. 11370086**

PEMBIMBING:

**Dr. AHMAD PATTIROY, M.Ag.
NIP. 19620327 199203 1 001**

**SIYASAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2016

ABSTRAK

Setiap individu dalam memilih pemimpin memiliki kriteria masing-masing karena kriteria yang dimiliki seorang pemimpin dapat berpengaruh terhadap pemerintahannya. Dalam hal ini warga Dusun Pugeran saat memilih bupati pada pilkada serentak tentu didasari oleh kriteria pemimpin yang mereka dambakan. Penelitian ini dilakukan karena kebudayaan masyarakat Pugeran yang bermacam-macam yang disebabkan oleh banyaknya pendatang di Dusun Pugeran. Islam dalam menentukan pemimpin juga memiliki kriteria yang masuk dalam teori *Siyasah Syar'iyah*. Teori tersebut dipaparkan pula oleh beberapa tokoh teori Islam di antaranya Al-Mawardi, Ibnu Taimiyah dan Nabi Muhammad SAW.

Dalam penelitiannya, peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan dan penelitian deskriptif analitik untuk pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis politik. Dalam pengumpulan data di Dusun Pugeran peneliti menggunakan metode studi literatur dan wawancara yang sumber datanya di dapat dari data primer dan sekunder.

Hasil dari penelitian lapangan menunjukkan bahwa masyarakat Dusun Pugeran Maguwoharjo Depok Sleman dalam memilih pemimpin memiliki kriteria yang sesuai dengan kriteria pemimpin menurut teori *Siyasah Syar'iyah*. Salah satu bakal calon Bupati Sleman Yuni Satya Rahayu dianggap masyarakat Dusun Pugeran yang paling layak menduduki jabatan Bupati. Meski ia seorang perempuan dari salah satu hadits menjelaskan bahwa jika perempuan itu memiliki kemampuan yang diperlukan maka ia diperbolehkan untuk menduduki jabatan pemimpin.

Kata kunci: Pilkada Serentak, Kriteria Pemimpin dan Siyasah Syar'iyah

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mukhyiddin

NIM : 11370086

Jurusan : Siyasa

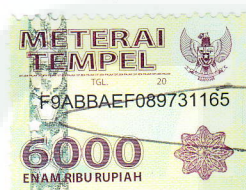
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Judul Skripsi : PERILAKU PEMILIH PILKADA SERENTAK 2015 DALAM PERSPEKTIF SIYASAH (STUDI DI DUSUN PUGERAN KELURAHAN MAGUWO HARJO KECAMATAN DEPOK KABUPATEN SLEMAN YOGYAKARTA)

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 17 November 2016



Mukhyiddin
NIM. 11370086

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : Mukhyiddin

NIM : 11370086

Judul Skripsi : PERILAKU PEMILIH PILKADA SERENTAK
2015 DALAM PERSPEKTIF SIYASAH
(STUDI DI DUSUN PUGERAN
KELURAHAN MAGUWOHARJO
KECAMATAN DEPOK KABUPATEN
SLEMAN YOGYAKARTA)

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas Perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 17 November 2016

Pembimbing



Dr. Ahmad Pattiroy, M.Ag.
NIP : 19620327 199203 1 001

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-563/Un.02/DS/PP.00.9/12/2016

Tugas Akhir dengan Judul : PERILAKU PEMILIH PILKADA SERENTAK 2015
DALAM PERSPEKTIF SIYASAH (STUDI DI DUSUN
PUGERAN KELURAHAN MAGUWO HARJO
KECAMATAN DEPOK KABUPATEN SLEMAN
YOGYAKARTA)

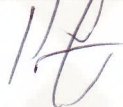
Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : MUKHYIDDIN
Nomor Induk Mahasiswa : 11370086
Telah diujikan pada : Selasa, 29 November 2016
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

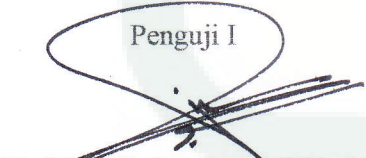
TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang



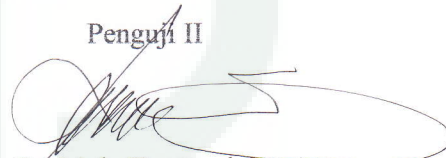
Dr. Ahmad Pattiroy, M.Ag.
NIP. 19620327 199203 1 001

Penguji I



Drs. H. Oman Fathurohman, S.W., M.Ag.
NIP. 19570302 198503 1 002

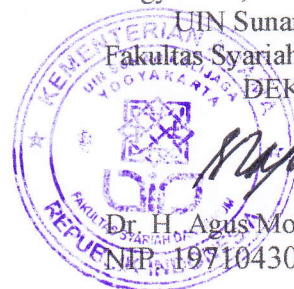
Penguji II



Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
NIP. 19720903 199803 1 001

Yogyakarta, 29 November 2016

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah dan Hukum
DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

RI No. 158/1987 dan No. 05436/1987

Tertanggal 22 Januari 1988

A. Konsonan Huruf Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	tā'	T	Te
ث	sā	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	hā'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā'	Kh	ka dan ha
د	dāl	D	De
ذ	zāl	Ẓ	Set (dengan titik di atas)
ر	zā'	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sīn	S	Es
سین	syīn	Sy	Es dan ye
ص	sād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
صād	dād	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ض	tā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ضād	zā'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	G	-
ف	fā'	F	-
ق	qāf	Q	-
ك	kāf	K	-
ل	lām	L	-

م	mīm	M	-
ن	nūn	N	-
و	wāwu	W	-
هـ	hā	H	-
ء	hamzah	‘	Apostrof
ي	yā’	Y	-

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap, contoh:

أَحْمَدِيَّة ditulis *Ahmadiyyah*

C. Tā’ Marbūtah di Akhir Kata

1. Bila dimantika ditulis, kecuali untuk kata-kata arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya.

جَمَاعَةٌ ditulis *jamā’ah*

2. Bila dihidupkan ditulis t, contoh:

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ ditulis *karamātul-auliā’*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dhammah ditulis u.

E. Vokal Panjang

a panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī, dan u panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda (-) hubung di atasnya

F. Vokal-Vokal Rangkap

1. Fathah dan yā’ mati ditulis ai, contoh:

بَيْنَكُمْ ditulis *Bainakum*

2. Fathah dan wāwu mati ditulis au, contoh:

قَوْل ditulis *Qaul*

G. Vokal-Vokal Yang Berurutan Dalam Satu Kata, Dipisahkan Dengan Apostrof (‘)

أَنْتُمْ ditulis *A’antum*

مُؤَنَّث ditulis *Mu’annaṣ*

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah

الْقُرْآن ditulis *Al-Qur’ān*

الْقِيَّاس ditulis *Al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf L (el)-nya.

أَسْمَاء ditulis *As-samā’*

الشَّمْس ditulis *Asy-syams*

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan EYD

J. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

1. Dapat ditulis menurut penulisannya

ذَوِي الْفُرُض ditulis *Žawi al-funūd*

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

أَهْلُ السُّنَّة ditulis *ahl as-Sunnah*

شَيْخُ الْإِسْلَام ditulis *Syaikh al-Islām* atau *Syaikhul-Islām*

MOTTO

“Manungsa mung ngunduh wohing pakarti”

*(Kehidupan manusia baik dan buruk adalah akibat dari
perbuatan manusia itu sendiri)*

◆PEPATAH JAWA◆

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan Rahmat Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dengan mengucap syukur alhamdulillah ku persembahkan karya kecilku ini untuk orang-orang yang ku sayangi:

Ayah dan Ibuku tercinta, terima kasih atas limpahan do'a dan kasih sayang yang tak terhingga, atas semua pengorbanan dan kesabaran mengantarkanku sampai kini, motivator terbesar dalam hidupku untuk selalu menjadi lebih baik lagi, tak pernah cukup aku membalas cinta kasih Ayah-Ibu padaku.

Dewi WN, yang selalu mendukung serta memotivasiku untuk lebih berani dalam menjalani hari-hariku di tanah perantauan.

Orang yang selalu menyayangiku, yang selalu menyemangati serta membantu dengan sabar dan ikhlas dalam setiap kesulitanku dan juga dalam proses penyelesaian skripsi ini. Semoga Allah memberikan takdir yang indah untuk kita.

Teman-teman SiyasaH angkatan 2011 senasib, seperjuangan, sepenanggungan, Fandy, Endra, Fathor, Alex, Firman, Bagus, Hasby, dan kawan-kawanku semua, terimakasih atas canda tawa dan solidaritas yang luar biasa sehingga membuat hari-hari semasa kuliah lebih berarti. Semoga persahabatan kita abadi sampai maut menjemput dan silaturahmi tetap terjaga. Serta almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

KATA PENGANTAR

الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلوة والسلام على سيدنا
محمد نور الهداية وعلى آله وصحبه نجوم الرّشاد. أما بعد

Puja dan puji syukur tak lupa marilah kita haturkan kepada Allah SWT. Yang telah memberi karunia serta kasih sayangNya sehingga penulisan skripsi ini selesai adanya. Shalawat serta salam tidak lupa mari kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah berjasa membawa cahaya Islam untuk menerangi kegelapan alam beserta isinya.

Ucapan terimakasih juga penyusun haturkan kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung, secara materil maupun moril. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan terima kasih secara tulus kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Drs. H. Oman Fathurohman SW., M.Ag. selaku Ketua Jurusan Siyasah.
4. Dr. Ahmad Pattiroy, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan sabar memberikan bimbingannya dalam penyusunan karya ini.
5. Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Dosen Pembimbing Akademik.
6. Bapak Supriyono selaku Kepala Dukuh Dusun Pugeran.

7. Bapak Abd Ro'uf selaku Ta'mir Masjid Dusun Pugeran.
8. Bapak Panggung selaku Ketua RW 65 Dusun Pugeran.
9. Ibu Siti Djuwariyah selaku Ketua PKK Dusun pugeran.
10. Ayahanda Abd Kohar dan Ibunda Machnunah yang selalu menyemangati dari jauh, terima kasih juga untuk do'a yang tidak pernah putus.
11. Teman-teman di yogyakarta, yang senantiasa berbagi keceriaan dan pengalaman.
12. Segala pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

Semoga semua yang telah mereka berikan kepada penyusun dapat menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang bermanfaat dari Allah SWT.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penyusun dan kepada seluruh yang membutuhkannya. *Aamiin ya Rabbal 'Alamiin.*

Yogyakarta, 17 November 2016

Penyusun



Mukhyiddin
NIM. 11370086

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vi
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan	5
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teori	8
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB II PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DUSUN PUGERAN KELURAHAN MAGUWO HARJO KECAMATAN DEPOK KABUPATEN SLEMAN YOGYAKARTA	17

A. Kondisi Umum Dusun Pugeran	17
1. Letak Geografis	17
2. Pemerintahan	18
3. Penduduk dan Tenaga Kerja	19
4. Kondisi Sosial	20
5. Mata Pencaharian Pokok	21
B. Sejarah dan Dinamika Pemilihan Kepala Daerah	21
C. Kelebihan dan Kekurangan Pilkada Serentak	27
1. Manfaat Pilkada Serentak	28
2. Kelemahan Pilukada	29

BAB III SIYASAH SYAR'YAH PILKADA SERENTAK 2015 DUSUN PUGERAN KELURAHAN MAGUWO HARJO KECAMATAN DEPOK KABUPATEN SLEMAN YOGYAKARTA

A. Teori Siyasa Syar'iyah	36
1. Pengangkatan Imamah (Kepemimpinan) Imam al-Mawardi	36
2. Karakteristik Kepemimpinan Nabi Muhammad SAW	41
a. Sifat Nabi Muhammad SAW Yang Harus Dijadikan Tauladan Sebagai Pemimpin	42
b. Kesuksesan Kepemimpinan Nabi Muhammad SAW dalam Islam	46
3. Siyasa Syar'iyah Ibnu Taimiyah	49
a. Mengangkat yang Aslah (paling layak dan sesuai)	49
b. Memilih yang Terbaik Kemudian yang di Bawahnya	50

c. Sedikit Manusia yang Mempunyai Sifat Quwwah (Otoritas) dan Amanah	53
B. Pilkada Serentak 2015 di Dusun Pugeran.....	55
1. Identitas Responden	56
2. Deskripsi Pilkada 2015 Dusun Pugeran.....	58
C. Kriteria Pemimpin Masyarakat Dusun Pugeran	60
BAB IV ANALISIS KRITERIA PEMIMPIN MASYARAKAT DUSUN PUGERAN DALAM PILKADA 2015 BERDASARKAN TEORI SIYASAH SYAR'YAH.....	66
A. Analisis Kriteria Pemimpin Masyarakat Dusun Pugeran Terhadap Penemuan di Lapangan	66
B. Fakta Hasil Pilkada Serentak 2015 Dusun Pugeran di Lapangan....	70
BAB V PENUTUP	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN	
CURRICULUM VITAE	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Tingkat Pendidikan Dusun Pugeran	20
Tabel 3.2 Agama/aliran kepercayaan Dusun Pugeran	21
Tabel 3.3 Meningkatnya Partisipasi Politik Kabupaten Sleman.....	57
Tabel 3.4 Meningkatnya Partisipasi Politik Dusun Pugeran.....	57
Tabel 3.5 Presentase Pilkada Serentak 2015 Dusun Pugeran.....	60



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Gemerlap pesta demokrasi Indonesia Tahun 2015 ditandai dengan pelaksanaan Pemilihan Umum 2015 yang dilakukan serentak dengan prosesi yang di mana di dalamnya seluruh pemilih dijadikan subyek aktif dalam pelaksanaannya. Dalam sistem masyarakat Islam, suksesi kepemimpinan juga menjadi topik kajian penting dalam sistem demokrasi. Di sana, keterlibatan warga negara dalam pemilihan pilkada serentak menjadi tolak ukur demokrasi sebuah negara. Tolak ukur di sini adalah dalam hal kualitas penyelenggaraan pemilihan umum (pilkada serentak) tersebut, yaitu tingkat kebebasan, keadilan, frekuensi (berkala), kerahasiaan dan lain-lain.¹ Selain itu, pemilihan umum dianggap sebagai salah satu lembaga politik yang paling banyak membentuk bentang politik dalam dinamika demokrasi memiliki lebih banyak memilih varian dibandingkan dengan lembaga politik lainnya.² Terbukti pada saat ini KPU menggunakan sistem pemilihan pilkada serentak tahun 2015 pada saat ini berlaku. Dengan sistem pilkada serentak ini lebih identik pada pengeluaran dana anggaran, sistem ini dianggap bisa irit dalam pengeluarannya. Berbeda dengan sistem yang sebelumnya itu dianggap pemborosan anggaran. Karena itu, pemilih umum merupakan sebuah agenda besar bagi negara demokrasi.

¹ Robert A. Dahl: *Perihal Demokrasi; Menjelajahi Theori Dan Praktek Demokrasi secara singkat*, alih bahasa Oleh A. Rahman Zainuddin, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001), hlm. 132.

² Ibid., hlm. 180.

Sistem demokrasi ini memberikan kesempatan dan kepercayaan pada masyarakat untuk menentukan pilihannya pada orang yang mampu memimpin daerahnya. Hal ini berarti suara rakyat menentukan perjalanan penyelenggara negara, apakah kepemimpinan akan dipegang oleh orang-orang yang memiliki kualifikasi dan kompetensi memimpin atau tidak, sehingga kesejahteraan masyarakat akan bisa terwujud atau tidak. Oleh karena itu, rakyat memiliki pengetahuan menyangkut kualifikasi yang ditetapkan syari'at dan kompetensi seorang pemimpin yang mampu menciptakan kehidupan yang lebih baik, di samping kesadaran bahwa memilih merupakan sebuah aktifitas yang mengandung tanggungjawab hukum.

Selain itu, rakyat juga melihat pola kepemimpinan dan konsep penyelenggaraan negara yang dimiliki oleh para kandidat. Di sini dapat dilihat siapa yang mendapat persetujuan yang paling banyak dari rakyat berarti pola kepemimpinan dan konsep penyelenggaraan negara kandidat tersebut lah yang disetujui oleh rakyat. Sebab, rakyat lah yang menentukan pilihan terhadap jalannya kekuasaan, dan persetujuan merupakan syarat bagi kelangsungan perwakilan/kepemimpinan orang-orang yang menjadi pilihan.³

Adapun perilaku pemilih menurut Surbakti adalah : “Aktivitas pemberian suara oleh individu yang berkaitan erat dengan kegiatan pengambilan keputusan untuk memilih atau tidak memilih (*to vote or not to vote*) di dalam suatu pemilihan umum (Pilkada secara langsung). Bila *voters* memutuskan untuk

³ Fahmi Huwaydi, *Demokrasi Oposisi dan Masyarakat Madani*, alih bahasa oleh Abdul Ghaffar, (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 161.

memilih (*to vote*) maka *voters* akan memilih atau mendukung kandidat tertentu”.⁴ Keputusan untuk memberikan dukungan dan suara tidak akan terjadi apabila tidak terdapat loyalitas pemilih yang cukup tinggi kepada calon pemimpin jagoannya. Begitu juga sebaliknya, pemilih tidak akan memberikan suaranya kalau mereka menganggap bahwa sebuah partai atau calon pemimpin tidak loyal serta tidak konsisten dengan janji dan harapan yang telah mereka berikan. Perilaku pemilih juga sarat dengan ideologi antara pemilih dengan partai politik atau kontestan pemilu. Masing-masing kontestan membawa ideologi yang saling berinteraksi. Selama periode kampanye pemilu, muncul kristalisasi dan pengelompokan antara ideologi yang dibawa kontestan. Masyarakat akan mengelompokkan dirinya kepada kontestan yang memiliki ideologi sama dibawa dengan yang mereka anut sekaligus juga menjauhkan diri dari ideologi yang berseberangan dengan mereka.

Pemilih dengan rasionalitas nilai jumlahnya tidaklah sedikit di Indonesia. Di banyak pemilihan kepala daerah (pilkada), nilai-nilai primordial sering menguat dan dijadikan sebagai acuan pemilih dalam menentukan pilihan. Faktor suku dan agama lebih dominan ketimbang kapasitas, kredibilitas, dan integritas dari sang kandidat. Memang, pemilih dengan rasionalitas nilai tidak hanya ada di Indonesia semata. Pemilih dengan rasionalitas tujuan. Menurut Weber, rasionalitas tujuan adalah pola pikir yang bertumpu pada apa yang akan diperoleh. Pemilih memutuskan pilihannya pada calon yang dirasa dapat memenuhi keinginan dan kebutuhannya, meski hanya berupa secuil kebahagiaan yang sifatnya sementara.

⁴ Ramlan Surbakti, *Partai, Pemilih dan Demokrasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hlm, 170.

Islam mengajarkan, sebagaimana penyusun lansir dari konsep Al-Mawardi, hendaknya umat Islam di mana dan kapan saja memilih pemimpin yang memiliki integritas moral tinggi (jujur, amanah, berakhlak baik, dan adil), memiliki ilmu dan wawasan yang luas, tidak cacat fisiknya, punya wawasan politik dan kemampuan mengatur rakyat, ahli strategi perang, dan mempunyai garis keturunan Quraisy.⁵ Masyarakat juga masih sangat rentan dipengaruhi oleh sikap fanatik kepada kelompok partai, suku, daerah dan lain sebagainya yang sebenarnya tidak relevan dengan persoalan kekayaan seorang pemimpin, dan sikap fanatik menjadi seseorang selalu membela kelompoknya tanpa memperdulikan kebenaran dan kebathilan.

Pada Pilkada Serentak 2015 ini mempunyai daya tarik tersendiri bagi penulis. Apa sebenarnya yang mengobsesi atau mendasari pilihan masyarakat pada Pilkada Serentak 2015 ini, dan bagaimana Islam menyakapi sikap perilaku pemilih tersebut. Oleh karena itu, penulis tertarik meneliti perilaku pemilih masyarakat Dusun Pugeran Kelurahan Maguwoharja dalam pilkada Serentak 2015 karena salah satu bakal calon Bupati tinggal di Dusun Pugeran.

B. Rumusan Masalah

1. Apa kriteria pilihan masyarakat Dusun Pugeran Kelurahan Maguwoharjo Kecamatan Depok Kabupaten Sleman dalam menjatuhkan pilihannya terhadap calon di Pilkada Serentak 2015?

⁵ Sudarnoto Abdul Hakim, dkk. (ed), *Islam Berbagai Aspek*, (Yogyakarta: LPMI, 1995), hlm. 160.

2. Bagaimana pandangan *Siyasah Syar'iyah* terhadap perilaku Pemilih masyarakat Dusun Pugeran Kelurahan Maguwoharjo Kecamatan Depok Kabupaten Sleman dalam Pilkada serentak 2015?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk menggali dan menjelaskan kriteria pemimpin menurut masyarakat Dusun Pugeran Kelurahan Maguwoharjo Kecamatan Depok Kabupaten Sleman dalam menjatuhkan pilihannya di Pilkada Serentak 2015.
 - b. Untuk menguji pandangan *Siyasah Syar'iyah* terhadap kriteria pemimpin menurut masyarakat Dusun Pugeran Kelurahan Maguwoharjo Kecamatan Depok Kabupaten Sleman menjatuhkan pilihannya di Pilkada Serentak 2015.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran kepada umat Islam khususnya, kepada bangsa Indonesia pada umumnya, berupa wacana perilaku pemilih masyarakat dalam pilkada serentak.
 - b. Secara praktis, umat Islam di Indonesia akan memiliki kesadaran politik, terutama pada aspek urgensi suara mereka dalam Pemilu.

D. Telaah Pustaka

Dari hasil telaah yang telah peneliti lakukan, peneliti belum menemukan peneliti yang secara khusus mengenai perilaku pemilih masyarakat di Dusun Pugeran Kelurahan maguwoharjo dalam pilkada serentak 2015. Dari beberapa

literatur yang dipelajari oleh peneliti, peneliti menemukan beberapa literatur yang berkaitan dengan peneliti diantaranya:

Fajar Tri Awan dalam "*Perilaku Politik Santri dalam Pilkada di Kabupaten Klaten Tahun 2005 di Ponpes Muttaqin*" meneliti perilaku pemilih santri di Ponpes Muttaqin Klaten dalam ajang Pilkada 2005. Dalam pengamatannya, Fajar menemukan bahwa dalam Pilkada ini para santri di Ponpes Muttaqin cenderung memperlihatkan sikap netral atau tidak menggunakan hak pilih mereka (Golput) karena tiadanya calon kepala dan wakil kepala daerah yang dianggap mewakili kepentingan mereka, dalam hal ini adalah calon dari kalangan Nahdliyin atau yang didukung oleh PKB, sebagai representasi partai kalangan Nahdliyin.⁶

Skripsi karya Fera Hariani Nasution dengan judul "*Perilaku Pemilih Pada Pemilihan Gubernur Sumatera Utara Secara Langsung Di Kabupaten Labuhan Batu (Studi Kasus : di Kelurahan Bakaran Batu, Kabupaten Labuhan Batu)*", 2009. Universitas Sumatra Utara. Hasil penelitian dari skripsi ini, disebutkan bahwa orientasi kandidat atau kontestan politik dan orientasi isu yang berkembang saat kampanye pemilihan umum memiliki hubungan yang cukup kuat dengan perilaku pemilih.⁷

Skripsi karya Sara Isnawati dengan judul "*Preferensi Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta Terhadap GKR Hemas*". Hasil penelitian dari skripsi ini,

⁶ Fajar Tri Awan dalam "*Perilaku Politik Santri dalam Pilkada di Kabupaten Klaten Tahun 2005 di Ponpes Muttaqin*", Skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2008.

⁷ Fera Hariani Nasution dalam "*Perilaku Pemilih Pada Pemilihan Gubernur Sumatera Utara Secara Langsung Di Kabupaten Labuhan Batu (Studi Kasus : di Kelurahan Bakaran Batu, Kabupaten Labuhan Batu)*", Skripsi Universitas Sumatra Utara, 2009.

disebutkan bahwa preferensi masyarakat DIY terhadap GKR Hemas di dasari pada ketertarikan masyarakat DIY terhadap faktor kinerja dari GKR Hemas. Hal ini terbukti dengan hasil perolehan hasil kuisioner faktor kinerja lebih tinggi prosentasenya dibanding dengan faktor non kinerja. Tetapi prosentase sistem budaya (Faktor non kinerja) terbilang tinggi, yakni 89%. Hal ini menandakan bahwa dalam memilih GKR Hemas , masyarakat DIY lebih mendahulukan emosionalnya daripada rasionalitasnya. Terlihat dari hasil penelitian, bahwa 74% memilih GKR Hemas berdasarkan rasionalitasnya.⁸

Skripsi karya Abdul Kadir Jaelani dengan judul "*Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2013 Perspektif Good Governance*", 2014. Dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan pertama mekanisme pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah di Kabupaten Lombok timur Tahun 2013 sangat kompleks dan dibagi berdasarkan tahapan-tahapan pelaksanaan, yang masing-masing ditentukan mekanisme dan prosedurnya. Secara umum, tahapan-tahapan pelaksanaan pemilukada Kabupaten Lombok Timur meliputi tiga tahap yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, tahap penyelesaian. *Kedua*, tindakan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum dan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Lombok Timur dalam mengendalikan pelanggaran pemilukada yang tidak sesuai dengan asas pemilu (jujur, adil, bebas, langsung dan rahasia) tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu karena dalam pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten

⁸ Sara Isnawati "*Preferensi Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta Terhadap GKR Hemas*", Skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2014.

Lombok Timur penyelenggaraan melakukan pelanggaran secara sistematis, terstruktur dan masif yang berakibat kepada pelanggaran terhadap asas-asas umum pemerinta yang layak (*good governance*).⁹

Dari semua karya di atas, penulis belum menemukan secara spesifik skripsi yang khusus membahas Perilaku Memilih dalam Pilkada Serentak 2015 dalam Perspektif Siyasa (Studi Dusun Pugeran Kelurahan Maguwoharjo Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Yogyakarta), sehingga membuat penulis tertarik untuk mengupasnya sesuai dengan disiplin ilmu yang penulis punya.

E. Kerangka Teori

Melihat fenomena pemilihan pemimpin di Indonesia khususnya pemilihan Bupati, perlu menggunakan teori yang sesuai untuk melihat landasan-landasan masyarakat Dusun Pugeran Kelurahan Maguwoharjo dalam menggunakan hak memilihnya dalam Pemilihan Bupati 2015. Sebagai pisau analisis, teori yang digunakan harus bisa mengukur manfaat dari perilaku memilih masyarakat Dusun Pugeran Kelurahan Maguwoharjo dalam Pemilihan Bupati 2015 bagi kelangsungan hidup mereka. Oleh karena itu, penulis akan menggunakan *Siyasah Syar'iyah* dalam memilih *Ulil Amri* atau pemimpin yang benar sesuai dengan kaidah Islam.

Sedangkan menurut *Siyasah Syar'iyah*, memilih *Ulil Amri* atau pemimpin menurut kaidah islami dibagi kedalam empat sub bab, yaitu : Memberi jabatan kepada orang terbaik, Memilih yang lebih ideal lalu yang lebih ideal lagi,

⁹ Abdul Kadir Jaelani dalam “*Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2013 Perspektif Good Governance*”, Skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2014.

Minimnya sinergi antara amanah (kejujuran) dan kekuatan pada manusia (*Human Power*), Mengetahui orang yang paling layak dan cara mengetahuinya.

Keempat sub bab tersebut menjelaskan siapa saja yang layak di pilih menjadi pemimpin dan bagaimana cara metode pengangkatan yang tepat. Memilih pemimpin haruslah yang terbaik dan sudah ahli dalam bidangnya, bertawakal dan berilmu, serta amanat. Dalam hal ini dapat dikatakan terbaik apabila hanya orang itulah yang mampu melakukannya karena orang itu memiliki ilmu yang sudah berpengalaman dalam bidang yang berkaitan. Meskipun orang tersebut, merupakan orang terbaik, berilmu, dan sudah berpengalaman. Namun apabila orang itu tidak tawakal dan tidak amanat, maka orang tersebut belum pantas dipilih menjadi seorang pemimpin. Orang yang melaksanakan amanat sekalipun itu bertentangan dengan hawa nafsunya, maka Allah akan meneguhkannya, menjaga, dan memelihara keluarga serta harta bendanya. Oleh karena itu, bertawakal dan amanat juga syarat penting yang harus dipertimbangkan ketika seorang muslim menentukan pilihan untuk memilih seorang pemimpin.

Pejabat yang terpilih menduduki sebuah jabatan hendaknya memiliki dua kriteria sebagai berikut, yakni *Quwwah* (otoritas) dan *Amanat* (jujur dan dapat dipercaya).¹⁰ Kekuatan atau otoritas dalam setiap wewenang kekuasaan itu bergantung pada jenis jabatannya. Misalnya saja otoritas dalam kepemimpinan perang adalah keberanian, kepriawaian mengatur siasat, menyusun, dan menerapkan strategi atau taktik perang. Dalam kepemimpinan perang dibutuhkan juga kehandalan menguasai berbagai jenis peralatan perang. Begitu juga dengan

¹⁰ Ibnu Taimiyah. *Siyasah Syar'iyah : Etika Politik Islam*, (Surabaya: Bina Ilmu, 2007), hlm. 11.

jabatan lain, calon pejabat harus memiliki otoritas atau kekuatan yang mendukung untuk terlaksananya kelancaran ketika menjabat jabatan tersebut. Kekuatan atau otoritas dalam sistem pemerintahan dan tata hukum terhadap sesama manusia adalah sikap adil sebagaimana yang telah ada dalam Al-Qur'an dan as-Sunnah.

Sikap amanat (jujur dan dapat dipercaya) erat kaitannya dengan rasa *Khauf* (takut) kepada Allah SWT. Seorang calon pejabat hanya boleh takut kepada Allah SWT, tidak boleh dan harus menghindari rasa takut terhadap sesama manusia.

Sedikitnya manusia yang mempunyai sifat *Quwwah* (otoritas) dan *Amanat* sekaligus. Oleh karena itu pemilihan dan pengangkatan pejabat untuk menempati wilayah atau daerah tertentu harus disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan daerah itu sendiri. Jika terdapat dua calon pejabat dengan karakter berbeda, yang satu lebih menonjol kekuatan, sementara yang lain lebih menonjol sifat amanatnya. Menghadapi kenyataan seperti itu, maka prioritas utama ditentukan menurut kebutuhan dan kapasitas calon yang terpilih bagi wilayah tersebut dan pertimbangkan sisi mudharatnya lebih ringan.

Keselarasan sifat calon pejabat dengan wakil calon pejabat juga memiliki andil dalam jalannya pemerintahan. Jika pemegang kekuasaan tertinggi bersikap lunak, seyogyanya memiliki wakil yang berpembawaan lebih tegas (keras). Sebaliknya, jika karakter penguasanya berpembawaan keras maka sebaliknya memilih wakil yang lunak. Sehingga tercapai keseimbangan dan keselarasan dalam menjabat suatu jabatan.

Sedangkan kriteria pemimpin menurut Al Mawardi dibagi menjadi tujuh, yaitu:

1. Pemimpin harus memiliki sifat adil (al-‘adalah). Menurut Al Mawardi sifat adil ini adalah hal yang fundamental karena pemimpin tanpa sifat adil akan mengakibatkan negara tidak ideal.
2. Pemimpin harus memiliki pengetahuan yang luas. Pengetahuan yang luas sangat dibutuhkan oleh seorang pemimpin untuk menopang kepala negara dalam berjihad dan berjihad. Tanpa pengetahuan yang luas, seorang pemimpin dalam berjihad dan berjihad akan mengalami kesulitan atau salah arah.
3. Seorang pemimpin harus memiliki kemampuan mendengar, melihat dan berbicara secara sempurna, sehingga ia dapat mengenali masalah dengan teliti dan dapat mengakomodasikannya dengan baik.
4. Seorang kepala negara harus memiliki fisik yang baik atau tidak cacat sehingga dapat memimpin negara tanpa ada keterbatasan
5. Seorang pemimpin harus memiliki kearifan dan wawasan yang memadai untuk mengatur kehidupan rakyat dan mengatur kepentingan umum
6. Seorang kepala negara harus , memiliki keberanian untuk melindungi wilayah kekuasaan Islam dan untuk mempertahankannya dari serangan musuh.
7. Seorang pemimpin harus berasal dari keturunan quraissy. Hal tersebut dimaksudkan agar pemimpin berasal dari agama Islam. Jadi untuk

pada zaman modern ini pemimpin harus beragama Islam sehingga bisa menerapkan peraturan yang diterapkan Islam itu sendiri.¹¹

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, tentunya penulis membutuhkan sebuah metode penelitian guna membantu tujuan penulis dalam mengungkap perilaku pemilih masyarakat Dusun Pugeran Kelurahan Maguwoharjo dalam Pemilihan Bupati perspektif *Siyasah*. Penelitian ini menggunakan model penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif memfokuskan pada usaha untuk menggali nilai-nilai yang terkandung dalam suatu fenomena sosial bukan semata-mata berbasis pada hasil-hasil survei ataupun data statistik. Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam tulisan ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Di mana data-data yang akan dikumpulkan berdasarkan hasil dari pengamatan atau observasi langsung lapangan. Serta, data juga akan dikumpulkan dari beberapa tulisan baik itu dalam bentuk buku, jurnal, artikel dll. Tentunya yang relevan dengan permasalahan yang penulis angkat, yaitu mengenai Perilaku Pemilih Masyarakat Dusun Pugeran.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik. Dimana penulis mendiskripsikan permasalahan atau variabel¹² perilaku pemilih masyarakat

¹¹ Sudarnoto Abdul Hakim, dkk. (ed), *Islam Berbagai Aspek*, (Yogyakarta: LPMI, 1995), hlm. 160.

Dusun Pugeran yang kemudian akan dianalisis mengenai bagaimana memilih pemimpin menurut pandangan Islam (*siyash syar'iyah*).

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis politik, karena fokus dari kajian ini melihat kriteria masyarakat dusun pugeran dilihat dari sudut pandang *Siyash Syar'iyah*. Serta implementasinya dalam kehidupan sehari-hari.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data yang akan dicari adalah tentang perilaku pemilih masyarakat Dusun Pugeran Kelurahan Maguwoharjo Kecamatan Depok Kabupaten Sleman dalam Pemilihan Pilkada Serentak 2015. Adapun data tersebut dicari dengan menggunakan:

a) Studi Literatur

Metode literatur adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengambil data-data yang diperlukan dari literatur-literatur atau bahan pustaka yang berkaitan. Bahan pustaka merupakan teknik pengumpulan data melalui teks-teks tertulis maupun *soft-copy edition*, seperti buku, *ebook*, artikel-artikel dalam majalah, surat kabar, buletin, jurnal, laporan atau arsip organisasi, makalah, publikasi pemerintah, internet, teks pidato dan lain-lain.

¹² Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, cet. ke-4, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), hlm. 104.

b) Wawancara

Wawancara adalah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Maksudnya ialah proses memperoleh data untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab tatap muka antara pewawancara dengan responden.¹³ Langkah selanjutnya adalah melakukan wawancara, yaitu berkomunikasi langsung pada pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini. Dalam menentukan narasumber, penulis menggunakan metode *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.¹⁴ Perkembangan tertentu ini misalnya orang tersebut yang dianggap tahu tentang apa yang kita harapkan atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek atau situasi yang diteliti. Atau dengan kata lain pengambilan sampel diambil berdasarkan kebutuhan penelitian. Pihak-pihak tersebut yaitu beberapa tokoh masyarakat Dusun Pugeran dan beberapa perangkat Dusun Pugeran yang mewakili pemilihan suara dalam pilkada serentak 2015. Dalam penelitian ini narasumber yang diwawancarai, tidak mewakili populasi akan tetapi mewakili informasinya.

¹³ *Ibid.*, hlm. 128.

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2001), hlm.61.

5. Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini ialah sumber data primer dan sekunder. Dimana data-data yang diambil berasal dari pengamatan langsung di lapangan dan/atau dengan teknik wawancara. Selain itu, juga berasal dari sumber-sumber sekunder seperti halnya buku atau karya ilmiah lainnya yang relevan.

Sumber primer akan penulis dapatkan dari penelitian langsung lapangan di Dusun Pugeran Kelurahan Maguwoharjo Kabupaten Sleman. Para Perangkat dan masyarakat Dusun Pugeran.

6. Analisis Data

Setelah data didapatkan, baik itu primer maupun sekunder, maka data-data tersebut akan dianalisis dengan tipe analisis deduktif. Analisis deduktif berpijak pada data-data sebagai langkah awal yang kemudian akan diteliti dengan tujuan akan mendapatkan hasil berupa kesimpulan yang lebih bersifat khusus.¹⁵

G. Sistematika Pembahasan

BAB I membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan Skripsi yang akan dibahas dalam bab-bab selanjutnya.

BAB II membahas tentang gambaran umum lokasi penelitian dan pemahaman tentang Pilkada serentak.

¹⁵ H. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, cet. ke-2, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 27.

BAB III membahas tentang siyasah syar'iyah menurut Imam Al-Mawardi, Nabi Muhammad SAW, dan Ibnu Taimiyah serta hasil penelitian yang didapat dari lapangan.

BAB IV membahas tentang analisis hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan teori-teori yang digunakan oleh peneliti.

BAB V membahas tentang kesimpulan dari hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti dan saran dari peneliti untuk penelitian yang lain.



BAB II

PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DUSUN PUGERAN

KELURAHAN MAGUWO HARJO KECAMATAN DEPOK KABUPATEN

SLEMAN YOGYAKARTA

A. Kondisi Umum Dusun Pugeran

1. Letak Geografis

Secara geografis Dusun Pugeran Desa Maguwoharjo merupakan bagian dari Kecamatan Depok, dan ikut dari wilayah Kabupaten Sleman. Desa Maguwoharjo dibagi menjadi 20 pedukuhan semuanya terletak di daerah dataran, dengan posisi terletak 6 Km dari pusat pemerintahan dan jarak tempuh mencapai 15 Km dari ibu kota Kabupaten Sleman. Dengan ketinggian tempat dan permukaan laut 250 meter dan suhu rata-rata 32 C.

Pada mulanya Desa Maguwoharjo merupakan wilayah yang terdiri dari 5 (lima) Kelurahan dan 2 (dua) kampung, masing-masing adalah: Kelurahan Kembang, Kelurahan Nayan, Kelurahan Tajem, Kelurahan Paingan, Kelurahan Padasan, Kampung Pengawatrejo, Kampung Blimbingsari. Berdasarkan maklumat Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta yang diterbitkan tahun 1946 mengenai Pemerintahan Kelurahan, maka 5 (lima) Kelurahan dan 2 (dua) kampung tersebut kemudian digabung menjadi 1 Desa yang otonom dengan nama Desa Maguwoharjo. Secara resmi Desa Maguwoharjo ditetapkan berdasarkan Maklumat Nomor 5 Tahun 1948 tentang Perubahan Daerah-Daerah Kelurahan.¹

¹ “Maguwoharjo, Depok, Sleman”, https://id.wikipedia.org/wiki/Maguwoharjo,_Depok,Sleman, akses 8 Agustus 2016.

Desa Maguwoharjo terletak pada 7°46'21" LS dan 110°25'30" BT, dengan luas wilayah 992.8300 M², dan jumlah penduduk 25.125 jiwa. Nama Maguwoharjo diambil dari nama lapangan terbang yang ada di wilayah ini yakni lapangan terbang Meguwo, yang sekarang lebih dikenal dengan Bandar Udara Adisucipto. Selain Bandar Udara Adisucipto, beberapa obyek vital yang terdapat di wilayah ini diantaranya adalah: Kampus Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, dan Stadion Internasional Maguwoharjo.

Adapun batas wilayah geografis adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Desa Wedowartani
Sebelah Timur	: Desa Purwomartani
Sebelah Selatan	: Lanud / AAU Adisucipto
Sebelah Barat	: Desa Catur Tunggal

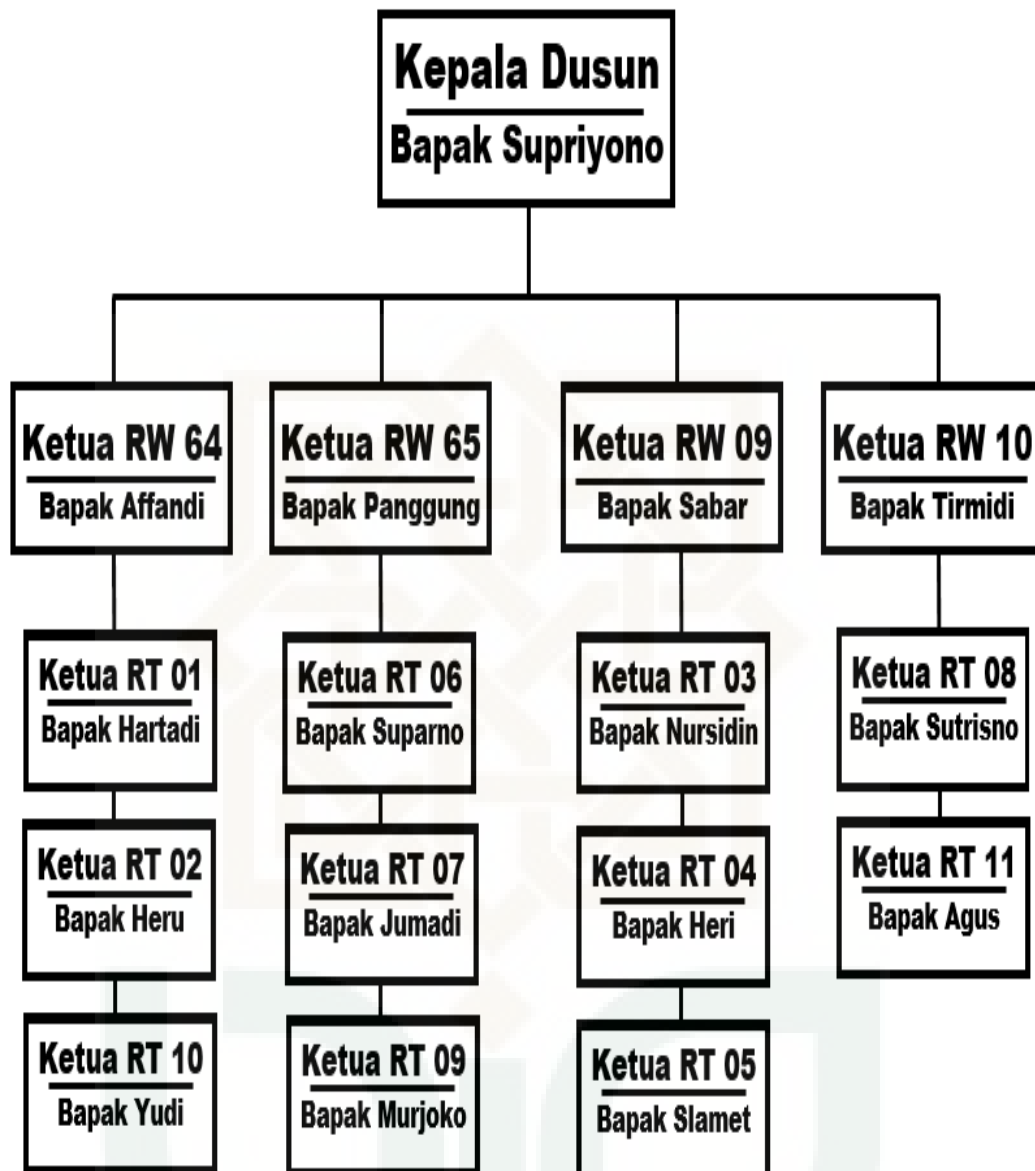
2. Pemerintahan

Untuk meningkatkan peran masyarakat dalam rangka mengoptimalkan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah Dusun Pugeran maka dipilihlah masyarakat yang benar-benar kompeten untuk Aparat dusun atau Elit dusun agar terkendalinya pembangunan dan pengembangan dusun.

Dusun Pugeran merupakan bagian wilayah Kecamatan Depok, untuk perangkat dusun dengan klasifikasi jabatan sebagai Kepala Dusun, Ketua RW, Ketua RT dan tokoh masyarakat lainnya.²

Struktur Perangkat Dusun Pugeran

² Daftar nama perangkat dusun, dokumen.



Sumber : data perangkat dusun pugeran

3. Penduduk dan Tenaga Kerja

Pada Desember 2008 yang bersumber dari Kartu Keluarga Dusun Pugeran telah tercatat sebanyak 398 KK dengan jumlah penduduk 1.573 jiwa yang terdiri dari laki-laki 758 jiwa dan perempuan dengan jumlah mencapai 815 jiwa.

Sedangkan untuk penduduk dengan klasifikasi usia (18-56 tahun) mencapai 1.124 jiwa dengan perincian laki-laki 546 jiwa dan perempuan dengan jumlah mencapai 578 jiwa.

4. Kondisi Sosial

Dusun Pugeran Maguwoharjo Depok Sleman dibidang pendidikan terdapat tingkatan pendidikan, lengkap dengan data jumlah laki-laki dan perempuan.³ Begitupun juga data dengan agama/aliran kepercayaan, lengkap dengan jumlah laki-laki dan perempuan. Adapun untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Tingkat Pendidikan Dusun Pugeran

Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan
Tidak Sekolah	79	87
SD	170	149
SMP	132	141
SMA	271	236
DIPLOMA	34	41
STRATA	105	128

Tabel 3.2

³ Dokumen daftar isian potensi dusun dan kelurahan.

Agama/aliran kepercayaan Dusun Pugeran

Agama	Laki-laki	perempuan
Budha	0 orang	0 orang
Hindu	0 orang	0 orang
Islam	607 orang	854 orang
Khatolik	16 orang	18 orang
Kristen	37 orang	41 orang
Jumlah	660 orang	913 orang

5. Mata pencaharian pokok

Dalam segi mata pencaharian, beragam pekerjaan yang masyarakat Dusun Pugeran lakukan untuk memenuhi kebutuhan Rumah Tangga, adapun bagi laki-laki pekerjaan wiraswasta (163 orang), karyawan swasta (164 orang), buruh (96 orang), dan pekerjaan lainnya.

Sedangkan pekerjaan bagi perempuan presentase terbanyak adalah sebagai karyawan swasta (69 orang), PNS (61 orang), guru (25 orang), dan pekerjaan lain.

B. Sejarah dan Dinamika Pemilihan Kepala Daerah

Selama 10 tahun ke belakang di Indonesia telah terjadi banyak perubahan dalam proses pemilihan, sebelum tahun 2005 kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan hal ini

berubah sejak berlakunya UU NO.32 : 2004 tentang Pemerintah Daerah di mana dikatakan bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat.

Disebut pilkada serentak yakni proses pemilihan kepala daerah (baik itu tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten dan kota) dalam lingkup wilayah atau kawasan tertentu yang dilakukan secara serentak/dalam waktu yang bersamaan. Dalam hal ini, masyarakat dapat memilih secara langsung calon kepala daerah/wakil yang di percaya untuk memimpinnya dalam kurun waktu 5 tahun kedepan, hal ini sangat efisien dikarenakan dapat mengurangi nepotisme yang sering terjadi di kalangan pemerintahan.

Pada tahun 2015, pemerintah pusat telah menyepakati diadakannya pilkada serentak untuk daerah-daerah yang masa jabatan pemerintahannya akan berakhir di tahun 2015, tujuannya adalah efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaannya, dengan harapan dapat dilakukannya penghematan waktu, energi dan anggaran pilkada yang tentu jumlahnya tidak sedikit.

Dalam sejarah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), baik provinsi maupun kabupaten atau kota berlandaskan pada ketentuan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 menyatakan bahwa “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”. Rumusan ini menimbulkan permasalahan awal, yaitu bahwa pilkada dilakukan secara langsung seperti halnya pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) atau secara tidak langsung dipilih oleh DPR seperti yang

dipraktekkan sebelumnya yang diatur dalam UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.⁴

Secara pengertiannya Pemelilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan suatu proses dan mekanisme tentang Pemelilihan Kepala Daerah tingkat I (Gubernur dan Wakil Gubernur) dan kepala daerah tingkat II (Bupati dan Wakil Bupati) yang dipilih secara langsung oleh masyarakat di daerah tersebut melalui pemungutan suara. Tidak dapat dipungkiri memang jika pilkada merupakan suatu tonggak penting dalam sejarah perjalanan perpolitikan di Indonesia.

Tahun 2004 dimana berlangsungnya penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara langsung telah mengilhami dilaksakannya Pemelilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung pula. Hal ini didukung pula dengan semangat otonomi daerah yang telah bergulir mulai dari 1999. Oleh karena itulah, sejak tahun 2005 telah diselenggarakan pilkada secara langsung, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota. Landasan penyelenggaraan Pilkada ini adalah UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah yang mana di dalamnya menyebutkan bahwa “Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.”⁵

Setelah itu melalui UU No. 22 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu, Pilkada yang semula dikategorikan sebagai termasuk rezim hukum

⁴ A. Mukhtie Fadjar, *Pemilu Perselisihan Hasil Pemilu dan Demokrasi*, (Malang: Setara Press, 2013), hlm. 101-102.

⁵ Tjahjo Kumolo, *politik Hukum Pilkada Serentak*, (Jakarta: Expose Publika, 2015), hlm. 80.

pemerintahan daerah telah bergeser menjadi rezim hukum pemilu, sehingga Pilkada berubah menjadi Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada). Kemudian, berdasarkan UU No. 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 32 tahun 2004, berselisihan hasil Pemilukada dialihkan dari Mahkamah Agung (MA) ke Mahkamah Konstitusi (MK).⁶

Perubahan sistem Pemilu yang merupakan kebutuhan suatu bangsa yang di selaraskan dengan fungsi dari pemilu itu sendiri, pengembangan terkait hal-hal teknis Pemilu harus sejalan dengan fungsi Pemilu yang juga selalu mendapatkan pembaruan seiring terjadi pertentangan dengan partai-partai politik khususnya partai besar. Selain itu harus juga selalu diingat bahwa hasil Pemilu merupakan fungsi dari Pemilu yang dikehendaki, menurut Aurel Croissant sedikitnya ada 3 fungsi dari Pemilu, yaitu:

1. Fungsi Keterwakilan, dimana kelompok masyarakat memiliki perwakilan dari aspek geografis, fungsional dan juga deskriptif.
2. Fungsi Integrasi, dimana penerimaan partai terhadap partai lain dari aspek menang dan koalisi.
3. Fungsi mayoritas, menjamin stabilitas pemerintahan dan kemampuannya untuk memerintah.

Perjalanan panjang tentang sejarah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia terbagi atas lima fase:

1. Fase pertama dimana yang mempunyai wewenang untuk memilih dan memberhentikan kepala daerah adalah Presiden (sebagai pemerintah

⁶ A. Mukhtie Fadjar, *Pemilu...*, hlm. 102.

pusat). Pengaturan tentang mekanisme tersebut mengacu pada UU No. 5 tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah yang memberi kekuasaan mutlak kepada pemerintah pusat (Presiden) untuk menunjuk, mengangkat, dan memberhentikan Kepala Daerah.

2. Keluarnya Undang-Undang No. 22 tahun 1999 sebagai pengganti UU No. 5 tahun 1974 yang intinya menjelaskan bahwa kepala daerah dipilih, diangkat, dan diberhentikan oleh DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah). Undang-Undang tersebut seperti menjadi cermin atas semangat era reformasi yang mempunyai tekad mengakhiri keotoriteran birokratik Orde Baru dan mewujudkan kedaulatan rakyat yang hakiki. Secara teoritis, praktek pemilihan demikian merupakan langkah maju dalam demokrasi. Tetapi, pada prakteknya DPRD sering “nongol” bagaikan sosok yang istimewa dalam mewakili kepentingan lembaga dan partai, ketimbang mewakili kepentingan dan aspirasi rakyat.
3. Merupakan fase dimana kepala daerah dicalonkan oleh partai politik dan dipilih langsung oleh rakyat. Pengaturan dasar terhadap mekanisme tersebut ialah UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan adanya mekanisme tersebut diharapkan dapat mencegah pengapdosian aspirasi rakyat seperti yang terjadi pada era-era sebelumnya.
4. Fase dimana calon independen memiliki hak atas maju dalam Pemilihan Kepala Daerah. Dasar atas ketentuan ini mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 5 /PPU-V/2007 yang mengabulkan

permohonan *judicial review* lalu Ranggalawe (anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah) terhadap UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah yang menutup kemungkinan calon independen ikut dalam kompetisi Pilkada. Adapun amar (bunyi) putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang di dalamnya menyebutkan bahwa sebagian pasal dalam UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang hanya memberi kans kepada partai politik atau gabungan partai politik dan menutup hak konstitusional calon independen untuk maju dalam pilkada, hal tersebut bertentangan dengan UUD 1995.⁷

Sebelumnya Laode Ida menuturkan sebagaimana dikutip Saardiyono, ada empat bahaya yang akan terjadi jika calon independen tidak diperbolehkan ikut dalam Pilkada: *pertama*, suburnya praktek politik uang, sebab partai politik akan dibayar oleh oknum yang ingin maju ataupun dipilih dalam Pilkada. *Kedua*, pemaksaan terhadap masyarakat untuk memilih calon-calon yang disodorkan oleh partai politik meskipun mereka tidak disukai ataupun dikenal oleh masyarakat. *Ketiga*, terjadi praktek amputasi proses demokrasi dikarenakan ruang partisipasi masyarakat untuk memilih calon yang mereka inginkan telah ditutup.⁸

⁷ Menurut perkembangan bentuk dan mekanisme pemilihan daerah dalam sejarah politik Indonesia Orde Baru hingga era reformasi selengkapnya baca Afif Amrullah, *Metamorfosis Demokratisasi di Daerah*, AULA, No 7, Th XXX (juli 2008), hlm. 20-23.

⁸ Supardiyono, *Problem Penjaringan Pasangan Calon*, dalam Mohammad Najib (ed), *Pilkada dan Pengembangan Demokrasi Lokal*, (KPU Provinsi DIY, 2005), hlm. 69.

5. Fase yang terakhir di mana untuk pertama kalinya Indonesia menerapkan sistem Pilkada secara langsung dan serentak dimulai pada 9 Desember 2015. Landasan dari pelaksanaan Pilkada serentak tersebut ialah Undang-Undang No. 8 tahun 2015 (disahkan pada tanggal 18 Maret 2015) yang menjadi perubahan atas Undang-Undang No. 1 tahun 2015. Urgensi ditetapkannya tipe pemilihan kepala daerah secara serentak ialah untuk menyederhanakan sistem pelaksanaan dan menghemat anggaran, memblokir praktek politik dinasti, selain itu untuk membenahi tatanan pemerintahan agar lebih sinkron dengan kata lain menciptakan masa bakti yang tertata, dan lain-lain.

C. Kelebihan dan Kekurangan Pilkada Serentak

Dalam setiap hal akan mengandung 2 sisi, seperti kelebihan dan kekurangan, pro dan kontra, manfaat dan mudharat. Hal ini berlaku pula pada pelaksanaan pilkada serentak dan pelaksanaannya, kita tidak dapat menutup mata adanya kekurangan dan kelebihannya.

Terdapat beberapa kontroversi yang terjadi di pilkada serentak 2015, meskipun dirasa banyak terdapat manfaatnya pilkada serentak juga menimbulkan beberapa polemik yang terjadi dimasyarakat, seperti halnya di beberapa daerah hanya terdapat terdapat satu pasang calon kepala daerah, atau calon tunggal. Namun Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk memperbolehkan pemilihan kepala daerah bagi daerah yang hanya memiliki calon tunggal. Mahkamah Konstitusi beralasan, jika pilkada ditunda karena kurangnya calon, maka akan menghapus hak konstitusional rakyat untuk memilih dan dipilih. Mahkamah juga

menilai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang pilkada juga tidak memberikan jalan keluar seandainya syarat-syarat calon tidak terpenuhi.

Untuk proses pemilihan kepala daerah calon tunggal, surat suara akan dibuat berbeda. Surat suara khusus ini hanya akan berisi satu pasangan calon kepala daerah, dengan pilihan "Setuju" atau "Tidak Setuju" dibagian bawahnya. Apabila pilihan "Setuju" memperoleh suara terbanyak, maka calon tunggal ditetapkan sebagai kepala daerah yang sah. Namun jika pilihan "Tidak Setuju" memperoleh suara terbanyak, maka pemilihan ditunda hingga pilkada selanjutnya.

1. Manfaat Pilkada Serentak

Berbagai analis menyatakan bahwa pilkada serentak memiliki manfaat, diantaranya:

- a) Efisiensi anggaran
- b) Efektivitas lembaga pemilihan umum
- c) Sarana menggerakkan kader partai politik secara luas dan gencar.
- d) Mencegah *kutu loncat* (gagal di satu wilayah, menyeberang ke wilayah lain) seperti Rieke Dyah Pitaloka (gagal di Jakarta dan Jawa Barat, jadi bakal calon di Depok) dan Andre Taulany (gagal di Tangerang Selatan, jadi bakal calon di Depok)
- e) Perencanaan pembangunan lebih sinergi antara pemerintah DATI II, DATI I, dan pemerintah pusat.⁹

2. Kelemahan Pemilukada

⁹ "Pemilihan kepala daerah di Indonesia", https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_kepala_daerah_di_Indonesia, akses 21 Oktober 2016.

Menurut Leo Agustino ada sebelas (11) permasalahan pemilukada di Indonesia,¹⁰ yaitu sebagai berikut :

a) Daftar Pemilih tidak akurat

Permasalahan daftar pemilih yang tidak akurat dalam Pilkada, sering dijadikan oleh para pasangan calon yang kalah untuk melakukan gugatan. Berdasar Pasal 47 UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu menyebutkan bahwa PPS mempunyai tugas dan wewenang antara lain mengangkat petugas pemutakhiran data pemilih dan membantu KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap. Melalui pengaturan ini jika dalam pemutakhiran data pemilih, melibatkan RT/RW sebagai petugas pemutakhiran, maka permasalahan data pemilih yang tidak akurat akan dapat diminimalisir, karena RT/RW adalah lembaga yang paling mengetahui penduduknya.

b) Persyaratan Calon tidak lengkap

Permasalahan dalam pencalonan yang selama ini terjadi disebabkan oleh 2 (dua) hal yaitu konflik internal partai politik/gabungan partai politik dan keberpihakan para anggota KPUD dalam menentukan pasangan calon yang akan mengikuti Pilkada. Secara yuridis pengaturan mengenai pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diatur dalam pasal 59 sampai dengan pasal 64 Undang-

¹⁰ Leo Agustino, *Pilkada dan Dinamika Politik Lokal*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 121–152.

Undang Nomor 32 Tahun 2004. Dari beberapa pasal tersebut memberikan kewenangan yang sangat besar kepada KPUD dalam menerima pendaftaran, meneliti keabsahan persyaratan pencalonan dan menetapkan pasangan calon, yang walaupun ada ruang bagi partai politik atau pasangan calon untuk memperbaiki kekurangan dalam persyaratan administrasi, namun dalam praktek beberapa kali terjadi pada saat penetapan pasangan calon yang dirugikan. Pasal 59 ayat (5) huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa partai politik atau gabungan partai politik pada saat mendaftarkan pasangan calon, wajib menyerahkan surat pencalonan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau pimpinan partai politik yang bergabung. Dalam tahapan ini kadang terjadi permasalahan di internal partai politik, ketika calon yang diajukan oleh pimpinan partai politik setempat berbeda dengan calon yang direkomendasikan oleh DPP partai politik. Dalam permasalahan ini karena pimpinan partai politik setempat tidak melaksanakan rekomendasi DPP partai politik, kemudian diberhentikan sebagai pimpinan partai politik di wilayahnya dan menunjuk pelaksana tugas pimpinan partai politik sesuai wilayahnya yang kemudian juga meneruskan rekomendasi calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah namun ditolak KPUD dengan alasan partai politik tersebut melalui pimpinan wilayahnya yang lama telah mengajukan pasangan calon. Pasal 61 ayat (4) Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa penetapan dan pengumuman pasangan calon oleh KPUD bersifat final dan mengikat.

c) Pencalonan Pasangan dari parpol

Permasalahan internal parpol dalam menentukan pasangan calon membuat Pilkada terhambat. Hal itu disebabkan, adanya kepengurusan ganda, proses seleksi tidak transparan, adanya intervensi pengurus pusat/provinsi, tidak menetapkan pasangan seperti kasus di Sampang, Jatim.

d) Penyelenggara atau KPUD tidak netral

Faktor yang mempengaruhi ketidaknetralan KPUD berdasarkan faktor kedekatan dan kekerabatan dengan salah satu pasangan. Selain itu, tidak adanya pengadilan yang mengoreksi keputusan KPUD sehingga sangat dominan kekuasaan penyelenggara pemilikada.

e) Panwas pilkada dibentuk terlambat

Terlambatnya panitia pengawas (Panwas) oleh DPRD, sehingga tidak dapat mengawasi tahapan pemilukada secara keseluruhan. Berbagai penyimpangan pada persiapan sering tidak dilanjutkan, karena Panwas dibentuk menjelang masa kampanye.

f) Money politik

Sepertinya money politik ini selalu saja menyertai dalam setiap pelaksanaan pilkada. Dengan memanfaatkan masalah ekonomi masyarakat yang cenderung masih rendah, maka dengan mudah mereka dapat diperalat dengan mudah. Contoh yang nyata saja yaitu

di lingkungan desa Karangwetan, Tegaltirto, Berbah, Sleman, juga terjadi hal tersebut. Yaitu salah satu dari kader bakal calon membagi-bagikan uang kepada masyarakat dengan syarat harus memilih bakal calon tertentu. Tapi memang dengan uang dapat membeli segalanya. Dengan masih rendahnya tingkat pendidikan seseorang maka dengan mudah orang itu dapat diperalat dan diatur dengan mudah hanya karena uang. Jadi sangat rasional sekali jika untuk menjadi calon kepala daerah harus mempunyai uang yang banyak. Karena untuk biaya ini dan biaya itu.

g) Dana kampanye

Sumber dana pasangan sering tidak transparan. Hasil audit dana kampanye baik perorangan atau perusahaan sering tidak diumumkan ke publik. Hal itu menimbulkan kecurigaan publik, bahwa dana kampanye pasangan berasal dari dana korupsi atau sumbangan yang dikemudian hari pasangan tersebut, maka pemberi sumbangan akan mendapat imbalan berupa jabatan atau proyek-proyek pemerintah.

h) Mencuri start kampanye

Tindakan ini paling sering terjadi. Padahal sudah sangat jelas aturan-aturan yang berlaku dalam pemilu tersebut. Berbagai cara dilakukan seperti pemasangan baliho, spanduk, selebaran. Sering juga untuk bakal calon yang merupakan kepala daerah saat itu melakukan kunjungan ke berbagai daerah. Kunjungan ini intensitasnya sangat tinggi ketika mendekati pemilu. Ini sangat berlawanan yaitu ketika

sedang memimpin dulu. Selain itu media TV lokal sering digunakan sebagai media kampanye. Bakal calon menyampaikan visi misinya dalam acara tersebut padahal jadwal pelaksanaan kampanye belum dimulai.

i) PNS tidak netral

Dalam berbagai kampanye masih ditemukan PNS yang memihak pasangan tertentu, terutam incumbent (petahana). Dilain pihak calon *incumbent* memanfaatkan staf Pemda untuk kepentingan kampanyenya, bila tidak menuruti akan diturunkan jabatannya atau bahkan diberhentikan.

j) Pelanggaran kampanye

Pelanggaran kampanye dapat berbagai macam bentuk, salah satu yang menjadi sorotan yaitu kampanye hitam seperti yang menimpa Jokowi Pada pemilukada Jakarta 2012. Kampanye negatif ini dapat timbul karena kurangnya sosialisasi bakal calon kepada masyarakat. Hal ini dikarenakan sebagian masyarakat masih kurang terhadap pentingnya informasi. Jadi mereka hanya “manut” dengan orang yang di sekitar mereka yang menjadi panutannya. Kampanye negatif ini dapat mengarah pada munculnya fitnah yang dapat merusak integritas daerah tersebut

Pengaturan mengenai kampanye secara yuridis diatur dalam pasal 75 sampai dengan pasal 85 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yaitu meliputi pengaturan mengenai teknis kampanye, waktu pelaksanaan,

pelaksana kampanye, jadwal kampanye, bentuk dan media kampanye, dan larangan-larangan selama pelaksanaan kampanye. Kandidat dan tim kampanyenya cenderung mencari celah pelanggaran yang menguntungkan dirinya.

Pasal 75 ayat (2) berbunyi dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama 14 (empat belas) hari dan berakhir 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara", dengan terbatasnya waktu untuk kampanye maka sering terjadi curi start kampanye dan kampanye diluar waktu yang telah ditetapkan. Kampanye yang diharapkan dapat mendorong dan memperkuat pengenalan pemilih terhadap calon kepala daerah agar pemilih mendapatkan informasi yang lengkap tentang semua calon, menjadi tidak tercapai. Untuk itu ke depan perlu pengaturan masa kampanye yang cukup dan peningkatan kualitas kampanye agar dapat mendidik pemilih untuk menilai para calon dari segi program.

k) Intervensi DPRD

Pada umumnya terjadi apabila DPRD tidak setuju akan pasangan terpilih dengan berbagai alasan. DPRD tidak mengirim berkas pemilihan kepada Gubernur dan Mendagri, hal itu menghambat pelantikan pasangan terpilih. Hal itu pernah terjadi di Gorontalo dan Aceh. Peran DPRD dalam Pilkada juga dapat memicu konflik. Pilkada memang sepenuhnya dilaksanakan oleh KPU Daerah, tetapi pertanggungjawabannya harus disampaikan kepada DPRD, seperti yang tertulis pada pasal 66 ayat 3 poin, bahwa tugas dan wewenang

DPRD dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah meminta pertanggung jawaban pelaksanaan tugas KPUD. Dalam hal ini, kerja KPUD (Komisi Pemilihan Umum Daerah) berpotensi diintervensi oleh partai politik yang mempunyai kekuatan di DPRD. Sebab, sejalan dengan kewenangan yang besar dalam proses-proses politik lokal, partai politik berpotensi mengintervensi fungsi KPUD, jika kerja KPUD dianggap tidak menguntungkannya.

BAB III

**SIYASAH SYAR'IAH PILKADA SERENTAK 2015 DUSUN PUGERAN
KELURAHAN MAGUWO HARJO KECAMATAN DEPOK KABUPATEN
SLEMAN YOGYAKARTA**

A. Teori Siyasa Syar'iyah

1. Pengangkatan Imamah (Kepemimpinan) Imam al-Mawardi

Imamah (kepemimpinan) yang dimaksud al-Mawardi dijabat oleh khalifah (pemimpin), raja, penguasa, atau kepala negara, dan kepadanya ia diberi label agama. Al-Mawardi menyatakan “Sesungguhnya imam (khalifah) itu diproyeksikan untuk mengambil alih peran kenabian dalam menjaga agama dan mengatur dunia”. Dengan demikian seorang imam adalah pemimpin agama di satu pihak dan di lain pihak sebagai pemimpin politik.¹

Dasar pembentukan imamah menurut al-Mawardi adalah wajib secara *ijma'*. Akan tetapi dasar kewajiban itu diperselisihkan, apakah berdasarkan akal atau syari'at. Menurutny ada dua golongan, *pertama* wajib berdasarkan akal dengan alasan manusia itu adalah makhluk sosial dan dalam pergaulan mereka bisa terjadi permusuhan, perselisihan, dan penganiayaan. Karenanya dibutuhkan seorang pemimpin yang dapat mencegah kemungkinan-kemungkinan itu. *Kedua* wajib berdasarkan syari'at bukan karena pertimbangan akal dengan alasan karena kepala negara menjalankan tugas-tugas agama yang bisa saja akal tidak mendukungnya dan akal hanya menghendaki setiap orang yang berakal melindungi dirinya dari segala bentuk ketidakadilan, dan pemutusan hubungan,

¹ Imam al-Mawardi, *Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*, alih bahasa oleh Fadhli Bahri dari kitab *al-Ahkan al-Sulthaniyyah*, (Jakarta: Darul Falah, 2006), hlm. 1.

kemudian ia bertindak dengan akal sendiri bukan dengan akal orang lain. Sementara syari'at menghendaki bahwa segala persoalan itu harus diserahkan kepada pihak yang berwenang dalam agama.² Sebagaimana firman Allah SWT, Surah An-Nisa (4) ayat 59:

يَأْيُهَا الذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللّٰهَ وَأَطِيعُوا الرِّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَردوه إِلَى اللّٰهِ وَالرِّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا³

Apabila telah disepakati bahwa mengangkat *imamah* (kepemimpinan) itu hukumnya wajib. Maka status wajibnya adalah fardhu kifayah. Artinya, jika seseorang yang kapabel telah diangkat sebagai *imam* (khalifah), gugurlah kewajiban mengangkat *imam* (kepemimpinan) bagi yang lain sebab statusnya adalah fardhu kifayah. Namun, jika tidak ada seorang pun yang diangkat menjadi *imam* (khalifah), maka hal itu mengharuskan dibentuk dua kelompok: *Pertama*, kelompok pemilih yang bertugas memilih *imam* (khalifah) untuk memilihkan seorang pemimpin umat untuk mereka. *Kedua*, kelompok *imamah* (kepemimpinan) yang bertugas agar mengangkat diantara salah seorang dari mereka sebagai *imam* (khalifah).⁴

Bagi selain kedua kelompok di atas, tidaklah berdosa jika pengangkatan *imamah* (kepemimpinan) ditangguhkan. Jika kedua kelompok di atas mendapat

² Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthoniyah*, (Lebanon: Dar al Kutub Al Ilmiyah, t.t.), hlm. 7.

³ An-Nisa' (4): 59.

⁴ Abi Ya'la Muhammad Ibn al Husayn al Fara'i al Hanbali, *Al Ahkam Al Sultaniyyah*, (Surabaya: Sharkah Maktabah Ahmad bin Sa'id bin Nabhan, 1974), hlm. 19.

keistimewaaan daripada yang lain untuk mengangkat *imam* (khalifah), keduanya wajib memenuhi syarat-syarat yang *mu'tabar* (legal).

Ada dua cara menurut al-Mawardi di dalam pemilihan imam (khalifah): *pertama*, Dewan pemilih yang bertugas memilih imam bagi umat. *Kedua*, Dewan imam yang bertugas mengangkat salah seorang dari mereka sebagai imam. Hal ini menunjukkan bahwa baik dari sumber awal agama Islam atau fakta historis, al-Mawardi tidak menemukan sistem yang baku dalam pemilihan kepala negara, tetapi pemilihan kepala negara dalam Islam telah diimplementasikan oleh para sahabat.

Adapun kriteria yang harus dipenuhi oleh Dewan pemilih sebagai berikut:

- a. Adil dengan segala syarat-syaratnya.
- b. Ilmu yang membuatnya mampu mengetahui siapa yang berhak menjadi imam sesuai dengan kriteria-kriteria yang legal.
- c. Wawasan dan sikap bijaksana yang membuat mampu memilih siapa yang paling tepat menjadi imam dan paling efektif serta paling ahli dalam mengelola semua kepentingan.⁵

Sedangkan kriteria yang harus dipenuhi oleh Dewan Imam adalah:

- a. Adil dengan syarat-syaratnya yang universal.
- b. Ilmu yang membuat mampu berijtihad terhadap kasus-kasus dan hukum-hukum.
- c. Sehat inderawi (telinga, mata, dan mulut) yang dengannya ia mampu menangani langsung permasalahan yang telah diketahuinya.

⁵ Imam al-Mawardi, *Ahkan Sulthaniyah*, alih bahasa oleh Khaifurrahman fath & Faturrahman, (Jakarta: Qisthi Press, 2014), hlm. 11.

- d. Sehat organ tubuh dari cacat yang menghalangi bertindak dengan sempurna dan cepat.
- e. Wawasan yang membuatnya mampu memimpin rakyat dan mengelola semua kepentingan.
- f. Berani dan kesatria yang membuat mampu melindungi wilayah negara dan melawan musuh.
- g. Nasab yaitu berasal dari keturunan Quraisy berdasarkan nash-nash yang ada dan ijma' yang terjadi pada pertemuan Tsaqifah Bani Sa'idah ketika Abu Bakar menyatakan (pemimpin-pemimpin itu berasal dari Quraisy) maka terpilihlah Abu Bakar r.a sebagai khalifah pertama berdasarkan ijma'. Kemudian Rasulullah juga bersabda (dahulukan orang Quraisy dan jangan kalian mendahuluinya).⁶

Ada sepuluh tugas yang harus dilakukan oleh seorang imam, antara lain:

- a. Menjaga agama sesuai dengan prinsip-prinsip yang disepakati oleh ulama salaf.
- b. Menerapkan keadilan diantara orang yang sedang berperkara.
- c. Melindungi wilayah negara dan tempat-tempat suci.
- d. Menegakkan supremasi hukum untuk menjaga agama dan umat.
- e. Melindungi daerah-daerah perbatasan dari serangan musuh.
- f. Memerangi orang-orang yang menentang Islam (jihad) setelah adanya dakwah.

⁶ Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyah wa al-Wilayatu al-Diniyah*, (Kairo: Mustafa Al-Babi Al-Halabi, t.t.), hlm. 18.

- g. Mengambil fa'i (harta yang didapatkan kaum muslimin tanpa pertempuran) dan sedekah sesuai dengan yang diwajibkan oleh Syari'at.
- h. Mengatur penggunaan harta baitul mal (kas negara) secara efektif.
- i. Mengangkat orang-orang yang terlatih dan ahli dalam bidangnya untuk membantu tugasnya.
- j. Terjun langsung menangani persoalan yang terjadi di masyarakat (*blusukan*).⁷

Yang dimaksudkan oleh Imam Mawardi di sini adalah Khalifah, Raja, Sultan, atau Kepala Negara. Dengan demikian Imam Mawardi memberikan juga baju agama kepada jabatan Kepala Negara disamping baju Politik. Menurut beliau, Allah mengangkat seorang pemimpin untuk ummatnya sebagai pengganti (Khalifah) Nabi, untuk mengamankan agama, dengan disertai mandat politik. Dengan demikian Seorang imam disamping menjadi pemimpin politik juga berperan sebagai pemimpin agama.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Imam Mawardi berpendapat seorang pemimpin tidaklah hanya cerdas dalam mengatur perpolitikan tetapi seorang pemimpin juga harus mampu mengamankan agama dan membimbing ummatnya agar mendapatkan kesejahteraan yang seimbang antara rohani dan kebutuhan yang bersifat materi. Serta suatu pemerintahan, haruslah menciptakan saran-saran agar terciptanya perbaikan dan pembangunan Negara sehingga Negara tersebut dapat menjadi kuat.

⁷ Dhiuddin Rais, *An-Nazharyatu As-Siyasatu Al-Islamiyah*, alih bahasa oleh Abdul Hayyie al- Kattani "*Teori Politik Islam*", Cet. ke-1 (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 178.

2. Karakteristik Kepemimpinan Nabi Muhammad SAW

Umat Islam memandang Nabi Muhammad SAW bukan hanya sebagai pembawa agama terakhir (Rasul) – yang sering disebut orang sebagai pemimpin spiritual, tetapi sebagai pemimpin umat, pemimpin agama, pemimpin negara, komandan perang, *qadi* (hakim), suami yang adil, ayah yang bijak sekaligus pemimpin bangsa Arab dan dunia (baca: Nabi Muhammad SAW sebagai Pemimpin).⁸ Peran yang sangat komplek ini telah diperankan dengan baik oleh Nabi Muhammad SAW., sehingga menjadi dasar bagi umatnya sampai akhir zaman. Hal ini menunjukkan bahwa peran Nabi Muhammad SAW. sebagai pemimpin umat sangat besar pengaruhnya. Perwujudan kepemimpinan beliau dengan memberi pendidikan dan pengajaran yang baik kepada umat dengan keteladanan yang baik (*uswatun hasanah*).

Pada dasarnya Islam memandang bahwa setiap manusia merupakan pemimpin. Sehingga setiap umat Islam sebagai pemimpin yang beriman harus berusaha secara maksimal untuk meneladani kepemimpinan Rasulullah SAW sebagai konkretisasi kepemimpinan Allah SWT., untuk itu Allah SWT. memfirmankan agar mentaati Rasulullah SAW, baik berdasarkan sabda dan perilakunya, maupun diamnya beliau dalam menghadapi dan menyelesaikan berbagai masalah kehidupan.

Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT surah An-Nisa (4) ayat 64:

⁸ M. Abdurrahman, *Dinamika Masyarakat Islam dalam Wawasan Fikih*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002), hlm. 33.

وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيمًا⁹

Firman Allah di atas dengan jelas memerintahkan agar setiap umat Islam mematuhi dan taat pada perintah Allah dan Rasulullah. Allah SWT juga menerangkan bahwa setiap Rasul yang diutus oleh-Nya ke dunia ini dari dahulu sampai kepada Nabi Muhammad SAW wajib ditaati dengan izin (perintah) Allah SWT karena tugas risalah mereka adalah sama yaitu untuk menuntun umat manusia ke jalan yang benar dan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.¹⁰

Dari surah An-Nisa' ayat 64 di atas menerangkan bahwa kita diperintahkan untuk taat kepada pemimpin yang harus disandarkan pada izin Allah SWT, ini berarti setiap ketaatan orang pada pemimpinnya, rakyat pada pemerintah dan anak pada orang tua semata-mata karena izin Allah SWT.

a. Sifat Nabi Muhammad SAW Yang Harus Dijadikan Tauladan Sebagai Pemimpin

Selanjutnya di bawah ini akan diketengahkan usaha mencari dan menggali sesuatu yang dapat dan harus diteladani dari kepemimpinan Nabi Muhammad SAW, yaitu:

1) Kepribadian yang Tangguh

Nabi Muhammad SAW adalah sosok yang sangat kuat baik pada masa kecilnya, dewasanya bahkan sampai wafatnya menunjukkan sikap yang sangat kuat teguh pendirian (*istiqamah*). Sejak

⁹ An-Nisa' (4): 64.

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya, Juz II*, (Semarang, Wicaksana, 1993), hlm. 211.

pertamanya beliau tidak terpengaruh oleh kondisi masyarakat di sekitar yang terkenal kebobrokan dan kejahiliahnya, menyembah berhala dan patung. Kepribadian itulah yang menjadi dasar atau landasan yang kokoh bagi seorang pemimpin, karena hal itu bermakna juga sebagai seseorang yang memiliki prinsip hidup yang kokoh dan kuat.¹¹

2) Kepribadian dan Akhlak Terpuji

Kepribadian yang terpuji ini memiliki beberapa sifat yang terhimpun dalam pribadi Nabi Muhammad SAW disebut sifat wajib Rasul meliputi *shiddiq* (jujur), *amanah* (dapat dipercaya), *tabligh* (menyampaikan) dan *fathonah* (Cerdas). Bertolak dari sini dapat dikatakan bahwa Rasul (termasuk Muhammad) pasti tidak memiliki sifat-sifat sebaliknya, yang disebut sifat-sifat mustahil – sifat dimaksud yakni *kiz'b* (dusta), *khiyanah* (penipu), *kitman* (merahasiakan atau menyembunyikan) dan *baladah* (bodoh). Namun Rasul sebagai manusia pasti memiliki sifat jaiz, yakni sifat-sifat kemanusiaan yang tidak menurunkan derajat atau martabat beliau sebagai utusan Alla SWT. Dalam sifat jaiz ini Rasul tidak dapat menghindar dari ujian dan cobaan Allah SWT. seperti rasa sedih, sabar, dan tabah.

Sifat wajib dan sifat jaiz yang dimiliki Rasul tanpa memiliki sifat mustahil, sangat menunjang pelaksanaan kepemimpinan yang

¹¹ Hadari Nawawi, *Kepemimpinan Menurut Islam*, (Yogyakarta: Gajahmada University press, 1993), hlm. 273.

beliau laksanakan. Kondisi itu mengakibatkan kepemimpinan Nabi Muhammad SAW berbeda prinsipil dari kepemimpinan manusia biasa.¹²

Dalam segala hal, akhlak Nabi Muhammad SAW adalah Al-Qur'an sebagaimana komentar yang diungkapkan oleh Nasih Ulwan yang dikutip oleh Slamet Untung mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah refleksi hidup keutamaan Al-Qur'an, ilustrasi dinamis tentang petunjuk-petunjuk Al-Qur'an yang abadi.¹³

Dalam rangka menciptakan standar al-akhlakul al-karimah yang tinggi, Nabi Muhammad SAW mengajar manusia dengan menggunakan keteladanan dalam keseluruhan metodenya, hal ini dapat dilihat dari seluruh perilaku beliau yang merefleksikan nilai-nilai pendidikan. Dengan mengambil keteladanan dari kehidupan Nabi Muhammad SAW berkaitan dengan pendidikan akhlak Nabi.¹⁴

Dari poin ini dapat dipahami bahwa inti dari kepemimpinan pendidikan Nabi Muhammad SAW adalah penanaman dan pengembangan sistem *aqidah* (keyakinan), *ubudiyah* (hiasan

¹² Ibid., hlm. 276.

¹³ Slamet Untung, *Muhammad Sang Pendidik*, (Semarang: CV. Pustaka Rizky Putra, 2005), hlm. 75.

¹⁴ Imam Ahmad, *Musnad Imam Ahmad Ibnu Hanbal, Juz II*, (Beirut: Darul Fikr, t.t.), hlm. 381.

hamba/ibadah) dan *muamalah* (jual beli) yang berorientasi pada akhlakul karimah.¹⁵

3) Kepribadian yang Sederhana

Beliau mengajarkan pada umatnya untuk hidup sederhana dan tidak berlebih-lebihan. Ini bukan berarti beliau mengerjakan kemiskinan pada manusia, tetapi beliau menyuruh umat Islam untuk selalu tampil sederhana dengan melakukan sedekah pada orang lain dan saling membantu. Sikap hidup sederhana Nabi Muhammad SAW. beliau tunjukkan dalam hidup sehari-harinya. Entah dalam keadaan damai ataupun perang di antara para pengikutnya atau di antara orang-orang kafir dan musuh-musuhnya, Nabi Muhammad SAW. Selalu menjadi teladan. Beliau memperlakukan orang dengan penuh kesopanan dalam semua kesempatan. Setelah memperoleh kemenangan beliau lebih sederhana, peramah dan pemurah hati, bahkan memberikan maaf dan pengampunan pada musuh-musuhnya.

Pada masa penaklukan kota Makkah beliau memaafkan hampir semua musuhnya yang telah menganiayanya dan para sahabatnya selama 13 tahun. Bahkan sebagai kepala negara, rutinitas hariannya sangat sederhana dan merefleksikan sikapnya yang rendah hati. Beliau memperbaiki dan menjahit pakaiannya yang sobek dan menambal sepatunya sendiri. Beliau biasa memerah susu kambing piaraannya dan membersihkan lantai rumahnya

¹⁵ Slamet Untung, *Muhammad...*, hlm. 76.

yang sederhana.¹⁶ Sikap ini benar-benar menunjukkan betapa sederhananya Nabi dalam hidupnya, meskipun beliau seorang pemimpin besar.

b. Kesuksesan Kepemimpinan Nabi SAW dalam Islam

Kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. berjalan di atas nilai-nilai Islam yang berhasil menanamkan keimanan, ketakwaan, kesetiaan dan semangat juang untuk membela kebenaran dan mempertahankan hak selain beroleh bantuan Allah SWT.

Pada titik ini memang layak dimunculkan pertanyaan di mana letak kunci kesuksesan kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Selain memang mendapat petunjuk, bantuan dan perlindungan Allah SWT. Ada beberapa kunci yang dapat diteladani oleh umatnya, yaitu:

- 1) Akhlak Nabi yang terpuji tanpa cela.
- 2) Karakter Nabi yang tahan uji, tangguh, ulet, sederhana, dan bersemangat baja.
- 3) Sistem dakwah yang menggunakan metode imbauan yang diwarnai dengan hikmah kebijaksanaan.
- 4) Tujuan perjuangan Nabi yang jelas menuju ke arah menegakkan keadilan dan kebenaran serta menghancurkan yang batil, tanpa pamrih kepada harta, kekuasaan dan kemuliaan duniawi.
- 5) Prinsip persamaan.
- 6) Prinsip kebersamaan.
- 7) Mendahulukan kepentingan dan keselamatan pengikut.

¹⁶ Abdul Wahid Khan, *Rasulullah di Mata Sarjana Barat*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2002), hlm. 75.

8) Memberikan kebebasan berkreasi dan berpendapat serta pendelegasian wewenang.

9) Tipe kepemimpinan karismatis dan demokratis.¹⁷

Keberhasilan Nabi Muhammad SAW. dalam memimpin umat dikarenakan tingkah laku beliau yang selalu berdasarkan Al-Quran dan ditunjang beberapa sifat yang melekat padanya. Adapun sifat utama yang melekat pada diri pribadinya yaitu:

- 1) Kehormatan kelahirannya.
- 2) Bentuk dan potongan tubuh yang sempurna.
- 3) Perkataan yang fasih dan lancar.
- 4) Kecerdasan akal yang sempurna.
- 5) Ketabahan dan keberanian.
- 6) Tidak terpengaruh oleh duniawi.
- 7) Hormat dan respek terhadap dirinya.¹⁸

Dalam kriteria pemimpin, Nabi Muhammad SAW menerangkan juga permasalahan terkait apakah pemimpin itu harus laki-laki atau kaum perempuan boleh menduduki jabatan pemimpin. Berikut salah satu hadits yang penulis gunakan dalam skripsi ini karena banyak hadits dipergunakan sebagai dasar ketika ada perdebatan terkait pemimpin wanita. Berikut hadits Nabi Muhammad SAW:

¹⁷ Nourouzzaman Shiddiqi, *Jeram-jeram Peradaban Muslim*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 102-105.

¹⁸ E.K. Imam Munawir, *Asas-asas Kepemimpinan dalam Islam*, (Surabaya: Usaha Nasional, t.t.), hlm. 195.

حدثنا عثمان بن الهيثم حدثنا عوف عن الحسن عن أبي بكره قال لقد نفعني الله بكلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام الجمل لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل فارس قد ملكوا عليهم بنت كسرى قال لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة¹⁹

Setelah membahas uraian materi tentang kepemimpinan wanita diatas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Hadits tersebut diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nasa'i, Turmudzi dan Ahmad, meskipun pada teksnya ada kalimat yang berbeda. Pada salah satu riwayat Imam Ahmad menggunakan lafaz لا يفلح قوم تملكهم امرأة. Dikarenakan hadits ini hanya terfokus pada riwayat Imam Bukhari maka status haditsnya adalah *Shahih* mengingat bahwa Bukhari memiliki kredibilitas dalam hal periwayatan hadits dan merupakan kitab yang paling *Shahih* setelah Al-Qur'an. Sesuai dengan pemahaman kontekstual maka hadis ini memberikan kebolehan kepada kaum wanita untuk memegang sebuah jabatan kepemimpinan asalkan ia memiliki kapabilitas dan kredibilitas. Hadits ini sifatnya temporal dan tidak dipahami secara tekstual apalagi melihat setting sosio-historisnya.²⁰

3. Siyasaḥ Syar'iyah Ibnu Taimiyah

a. Mengangkat yang Ashlah (paling layak dan sesuai)

Pengangkatan pejabat untuk mengurus perkara kaum Muslimin ini mutlak harus dilaksanakan. Oleh karena itu, perlu dilakukan seleksi

¹⁹ As-Sayyid Abul-Ma'aathiy An-Nuuriy, dkk. *Musnad Ahmad bin Hanbal*, Cet. Ke-1, (Daar 'Aalamil-Kutub, 1419 H), no. 19507, 19547, 19556, 19573, 19603, 19612; Al-Waqidi Muḥammad ibn 'Umar, *Kitabul Maghazi (Bab Kitabi Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam ila Kisra wa Qaishar)*, (Bayrut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2004), no. 4425.

²⁰ Baidhawiy, *Anwar al-Tanzil wa Asrar al-Ta'wil, Muassasah Sya'ban, Juz.II*, (Beirut), Hal. 85

seselektif mungkin orang-orang yang hendak dipilih untuk memangku jabatan tersebut. Seperti pejabat-pejabat teras daerah, setingkat gubernur, kepala pengadilan (hakim), kepala keamanan mulai dari panglima tertinggi sampai terendah, dan juga di bidang keuangan, seperti badan pengawas keuangan, menteri keuangan, pengumpulan dana, penarikan pajak dan zakat serta harta-harta lain yang dimiliki kaum Muslimin.²¹ Sebagaimana firman Allah SWT, surah An-Nisa (4) ayat 58 dan 59:

إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانت إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا {*} يأيها الذين ءامنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا²²

Dari surat di atas menunjukkan bahwa sudah menjadi suatu kewajiban dari waliyul amri untuk mengangkat orang yang paling berkopeten dan layak menempati jabatan tertentu bagi segala amal ibadat kaum Muslimin.

Demikian kebijakan yang harus diterapkan oleh waliyul amri (pemimpin pemerintah) dalam memilih dan mengangkat para pejabatnya, bahkan hal ini seharusnya diterapkan pula dalam mengangkat imam-imam salat, muadzin, staf pengajar (guru), amirul hajj serta terhadap karyawan pos dan giro. Begitu pula terhadap kesatuan dinas rahasia (badan intelejen), bendahara, pasukan pengamanan dan pengawal yang ada di kesatuan-

²¹ Ibnu Taimiyah, *Siyasah Syar'iyah ; Etika Politik Islam*, alih bahasa oleh Rofi' Munawwar, Lc (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), hlm. 4.

²² An-Nisa' (4): 58-59.

kesatuan militer tingkat pusat sampai daerah, juga para pemimpin kabilah dan penguasa pasar.

b. Memilih yang Terbaik Kemudian yang di Bawahnya

Jika masalah ini benar-benar telah dipahami, jelaslah bahwa tidak ada jalan lain kecuali memilih yang paling layak dan sesuai (tepat). Namun kendalanya, orang yang benar-benar mumpuni seperti itu jarang ditemui. Dengan kata lain, bila profil yang tanpa cela untuk menduduki jabatan tertentu itu memang tidak ada, maka harus diseleksi sekali lagi secara selektif dari sejumlah calon yang ada, dan kemudian dipilihlah yang mempunyai kualitas tinggi (baik). Apabila hal tersebut dilakukannya secara optimal, agar terpenuhi hak-hak *wilayat* (jabatan), dengan demikian dia telah melaksanakan amanat dan kewajiban di bidang ini. Pada posisi inilah dia tergolong para imam yang adil di sisi Allah SWT, sekalipun beberapa hal masih terdapat kekurangan yang tidak memungkinkan untuk menghilangkannya.²³ Dalam hal ini Allah SWT berfirman dalam surah At-Taghabun (64) ayat 16:

فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم²⁴ ومن يوق شح نفسه فأولئك هم
المفلحون²⁴

Sebagaimana juga dalam firman-Nya dalam surah Al-Baqarah (2) ayat 286 di bawah ini:

²³ Ali Syariati, *Ummah dan Imamah*, (Jakarta: Bandar Lampung 1952), hlm. 45.

²⁴ At-Taghabun (64): 16.

لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به²⁵ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولنا فانصرنا على القوم الكافرين²⁵

Hendaklah dipilih orang yang paling sesuai untuk menempati setiap jabatan yang ada. Sesungguhnya untuk menempati sebuah posisi (kedudukan) tertentu hendaknya memenuhi dua kriteria berikut ini, *quwwah* (otoritas) dan *amanah* (jujur dan dapat dipercaya).²⁶ Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah Al-Qashash (28) ayat 26:

قالت إحداهما يَا بُتِ اسْتَجِرْ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ²⁷

Kekuatan atau otoritas dalam setiap wewenang kekuasaan itu bergantung jenisnya. Otoritas dalam kepemimpinan perang adalah keberanian, kepiawaian mengatur siasat, menyusun dan menerapkan strategi atau taktik perang. Karena pada hakikatnya perang itu sendiri adalah tipu daya. Dalam kepemimpinan perang dibutuhkan juga kehandalan menguasai berbagai jenis peralatan perang, bagaimana memanah secara tepat, memainkan pedang, kemahiran berkuda, antisipasi terhadap kemungkinan-kemungkinan yang tidak diinginkan dan juga menguasai ilmu bela diri.²⁸ Hal ini sebagaimana firman Allah swt, dalam Surah Al-Anfal ayat 60:

²⁵ Al-Baqarah (2): 286.

²⁶ Ibnu Taimiyah, *Kebijaksanaan Politik Nabi SAW*, alih bahasa oleh Muhammad Munawwir Az Zahidi, (Surabaya: Dunia Ilmu, 1997), hlm. 9.

²⁷ Al-Qashash (28): 26.

²⁸ Ibnu Taimiyah, *Ta'liq Siyasaah Syar'iyah Ibnu Taimiyah*, alih bahasa oleh Ajmal Arif, Lc (Jakarta: Griya Ilmu, 2009), hlm. 47.

وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون بةٓ عدو الله وعدوكم وءآخريين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوف إليكم وأنتم لا تظلمون²⁹

Sementara itu, kekuatan atau otoritas dalam pemerintahan dan berhukum terhadap sesama manusia adalah, sikap adil sebagaimana dicontohkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah, disamping juga pengaktualisasiannya di tengah-tengah masyarakat.

Demikian itulah *quwwah* atau otoritas. Sementara amanat, erat kaitannya dengan rasa takut (*khauf*) kepada Allah SWT. Dan tidak menjual-belikan ayat-ayat-Nya dengan harga yang murah, serta menghindari rasa takut terhadap sesama manusia. Ketiga hal inilah yang dijadikan Allah SWT sebagai asas dalam setiap pemerintahan untuk mengatur manusia.³⁰

Sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Maidah (5) ayat 44:

إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربنيون والأحبار بما استحفظوا من كتب الله وكانوا عليه شهداءً فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآيتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكفرون³¹

Dan dalam Al-Qur'an sendiri mewajibkan kaum muslim untuk memilih pemimpin yang beragama Islam. Hal tersebut tercantum dalam surah Al-Maidah (5) ayat 51:

²⁹ Al-Anfal (8): 60.

³⁰ Ahmad Ibn-Taymiyyah, *Majmu' Al Fatawa*, (Beirut: Dar al Kutub al 'Ilmiyyah, t.t.), hlm. 175.

³¹ Al-Maidah (5): 44.

يأبها الذين ءامنوا لا تتخذوا اليهود والنصرى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين³²

c. Sedikit Manusia yang Mempunyai Sifat Quwwah (Otoritas) dan Amanah

Dalam pandangan Ibnu Taimiyah, tegaknya keadilan tidak mungkin dapat dicapai tanpa adanya kerjasama. Manusia berkumpul dan membentuk sebuah komunitas politik, kemudian menunjuk salah seorang sebagai pemimpin untuk mengorganisir guna mewujudkan keadilan serta kesejahteraan bersama. Seorang pemimpin tidak menetapkan tujuan mereka sendiri, melainkan melibatkan peran serta pemberi amanah.

Pemimpin yang diberi amanat, di dalamnya melekat otoritas untuk bertindak dan dipatuhi, karena mereka tengah (atau semestinya) berusaha mewujudkan tujuan-tujuan ummat. Konsep pemimpin dalam Islam adalah pemangku atau wali, atau keterwakilan atau agen otoritas, dan sama sekali bukan pemilik dari jabatan pemimpin itu. Inilah maksud bahwa pemimpin adalah penggembala, yang tidak memiliki hewan gembalaannya; kedudukannya seperti wali bagi anak yatim. Otoritas pemimpin, sesungguhnya berasal dari Tuhan; namun hal ini berarti bahwa kepentingan-kepentingan yang wajib ia upayakan sesungguhnya merupakan kepentingan-kepentingan rakyatnya.³³

Ibnu Taimiyah berkesimpulan bahwa kekuasaan kepala pemerintahan (dalam semua level) atau raja hanya merupakan mandat dari Tuhan yang

³² Al-Maidah (5): 51.

³³ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: Penerbit UI Press 1993), hlm. 86.

diberikan kepada hamba-hamba pilihanNya. Dalam konteks penyelewengan atas amanat rakyat, Ibnu Taimiyah berpandangan bahwa penguasa-penguasa yang korup adalah yang paling tidak bermoral dan karena itu tidak ada kewajiban untuk patuh pada mereka, dan ia juga menyalahkan para ulama dan cendikiawan yang mendukung penguasa-penguasa yang tidak mengindahkan agama dan melakukan penyelewengan dan membuat syari'at tidak mampu menjawab tuntutan kemanusiaan. Mereka telah dianggap mengingkari prinsip-prinsip syari'ah.³⁴

Menurut Ibnu Taimiyah, sebagai faktor instrumental dalam mewujudkan kesejahteraan bersama, adanya seorang kepala negara merupakan sesuatu yang niscaya dan tidak terelakkan. Di sini prinsip gagasannya adalah bahwa kaum muslimin dalam hidup sosial perlu ada pemimpin dan diorientasikan pada stabilitas. Pandangan Ibnu Taimiyah yang terkenal adalah, “bahwa 60 tahun diperintah oleh pemimpin yang dzalim, masih lebih baik jika dibandingkan hidup satu hari tanpa pemerintahan (baca pemimpin)”.³⁵

Dalam kenyataannya, persyaratan *al-qawiy* dan *al-amin* tidak terlalu mudah, dan karenanya tidak banyak orang yang memiliki kedua sifat ini sekaligus. Ada orang yang memiliki *quwwah*, tetapi tidak amanah. Sebaliknya, ada yang amanah, tetapi lemah. Pertanyaannya, mana yang didahulukan? Jawaban Imam Ahmad atas pertanyaan dua figur komandan

³⁴ Ibnu Taimiyah, *Siyasah Syar'iyah...*, hlm. 11.

³⁵ Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam, Telaah Kritis Ibnu Taimiyah tentang Pemerintahan Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti 1995), hlm. 7.

perang, di mana yang satu kuat namun pendosa, yang lain saleh tetapi lemah.

Komandan yang kuat namun pendosa, kata Imam Ahmad, maka kekuatannya itu untuk (menguntungkan) kaum muslimin. Sedang kesukaannya untuk berbuat dosa hanyalah berdampak bagi dirinya sendiri. Sementara komandan yang saleh namun lemah, maka kesalahannya itu hanya berindikasi bagi dirinya sendiri, sedang kelemahannya akan berdampak luas bagi kaum muslimin. Karenanya, hendaklah berperang bersama komandan yang kuat meskipun dia pendosa.³⁶

B. Pilkada Serentak 2015 di Dusun Pugeran

Penelitian tentang Pilkada Serentak Dusun Pugeran Kelurahan Maguwoharjo Kecamatan Depok Kabupaten Sleman pada Pilkada Serentak 2015 kemarin, berdasarkan jawaban wawancara responden yang peneliti lakukan, maka akan dapat diketahui gambaran umum pilkada serentak 2015 masyarakat dusun pugeran.

1. Identitas Responden

Data identitas responden didapatkan setelah peneliti berkunjung ke Kepala Dusun Pugeran Kelurahan Maguwoharjo Kecamatan Depok Kabupaten Sleman dan mendapatkan daftar nama-nama yang dapat diwawancarai secara langsung.

Berdasarkan daftar nama-nama yang sudah peneliti dapatkan, peneliti mulai membagi sebagaimana 3 golongan lapisan masyarakat dan peneliti

³⁶ A Qadir Gassing, "Menanti Pemimpin yang Kuat dan Amanah", <http://www.uin-alauddin.ac.id/index.php?module=detailartikel&id=55> akses 12 Oktober 2016.

benar-benar memilih orang-orang yang benar-benar paham dan ikut andil dalam proses Pilkada Serentak 2015 kemarin.

Berikut sekilas profil responden tiga golongan lapisan yang peneliti dapatkan:

- a. Perangkat dusun atau Elit dusun
 - 1) Bapak Supriyono selaku Kepala Dusun Pugeran.
 - 2) Bapak Panggung selaku Ketua RW 65
 - 3) Bapak Affandi selaku Ketua RW 64
- b. Tokoh masyarakat
 - 1) Bapak Abdul Roup selaku Ketua Ta'mir Masjid Dusun Pugeran.
 - 2) Bapak Mustakim selaku Anggota Ta'mir Masjid Dusun Pugeran
- c. Masyarakat
 - 1) Bapak Harianto selaku Panitia TPS 16 di Dusun Pugean.
 - 2) Ibu Siti Djuwariah selaku Ketua PKK Dusun Pugeran
 - 3) Dan beberapa masyarakat.

Setelah melakukan wawancara kepada responden di Dusun Pugeran, semua Bapak baik dari golongan lapisan masyarakat manapun mengatakan bahwa masyarakat sangat antusias dalam Pemilihan Pilkada kemaren, mereka berbondong-bondong menuju TPS untuk menggunakan hak suaranya.

Presentase dari Pemilihan Pilkada 2015 mengalami peningkatan karena dilihat berkurangnya presentase msyarakat yang Golput. Sebagaimana dijelaskan di tabel dibawah ini:

Tabel 3.3

Meningkatnya Partisipasi Politik Kabupaten Sleman

Jumlah Partisipasi Politik Pilkada Serentak 2015 Sleman				
Data pemilih	Periode 2010		Periode 2015	
Daftar pemilih tetap	759.062	100%	772.518	100%
Suara sah	536.492	71%	516.408	67%
Golput	222.570	29%	256.110	33%

Sumber : Data KPU Sleman

Tabel 3.4

Meningkatnya Partisipasi Politik Dusun Pugeran

Jumlah Partisipasi Politik Pilkada Serentak 2015 Sleman Dusun Pugeran				
Data pemilih	Periode 2010		Periode 2015	
Daftar pemilih tetap	297	100%	306	100%
Suara sah	205	69%	230	75%
Golput	92	31%	76	25%

Sumber : Data KPU Sleman

Akan tetapi setelah pemilihan Pilkada 2015 usai, banyak masyarakat mengelukan pada anggota Pilkada yang terpilih karena masyarakat sekarang agak kecewa mereka sekarang tidak mewujudkan janji-janji pada saat kampanye dulu dan tidak mau terjun langsung ke lapangan menemui mereka seperti dulu saat kampanye.

Dalam proses pemilihan Pilkada 2015 berjalan dengan aman tanpa ada kerusuhan apapun dan tidak terjadi kecurangan sekecil apapun dalam proses Pilkada Serentak 2015.

2. Deskripsi Pilkada 2015 Dusun Pugeran

Pelaksanaan Pemilihan kepala daerah serentak di kabupaten Sleman termasuk pada pemilihan daerah gelombang pertama yang dilakukan pada tanggal 9 Desember 2015. Jumlah TPS pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 9 Desember 2015 di Kelurahan Maguwoharjo adalah 87 TPS.

Penetapan bakal calon Kepala Daerah kabupaten Sleman dalam Pilkada 2015, dilaksanakan Senin 24 Agustus 2015, terdapat dua pasangan yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah Kabupaten Sleman antara lain; *pertama* Dr Hj Yuni Satia Rahayu dan Danang Wicaksana Sulistya. *Kedua* H Sri Purnomo, MSi dan Sri Muslimatun, Mkes.

Setelah penetapan dua pasang calon kepala daerah Kabupaten Sleman, KPU Kabupaten Sleman menggelar pengundian nomor urut paslon di Gedung Serbaguna Monumen Jogja Kembali (Monjali), Selasa 25 Agustus 2015. Dan di peroleh hasil pengundian nomor urut pasangan calon kepala daerah Kabupaten Sleman, nomor urut 1 Dr Hj Yuni Satia Rahayu dan Danang Wicaksana Sulistya, nomor urut 2 H Sri Purnomo, MSi dan Sri Muslimatun, Mkes.

Masa kampanye pada pemilihan kepala daerah di Kabupaten Sleman Sesuai kesepakatan, kampanye dibuat selang seling. Pasangan Sri Purnomo dan Sri Muslimatun mendapatkan giliran di hari pertama. Sedangkan pasangan Yuni Satia Rahayu dan Danang Wicaksana Sulistya di hari kedua. Begitu seterusnya hingga masa kampanye berakhir 5 Desember 2016. Sedangkan

untuk rapat umum terbuka, waktunya diserahkan kepada tim sukses masing-masing pasangan calon (paslon). Mereka sudah sepakat antara kedua timses paslon. Sesuai aturan, kampanye berlangsung pukul 09.00-18.00 WIB. Pasangan lain yang tidak bertepatan dengan jadwal, tetap boleh melakukan kampanye. Namun dilarang mengerahkan massa. Pilkada di Kabupaten Sleman diikuti dua pasangan, yakni pasangan nomor urut 1 Yuni Satia Rahayu dan Danang Wicaksana Sulistya yang diusung PDIP dan Gerindra dan didukung PKS, serta pasangan nomor urut 2 Sri Purnomo dan Sri Muslimatun yang diusung PAN, PPP, PKB, Golkar, Nasdem, PBB dan Hanura.

Masa tenang dan pembersihan alat peraga Pemilihan Kepala Daerah serentak dijadwalkan pada 6 sampai 8 Desember 2015. Dimana pada masa tenang tersebut alat peraga dan seluruh alat kampanye lainnya akan diseterilkan.

Hasil rekapitulasi perolehan suara TPS 16 di Dusun Pugeran, Yuni Satia Rahayu yang berpasangan dengan Danang Wicaksana Sulistya menang jauh dari pasangan calon Sri Purnomo dan Sri Muslimatun. Yuni Satia Rahayu dan Danang Wicaksana Sulistya pasangan nomor urut 1 itu mendapatkan 187 suara. Sementara pasangan nomor urut 2 Sri Purnomo dan Sri Muslimatun mendapatkan 39 suara. Jumlah suara tidak sah 4 suara dari 230 suara.³⁷ Data ini direkapitulasi berdasarkan laporan dari TPS 16 yang ada di dusun pugeran

³⁷ Wawancara dengan Ketua Ta'mir Masjid Dusun Pugeran, Bapak Abd Ro'uf, di Masjid Dusun Pugeran, pada tanggal 13 April 2016.

kelurahan maguwoharjo. Sementara jumlah DPT Pilkada dusun pugeran 2015 ditetapkan sebesar 306 jiwa.³⁸

Tabel 3.5

Presentase Pilkada Serentak 2015 Dusun Pugeran	
Yuni Satia Rahayu dan Danang Wicaksana Sulistya	83%
Sri Purnomo dan Sri Muslimatun	17%

C. Kriteria Pemimpin Masyarakat Dusun Pugeran

Dalam wawancara kepala Dusun Pugeran peneliti menemukan fakta bahwa kriteria yang diinginkan untuk memimpin adalah pemimpin yang memiliki kriteria merakyat. Dalam konteks perilaku, merakyat berarti bersifat atau berperilaku seperti rakyat. Orang-orang yang merakyat, biasanya peduli terhadap sesama. Pemimpin merakyat adalah pemimpin peduli terhadap rakyat dalam bentuk rasa, sikap dan perbuatan yang menyangkut kepentingan dan kebaikan rakyat banyak.

Oleh karena itu setidaknya terdapat beberapa karakter seorang pemimpin disebut merakyat. *Pertama*, Kompetensi Pemimpin yang mempunyai kemampuan menangkap peluang masa depan serta menterjemahkannya dalam bentuk aksi *real*. Pemimpin ini mampu menganalisis masalah dan melihat betul aspirasi rakyat bawah yang kemudian ia berikan solusi dalam kebijakan-kebijakan yang berpihak pada masyarakat. *Kedua*, Kejujuran saat ini barang yang sanga mahal. Namun ini

³⁸ Data KPU Sleman.

sarat mutlak bagi pemimpin yang merakyat. Perilaku Jujur dalam pengelolaan keuangan negara ternyata terkait dengan kompetensi pemimpin menangkap aspirasi. Kepala daerah yang jujur akan membuat kebijakan-kebijakan yang manfaatnya betul dirasakan masyarakat. Dan *ketiga*, Gaya hidup sederhana. Meskipun gaya hidup dipengaruhi oleh tingkat pendapatan, jabatan dan pendidikan namun tidak membuat pemimpin lupa diri bahwa semua itu adalah simbol tambahan yang menjadi titipan Tuhan. Pemimpin tetap mampu mengontrol kelebihannya dan berperilaku wajar karena didorong kedalaman spiritualnya. Hal tersebut juga dibenarkan oleh bapak Supriyono selaku kepala Dukuh Dusun Pugeran.

Dalam penelitiannya peneliti juga menemukan fakta bahwa masyarakat Dusun Pugeran masih mengutamakan pemimpin yang beragama Islam. Masyarakat Dusun Pugeran lebih memilih pemimpin beragama Islam karena sesuai dengan ajaran Islam bahwa memilih pemimpin itu yang seiman atau yang beragama Islam. Kriteria pemimpin yang beragama Islam sudah tertanam dalam pemikiran masyarakat Dusun Pugeran sejak lama karena sejarah masyarakat pugeran yang mayoritas menganut agama Islam. Hal tersebut juga di paparkan oleh ketua ta'mir masjid Dusun Pugeran pada saat peneliti mewawancarai ketua ta'mir tersebut.

Kaitannya pemimpin yang beragama Islam tidak hanya beragama Islam tetapi pemimpin itu harus memiliki sifat-sifat atau berkarakter seperti yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Itulah pemimpin yang didambakan rakyat saat ini. Jika Rasulullah SAW adalah seorang pemimpin berakhlak mulia,

seorang utusan Allah yang tiada duanya di dunia ini, maka paling tidak pemimpin/presiden kita adalah seorang yang meneladani dan mencontoh sifat-sifat, akhlak, dan kepemimpinan Rasulullah SAW. Karena menjadi seorang pemimpin itu adalah suatu amanah dari Allah SWT, dan tentu saja akan dipertanggungjawabkan di hari akhir nanti.

Ada beberapa hal yang harus dimiliki oleh pemimpin, diantaranya pemimpin itu harus *siddiq*, artinya pemimpin harus berani menyuarakan kejujuran dan kebenaran. Jika pemimpin sudah mampu untuk bertindak jujur serta jauh dari kesalahan, maka pemimpin akan lebih memperhatikan kepentingan masyarakat ketimbang mementingkan kelompoknya. Pemimpin itu harus *fathonah*, artinya pemimpin harus memiliki intelektualitas tinggi, sehingga dalam memutuskan kebijakan untuk rakyat akan dipertimbangkan sematang mungkin untuk kebaikan masyarakat. Pemimpin itu harus *amanah*, artinya pemimpin yang dipilih oleh rakyat harus mampu membawa rasa percaya yang telah diberikan oleh rakyat, sehingga tidak muncul rasa kecewa. Pemimpin itu harus *tabligh*, artinya dalam menjalankan sistem pemerintahan, pemimpin harus berani transparan dalam manajemennya. Jika keempat poin tersebut dapat dipetik dan dijalankan oleh pemimpin kita maka kekecewaan rakyat bisa dihindari.

Tidak hanya berkaitan dengan agama memilih seorang pemimpin juga harus melihat pemimpin yang dapat menyerap aspirasi masyarakat. Setiap masyarakat pasti memiliki keinginan atau tujuan untuk dicapai. Jika tujuan dan keinginan itu ingin dicapai harus memiliki pemimpin yang sanggup mewujudkan keinginan atau tujuan masyarakat. Seorang pemimpin harus lebih banyak

mendengarkan keinginan yang dipimpin. Komunikasi dengan rakyat sangat penting dilakukan seorang pemimpin agar bisa memahami keinginan mereka. Aspirasi tersebut bisa dijadikan referensi dalam sebuah pengambilan keputusan. Apabila aspirasi masyarakat tidak dapat dijalankan oleh seorang pemimpin maka pemimpin tersebut di anggap gagal dalam kepemimpinannya. Kegagalan pemimpin dalam menjalankan tugasnya dapat berpengaruh terhadap kemajuan daerah yang dipimpinnya.

Pemimpin harus mendengarkan aspirasi rakyatnya. Dapat dipahami bahwa rakyatlah sendiri yang mengalami langsung permasalahan yang terjadi di daerahnya, maka secara logika untuk tahu secara mendalam maka diperlukan pemimpin yang dapat mendengar aspirasi rakyat. Banyaknya demo, unjuk rasa, dan bentuk aspirasi lainnya, yang terkadang bersifat merusak. Akan lebih indah dilihat jika pemimpin dapat berdiskusi langsung dengan masyarakat. Banyak masyarakat yang selama ini tidak tahu dimana mereka bisa menyampaikan aspirasinya. Wadah aspirasi selama ini yang terlihat seakan-akan hanya unjuk rasa yang dapat merusak infrastruktur negara, menyakiti warga sipil, dan membuat kemacetan di jalan. Hal-hal ini bisa dihindarkan jika masyarakat mau berbicara secara baik dan pemimpin mendengar secara seksama.

Salah satu persyaratan untuk menjadi seorang pemimpin harus bisa mendengar apa yang menjadi keinginan rakyat. Mendengar keinginan rakyat merupakan cara yang paling tepat dalam membangun komunikasi dengan rakyat dalam merealisasikan apa yang menjadi kehendak rakyat. Mendengar apa yang menjadi keinginan rakyat, merupakan kunci utama seorang pemimpin dalam

mewujudkan program-program. Melalui aspirasi rakyat, maka dapat di ketahui apa yang menjadi keinginan rakyat. Pemimpin yang baik, harus bisa mendengar apa yang menjadi keinginan rakyat. Pemimpin yang baik harus bisa mendengar aspirasi yang bersifat kritik ataupun masukan rakyat agar program demi program bisa berjalan dengan baik, dan tujuan yang di harapkan bisa tercapai untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat.

Dalam menerapkan kepemimpinan di suatu pemerintahan, baik itu tingkat pemerintahan desa sampai dengan yang tertinggi, keberhasilan merupakan tujuan akhir yang ingin dicapai. Salah satu faktor yang menentukan hal ini adalah bagaimana seorang pemimpin bisa memimpin di pemerintahan yang dipimpinnya. Karena dalam kepemimpinannya akan selalu dihadapkan pada permasalahan bagaimana ia dapat memimpin dengan tepat guna dan berhasil guna. Pengendalian yang baik akan sangat mempengaruhi berhasil tidaknya suatu kepemimpinan, oleh karena itu untuk mendukung kelancaran tugas yang akan diberikan kepada suatu pemerintahan, maka seorang pemimpin harus mampu membuat perencanaan, persiapan dan pelaksanaan serta pengawasan dan pengendalian yang baik dalam penyelesaian tugas tersebut.

Melihat kondisi kepemimpinan saat ini diharapkan di masa yang akan datang muncul pemimpin yang memiliki latar belakang pendidikan dan wawasan yang tinggi, yang mengerti akan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya. Sehingga mampu menjawab tantangan tugas di masa yang akan datang seperti yang diharapkan oleh masyarakat pada umumnya. sehingga pada masa mendatang ada cara lain yang lebih profesional dan proporsional dalam memilih pemimpin.

BAB IV

ANALISIS KRITERIA PEMIMPIN MASYARAKAT DUSUN PUGERAN DALAM PILKADA 2015 BERDASARKAN TEORI SIYASAH SYAR'IIYAH

A. Analisis Kriteria Pemimpin Masyarakat Dusun Pugeran Terhadap Penemuan di Lapangan

Dalam penelitiannya peneliti juga menemukan fakta bahwa masyarakat Dusun Pugeran masih mengutamakan pemimpin yang beragama Islam. masyarakat Dusun Pugeran lebih memilih pemimpin beragama Islam karena sesuai dengan ajaran Islam bahwa memilih pemimpin itu harus yang seiman atau yang beragama Islam. Kriteria pemimpin yang beragama Islam sudah tertanam dalam pemikiran masyarakat Dusun Pugeran sejak lama karena sejarah masyarakat Dusun Pugeran yang mayoritas menganut agama Islam.¹

Hal tersebut sesuai dalam Al-Qur'an yang menyatakan bahwa kaum muslim diwajibkan untuk memilih pemimpin yang beragama Islam. Hal tersebut tercantum dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

يَأْيُهَا الذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصْرَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ²

وَالذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ³

لَا يَتَّخِذُ لِمُؤْمِنِينَ الْكُفْرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاتَةَ وَيَحْذَرِكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ⁴

¹ Wawancara dengan Ketua Ta'mir Masjid..., pada tanggal 13 April 2016.

² Al-Maidah (5): 51.

³ Al-Anfal (8): 73.

Seorang pemimpin diharuskan beragama Islam karena jika seorang pemimpin berasal dari golongan kafir (non muslim) ditakutkan akan merusak keimanan kaum-kaum muslim yang dipimpinnya karena tidak menutup kemungkinan keputusan-keputusan yang dikeluarkan pemimpin kafir (non muslim) akan berseberangan dengan ajaran-ajaran yang diterapkan Islam selama ini.

Kaitannya pemimpin yang beragama Islam tidak hanya beragama Islam tetapi pemimpin itu harusnya berkarakter seperti yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Itulah pemimpin yang didambakan rakyat saat ini. Jika Rasulullah SAW adalah seorang pemimpin berakhlak mulia, seorang utusan Allah SWT yang tiada duanya di dunia ini, maka paling tidak pemimpin/presiden kita adalah seorang yang meneladani dan mencontoh sifat-sifat, akhlak, dan kepemimpinan Rasulullah SAW. Karena menjadi seorang pemimpin itu adalah suatu amanah dari Allah SWT, dan tentu saja akan dipertanggungjawabkan di hari akhir nanti.

Dari poin ini dapat dipahami bahwa inti dari kepemimpinan pendidikan Nabi Muhammad SAW adalah penanaman dan pengembangan sistem akidah (keyakinan), *ubudiyah* (hiasan hamba/ibadah) dan *muamalah* (jual beli) yang berorientasi pada akhlakul karimah.⁵

Dalam konteks perilaku, merakyat berarti bersifat atau berperilaku seperti rakyat. Orang-orang yang merakyat, biasanya peduli terhadap sesama. Pemimpin

⁴ Al-Imron (3): 28.

⁵ Slamet Untung, *Muhammad...*, hlm. 76.

merakyat adalah pemimpin peduli terhadap rakyat dalam bentuk rasa, sikap dan perbuatan yang menyangkut kepentingan dan kebaikan rakyat banyak.

Kriteria tersebut juga sesuai dengan yang di terapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau mengajarkan pada umatnya untuk hidup sederhana dan tidak berlebih-lebihan.

Analisis tersebut juga didukung dengan teori yang di sampaikan oleh Al-mawardi. Teori yang di sampaikan oleh Al-mawardi terdapat juga yang menyangkut kriteria pemimpin yang dipilih harus memiliki kriteria merakyat. Lebih spesifik Al-mawardi menyebutkan bahwasannya pemimpin itu harus terjun langsung menangani persoalan yang terjadi di masyarakat (*blusukan*).⁶ Dengan terjun langsung pemimpin akan merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat dan mengerti persoalan yang dialami masyarakat. Karena jika seorang tidak mengetahui keadaan rakyatnya maka pemimpin tersebut tidak dapat mengambil keputusan yang sesuai diharapkan masyarakat.

Tidak hanya berkaitan dengan agama memilih seorang pemimpin juga harus melihat pemimpin yang dapat menyerap aspirasi masyarakat. Setiap masyarakat pasti memiliki keinginan atau tujuan untuk dicapai. Jika tujuan dan keinginan itu ingin dicapai harus memiliki pemimpin yang sanggup mewujudkan keinginan atau tujuan masyarakat. Seorang pemimpin harus lebih banyak mendengarkan keinginan yang dipimpin. Komunikasi dengan rakyat sangat penting dilakukan seorang pemimpin agar bisa memahami keinginan mereka. Aspirasi tersebut bisa dijadikan referensi dalam sebuah pengambilan keputusan.

⁶ Dhiauddin Rais, *An-Nazhariyatu...*, hlm. 178.

Apabila aspirasi masyarakat tidak dapat dijalankan oleh seorang pemimpin maka pemimpin tersebut di anggap gagal dalam kepemimpinannya. Kegagalan pemimpin dalam menjalankan tugasnya dapat berpengaruh terhadap kemajuan daerah yang dipimpinya.

Dalam pandangan Ibnu Taimiyah, tegaknya keadilan tidak mungkin dapat dicapai tanpa adanya kerjasama. Manusia berkumpul dan membentuk sebuah komunitas politik, kemudian menunjuk salah seorang sebagai pemimpin untuk mengorganisir guna mewujudkan keadilan serta kesejahteraan bersama. Seorang pemimpin tidak menetapkan tujuan mereka sendiri, melainkan melibatkan peran serta pemberi amanat.

Melihat kondisi kepemimpinan saat ini diharapkan di masa yang akan datang muncul pemimpin yang memiliki latar belakang pendidikan dan wawasan yang tinggi, yang mengerti akan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya. Sehingga mampu menjawab tantangan tugas di masa yang akan datang seperti yang diharapkan oleh masyarakat pada umumnya. sehingga pada masa mendatang ada cara lain yang lebih profesional dan proporsional dalam memilih pemimpin.⁷

Sama kaitannya dengan kriteria pemimpin harus memiliki sifat amanah, nabi pun juga menganjurkan pemimpin yang memiliki kriteria cerdas (fathanah). Kriteria tersebut sangat dibutuhkan oleh seorang pemimpin dalam memerintah karena tanpa kecerdasan, seorang pemimpin dalam memerintah tidak menggunakan dasar. Kecerdasan yang dimiliki seorang pemimpin tidak hanya mencakup satu aspek, tetapi semua aspek dalam kehidupan. Contohnya saja seorang pemimpin

⁷ Wawancara dengan Ketua PKK Dusun Pugeran, Ibu Siti Djuwariah, di Rumah Ibu Siti Djuwariah Dusun Pugeran, pada tanggal 08 Mei 2015.

ingin membuat peraturan tentang ekonomi maka pemimpin tersebut harus memiliki ilmu tentang perekonomian.

B. Fakta Hasil Pilkada Serentak 2015 Dusun Pugeran di Lapangan

Dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan di Dusun Pugeran dapat dianalisa sebagai berikut:

1. Calon nomor urut 1 Yuni Satya Rahayu mendapatkan jumlah suara terbanyak (187) atau 83% di Dusun tersebut.
2. Calon nomor urut 2 Sri Purnomo kalah telak dari nomor urut 1 yaitu dengan jumlah suara (39) atau 17%.

Dari data tersebut menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Dusun Pugeran Kelurahan Magowoharjo Kecamatan Depok Kabupaten Sleman lebih mendukung nomor urut 1 yaitu Yuni Satya Rahayu sebagai Bupati Sleman. Karena lebih dari 50% suara dari masyarakat Pugeran Maguwoharjo memilih nomor urut 1 yaitu Yuni Satya Rahayu.

Dari fakta yang didapat bahwa mayoritas masyarakat Dusun Pugeran Maguwoharjo memilih Yuni Satya Rahayu timbul pertanyaan apakah Yuni Satya Rahayu merupakan sosok yang mewakili kriteria-kriteria masyarakat Dusun Pugeran Maguwoharjo yang peneliti dapat? Karena jawaban dari pertanyaan tersebut akan menunjukkan apakah kriteria-kriteria yang disampaikan narasumber ketika wawancara benar adanya atau hanya kebohongan untuk menutupi kecurangan yang sering terjadi pada Pemilu contohnya *money politic*. *Money politic* sering kali menghasut masyarakat untuk melupakan kriteria-kriteria yang

mereka idamkan terlebih pada daerah yang mayoritas kalangan menengah kebawah.

Dalam penelitian pada Dusun Pugeran Maguwoharjo, peneliti juga memperoleh informasi dari beberapa narasumber tentang bakal calon Bupati Sleman nomer urut 1 Yuni Satya Rahayu. Peneliti juga dalam wawancara terhadap beberapa narasumber mencari informasi kenapa mayoritas masyarakat Dusun Pugeran Maguwoharjo ketika Pilkada memilih nomer urut 1 Yuni Satya Rahayu. Karena dalam menentukan pilihan ketika Pemilu tentu seseorang memiliki dasar memilih salah satu bakal calon Bupati.

Yuni Satya Rahayu dianggap cukup aktif pada saat acara-acara yang diselenggarakan Dusun Pugeran Maguwoharjo. Tidak hanya acara yang bersifat umum, tetapi juga pada saat acara-acara yang bersifat *agamis*. Contoh acara umum yang diselenggarakan Dusun Pugeran Maguwoharjo adalah bakti sosial dan bazar dan contoh acara *agamis* seperti pengajian akbar di Masjid Dusun Pugeran Maguwoharjo. Meskipun jika tidak bisa hadir dalam acara, Yuni Satya Rahayu biasa memberikan bantuan berupa dana untuk acara tersebut.⁸

Kriteria-kriteria pemimpin masyarakat Dusun Pugeran Maguwoharjo yang peneliti dapat diantaranya pemimpin yang memeluk agama Islam, pemimpin yang memiliki sifat-sifat Nabi Muhammad SAW, pemimpin yang merakyat, pemimpin yang menyerap dan menjalankan aspirasi rakyat, dan pemimpin yang berpendidikan dan memiliki kapabilitas untuk menjalankan jabatan seorang pemimpin dianggap mereka ada pada bakal calon Bupati nomer urut 1 Yuni Satya

⁸ Wawancara dengan Kepala Dukuh Dusun Pugeran, Bapak Supriyono, di Rumah Bapak Kepala Dukuh Dusun Pugeran, pada tanggal 09 April 2016.

Rahayu. Meski tidak sepenuhnya kriteria-kriteria tersebut ada pada Yuni Satya Rahayu, tetapi masyarakat Dusun Pugeran Maguwoharjo menganggap bakal calon Bupati nomer urut 1 Yuni Satya Rahayu adalah calon yang paling pantas menduduki jabatan Bupati.⁹

Tidak hanya dari kriteria-kriteria yang mendasari masyarakat Dusun Pugeran Maguwoharjo memilih Yuni Satya Rahayu dalam Pilkada, tetapi juga Yuni Satya Rahayu dianggap mampu mengemban jabatan Bupati karena pengalaman Yuni Satya Rahayu yang pernah selama 5 Tahun menduduki jabatan sebagai Wakil Bupati. Hal tersebut sudah cukup bagi masyarakat Dusun Pugeran Maguwoharjo untuk meyakinkan mereka bahwa Yuni Satya Rahayu sanggup mengemban jabatan Bupati dengan baik.

Ketika Yuni Satya Rahayu mencalonkan diri bakal calon Wakil Bupati saat Pilkada 2010 memberikan janji-janji pada kampanyenya. Salah satu janji jika Yuni Satya Rahayu terpilih menjadi Wakil Bupati akan memperbaiki infrastruktur Dusun Pugeran Maguwoharjo terutama jalan-jalan di Dusun Pugeran Maguwoharjo yang pada saat itu mayoritas rusak. Terbukti setelah Yuni Satya Rahayu terpilih menjadi Wakil Bupati Sleman pada tahun 2010, janji untuk memperbaiki infrastruktur jalan di Dusun Pugeran Maguwoharjo dipenuhi. Hal tersebut meyakinkan masyarakat Dusun Pugeran Maguwoharjo bahwa Yuni Satya Rahayu akan memajukan Dusun Pugeran Maguwoharjo terlebih Sleman.

Terkait permasalahan bakal calon Bupati Sleman nomer urut 1 Yuni Satya Rahayu yang merupakan seorang wanita menjadi permasalahan yang perlu

⁹ Wawancara dengan Ketua Ta'mir Masjid..., pada tanggal 13 April 2016

dianalisis. Tidak hanya dalam lingkup daerah, tetapi dalam lingkup negara sering kali permasalahan *gender* selalu menjadi bahan perdebatan yang sulit dipecahkan. Tetapi peneliti mencoba untuk memberikan analisisnya untuk memecahkan permasalahan tersebut dengan dasar salah satu hadits yang Al-Bukhari.

حدثنا عثمان بن الهيثم حدثنا عوف عن الحسن عن أبي بكره قال لقد نفعني الله بكلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام الجمل لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل فارس قد ملكوا عليهم بنت كسرى قال لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة¹⁰

Setelah membahas uraian materi tentang kepemimpinan wanita diatas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Hadits tersebut diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nasa'i, Turmudzi dan Ahmad, meskipun pada teksnya ada kalimat yang berbeda. Pada salah satu riwayat Imam Ahmad menggunakan lafadz قوم تملكهم امرأة. Dikarenakan hadits ini hanya terfokus pada riwayat Imam Bukhari maka status haditsnya adalah *Shahih* mengingat bahwa Bukhari memiliki kredibilitas dalam hal periwayatan hadits dan merupakan kitab yang paling *Shahih* setelah Al-Qur'an. Sesuai dengan pemahaman kontekstual maka hadits ini memberikan kebolehan kepada kaum wanita untuk memegang sebuah jabatan kepemimpinan asalkan ia memiliki kapabilitas dan kredibilitas. Hadis ini sifatnya temporal dan tidak dipahami secara tekstual apalagi melihat setting sosio-historisnya.¹¹

¹⁰ As-Sayyid Abul-Ma'aathiy An-Nuuriy, dkk. *Musnad Ahmad bin Hanbal*, Cet. Ke-1, (Daar 'Aalamil-Kutub, 1419 H), no. 19507, 19547, 19556, 19573, 19603, 19612; Al-Waqidi Muhammad ibn 'Umar, *Kitabul Maghazi (Bab Kitabi Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam ila Kisra wa Qaishar)*, (Bayrut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2004), no. 4425.

¹¹ Baidhawiy, *Anwar al-Tanzil wa Asrar al-Ta'wil, Muassasah Sya 'ban, Juz.II*, (Beirut), Hal. 85

Bakal calon Bupati Sleman Yuni Satya Rahayu yang merupakan seorang perempuan menjadi mungkin karena penjelasan hadits tersebut. Hadits tersebut menjelaskan bahwa kaum perempuan diperbolehkan menduduki jabatan pemimpin asalkan ia memiliki kapabilitas dan kredibilitas untuk menjadi seorang pemimpin. Sedangkan Yuni Satya Rahayu dianggap masyarakat Dusun Pugeran Maguwoharjo memiliki kapabilitas dan kredibilitas untuk menduduki jabatan Bupati Sleman karena Yuni Satya Rahayu pernah menjabat sebagai Wakil Bupati Sleman pada periode 2010-2015 sehingga hal tersebut meyakinkan masyarakat Dusun Pugeran Maguwoharjo bahwa Yuni Satya Rahayu memiliki ilmu-ilmu yang harus dikuasai seorang Bupati.

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka pada bab ini penulis akan mengemukakan kesimpulan dan saran yang relevan dengan masalah penelitian. *Pertama*, kesimpulan yang berisi pembahasan singkat dari hasil penelitian mengenai perilaku pemilih pilkada serentak 2015 dalam perspektif *Siyasah Syar'iyah* studi Dusun Pugeran Kelurahan Maguwoharjo Kecamatan Depok Kabupaten Sleman. *Kedua*, saran yang berisi masukan yang sifatnya membangun.

A. Kesimpulan

Kriteria pemimpin masyarakat Dusun Pugeran Maguwoharjo Depok Sleman memiliki kriteria yang sesuai dengan teori *Siyasah Syar'iyah*. Pada Pilkada masyarakat Dusun Pugeran Maguwoharjo mayoritas memilih Yuni Satya Rahayu. Mayoritas masyarakat Dusun Pugeran Maguwoharjo memilih Yuni Satya Rahayu pada Pilkada karena mereka menganggap Yuni Satya Rahayu merupakan bakal calon Bupati Sleman yang paling layak menduduki jabatan Bupati ketimbang bakal calon lain. Meskipun Yuni Satya Rahayu merupakan seorang perempuan, tetapi salah satu hadits yang *Shahih* menjelaskan bahwa perempuan yang memiliki kapabilitas dan kredibilitas yang diperlukan seorang pemimpin diperbolehkan untuk menduduki jabatan pemimpin.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas peneliti memberikan saran bagi masyarakat Dusun Pugeran maupun peneliti lain. Bagi masyarakat Dusun Pugeran kriteria pemimpin yang dianjurkan oleh syariat Islam harus terus di junjung tinggi, bahkan harus lebih diperkuat lagi tentang hukum kepemimpinan. Tidak hanya berkaitan dengan kriteria pemimpin, tetapi juga semua aspek yang berkaitan dengan kepemimpinan harus sesuai dengan syariat-syariat Islam. Dan bagi peneliti lain, perlu adanya penelitian yang lebih dalam lagi berkaitan dengan politik masyarakat Dusun Pugeran khususnya masalah kepemimpinan. Contohnya partisipasi politik masyarakat Dusun Pugeran.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Bandung: CV J-ART, 2005

Kitab Hadits

Ahmad, Imam, *Musnad Imam Ahmad Ibnu Hanbal, Juz. II*, Beirut: Darul Fikr, t.t.

An-Nuuriy, As-Sayyid Abul-Ma'aathiy dkk, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, Cet. Ke-1, Daar 'Aalamil-Kutub, 1419 H.

Ibn 'Umar, Muḥammad Al-Waqidi, *Kitabul Maghazi*, Bayrut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2004.

Baidhawiy, *Anwar al-Tanzil wa Asrar al-Ta'wil, Muassasah Sya'ban, Juz.II*, Beirut: t.t).

Buku dan jurnal

A. Dahl, Robert, *Perihal Demokrasi; Menjelajahi Theori Dan Praktek Demokrasi secara singkat*, alih Bahasa Oleh A. Rahman Zainuddin, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001.

Agustino, Leo, *Pilkada dan Dinamika Politik Lokal*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Abdurrahman, M., *Dinamika Masyarakat Islam dalam Wawasan Fikih*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002.

Amrullah, Afif, *Metamorfosis Demokratisasi di Daerah*, AULA, No 7, Th XXX, 2008.

Al-Hanbali, Ya'la Muhammad Ibn al Husayn al Fara'i, Abi, *Al Ahkam Al Sultaniyyah*, Surabaya: Sharkah Maktabah Ahmad bin Sa'id bin Nabhan, 1974.

Al-Mawardi, Imam, *Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*, alih bahasa oleh Fadhli Bahri dari kitab *al-Ahkan al-Sulthaniyyah*, Jakarta: Darul Falah, 2006.

- Al-Mawardi, Imam, *Al-Ahkam As-Sulthoniyah*, Lebanon: *Dar al Kutub Al Ilmiyah*, t.t.
- Al Mawardi, *Al Ahkam As Sulthoniyah*, Mesir: Maktabah Musthafa Al Baby Al Halaby, 1973.
- Al-Mawardi, Imam, *Ahkan Sulthoniyah*, alih bahasa oleh Khaifurrahman fath & Faturrahman, Jakarta: Qisthi Press, 2014.
- Al-Mawardi, Imam, *Al-Ahkam al-Sulthoniyah wa al-Wilayatu al-Diniyah*, Kairo: Mustafa Al-Babi Al-Halabi, t.t.
- Al-Utsaimin, Muhammad bin Shalih, *Politik Islam Taqliq Siyasah Syar'iyah Ibnu Taimiyah*, Jakarta: Griya Ilmu, 2009.
- Bungin, H. Burhan, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, cet. ke-2, Jakarta: Kencana, 2008.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Juz II, Semarang, Wicaksana, 1993.
- Fadjar, Mukhtie, *Pemilu Perselisihan Hasil Pemilu dan Demokrasi*, Malang: Setara Press, 2013.
- Hakim, Sudarnoto Abdul dkk, (ed), *Islam Berbagai Aspek*, Yogyakarta: LPMI, 1995.
- Huwaydi, Fahmi, *Demokrasi Oposisi dan Masyarakat Madani*, alih bahasa oleh Abdul Ghaffar, Bandung: Mizan, 1996.
- Ibrahim Jindan, Khalid, *Teori Politik Islam, Telaah Kritis Ibnu Taimiyah tentang Pemerintahan Islam*, Surabaya: Risalah Gusti 1995.
- Imam Munawir, E.K., *Asas-asas Kepemimpinan dalam Islam*, Surabaya: Usaha Nasional, t.t.
- Kumolo, Tjahjo, *politik Hukum Pilkada Serentak*, Jakarta: Expose Publika, 2015.
- Nawawi, Hadari, *Kepemimpinan Menurut Islam*, Yogyakarta: Gajahmada University press, 1993.
- Rais, Dhiauddin, *An-Nazhariyatu As-Siyasatu Al-Islamiyah*, alih bahasa oleh Abdul Hayyie al- Kattani “*Teori Politik Islam*”, Cet. ke-1, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

- Shiddiqi, Nourouzzaman, *Jeram-jeram Peradaban Muslim*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Sitepu, P. Anthonius, *Teori-Teori Politik*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Sjadzali, Munawir, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: Penerbit UI Press 1993.
- Surbakti, Ramlan, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana, 1992.
- _____ *Partai, Pemilu dan Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, cet. ke-4, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2001.
- Supardiyono, *Problem Penjaringan Pasangan Calon*, dalam Mohammad Najib (ed), *Pilkada dan Pengembangan Demokrasi Lokal*, KPU Provinsi DIY, 2005.
- Syariati, Ali, *Ummah dan Imamah*, Jakarta: Bandar Lampung 1952.
- Taimiyah, Ibnu, *Siyasah Syar'iyah : Etika Politik Islam*, Surabaya: Bina Ilmu, 2007.
- Taimiyah, Ibnu, *Siyasah Syar'iyah Etika Politik Islam*, Surabaya: Risalah Ilmu, 1995.
- Taimiyah, Ibnu, *Kebijakan Politik Nabi SAW*, Surabaya: Dunia Ilmu, 1997.
- Taimiyah, Ibnu, *Siyasah Syar'iyah ; Etika Politik Islam*, alih bahasa oleh Rofi' Munawwar, Lc Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
- Taimiyah, Ibnu, *Kebijaksanaan Politik Nabi SAW*, alih bahasa oleh Muhammad Munawwir Az Zahidi, Surabaya: Dunia Ilmu, 1997.
- Taimiyah, Ibnu, *Ta'liq Siyasah Syar'iyah Ibnu Taimiyah*, alih bahasa oleh Ajmal Arif, Lc Jakarta: Griya Ilmu, 2009
- Taymiyyah, Ahmad Ibn-, *Majmu' Al Fatawa*, Beirut: Dar al Kutub al 'Ilmiyyah, t.t.
- Untung, Slamet, *Muhammad Sang Pendidik*, Semarang: CV. Pustaka Rizky Putra, 2005.

Wahid Khan, Abdul, *Rasulullah di Mata Sarjana Barat*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2002.

Lain-Lain

Hariani Nasution, Fera, “Perilaku Pemilih Pada Pemilihan Gubernur Sumatera Utara Secara Langsung Di Kabupaten Labuhan Batu (Studi Kasus: di Kelurahan Bakaran Batu, Kabupaten Labuhan Batu)”, *Skripsi* Universitas Sumatera Utara, 2009.

Isnawati, Sara, “Preferensi Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta Terhadap GKR Hemas”, *Skripsi* Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2014.

Kadir Jaelani, Abdul, “Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2013 Perspektif Good Governance”, *Skripsi* Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2014.

Tri Awan, Fajar, “Perilaku Politik Santri dalam Pilkada di Kabupaten Klaten Tahun 2005 di Ponpes Muttaqin”, *Skripsi* Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2008.

Internet

https://id.wikipedia.org/wiki/Maguwoharjo,_Depok,_Sleman, akses 8 Agustus 2016.

https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_kepala_daerah_di_Indonesia, akses 21 Oktober 2016.

https://pilkada2015.kpu.go.id/slemankab/form_c1, akses 14 November 2016.

Qadir Gassing ,A, “Menanti Pemimpin yang Kuat dan Amanah“, <http://www.uinalauddin.ac.id/index.php?module=detailartikel&id=55> akses 12 Oktober 2016.

LAMPIRAN

DAFTAR TERJEMAHAN

NO	HALAMAN	BAB	FN	TERJEMAHAN
1	37	III	3	Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.
2	42	III	9	Dan Kami tidak mengutus seseorang rasul melainkan untuk ditaati dengan seizin Allah. Sesungguhnya jikalau mereka ketika menganiaya dirinya datang kepadamu, lalu memohon ampun kepada Allah, dan Rasulpun memohonkan ampun untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.
3	48	III	19	Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Al Haitam telah menceritakan kepada kami Auf dari Al Hasan dari Abu Bakroh mengatakan : Allah memberikan manfaat kepadaku dengan sebuah kalimat yang aku dengar dari Rasulullah SAW pada hari perang jamal, setelah aku hampir membenarkan mereka Ashabul Jamal dan berperang bersama mereka, ketika sampai kabar kepada Rasulullah SAW bahwa bangsa Persia mengangkat putri Kisra sebagai pemimpin, beliau bersabda: Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan (pemerintahan) mereka kepada seorang wanita.
4	49	III	22	❖ Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya

				<p>kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.</p> <p>❖ Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.</p>
5	50	III	24	<p>Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarlah serta taatlah dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu. Dan barangsiapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung.</p>
6	51	III	25	<p>Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (Mereka berdoa): "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maafilah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah Penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir.</p>
7	51	III	27	<p>Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.</p>
8	52	III	29	<p>Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka, kekuatan apa saja yang kamu mampu dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu)</p>

				kamu menggetarkan musuh-musuh Allah.
9	52	III	31	Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab Taurat di dalamnya (ada) petunjuk dan cahaya (yang menerangi), yang dengan Kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang menyerah diri kepada Allah, oleh orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka, disebabkan mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, (tetapi) takutlah kepada-Ku. Dan janganlah kamu menukar ayat-ayat-Ku dengan harga yang sedikit. Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir.
10	53	III	32	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barangsiapa diantara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.
11	66	IV	2	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barangsiapa diantara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.
12	66	IV	3	Adapun orang-orang yang kafir, sebagian mereka menjadi pelindung bagi sebagian yang lain. Jika kamu (hai para muslimin) tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah itu, niscaya akan terjadi kekacauan di muka bumi dan

				kerusakan yang besar.
13	67	IV	4	Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. Dan hanya kepada Allah kembali(mu).
14	73	IV	10	Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Al Haitam telah menceritakan kepada kami Auf dari Al Hasan dari Abu Bakroh mengatakan : Allah memberikan manfaat kepadaku dengan sebuah kalimat yang aku dengar dari Rasulullah SAW pada hari perang jamal, setelah aku hampir membenarkan mereka Ashabul Jamal dan berperang bersama mereka, ketika sampai kabar kepada Rasulullah SAW bahwa bangsa Persia mengangkat putri Kisra sebagai pemimpin, beliau bersabda: Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan (pemerintahan) mereka kepada seorang wanita.

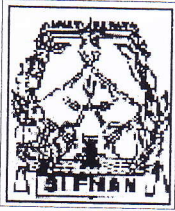
PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa kriteria pemimpin menurut Bapak?
2. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat Dusun Pugeran dalam pemilihan pilkada serentak 2015?
3. Apakah kriteria calon Bupati sudah sesuai dengan kriteria yang Bapak atau Ibu harapkan?
4. Seperti apakah kriteria Bapak atau Ibu dalam memilih calon Bupati Sleman?
5. Berapa persenkah tingkat partisipasi dalam dua periode pemilihan Bupati?
6. Apakah anda sudah mengetahui kinerja dari masing-masing calon Bupati tersebut?
7. Menurut anda kriteria pemimpin yang baik itu seperti apa?
8. Bagaimana tanggapan anda terhadap jumlah mayoritas masyarakat Dusun Pugeran memilih Ibu Yuni Satya Rahayu?

TEKS WAWANCARA

1. Kalau patokannya memilih pemimpin itu yang beragama Islam, kalau calonnya cenderung ke laki-laki karena laki-laki lebih kekuatan mentalnya, meskipun calonnya wanita tidak menutup kemungkinan yang penting agamanya. jadi, kalo di lingkungan yang mayoritas muslim, wajar kok kalo kita lebih mengutamakan calon pemimpin yang beragama Islam.
2. Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilkada lumayan antusias. Hal tersebut dilihat dari suara yang dihimpun di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Hal tersebut terlihat dari jumlah pemilih yang hadir pada saat pemilihan Bupati Sleman 2015.
3. Jadi calon Bupati Sleman 2015 lumayan memenuhi kriteria yang diharapkan. Karena calonnya ada yang dari Dusun Pugeran. Jadi calon nomor urut 1 menurut saya sudah memenuhi harapan warga Dusun Pugeran terbukti Ibu Yuni sudah memperbaiki infrastruktur khususnya di Dusun Pugeran sendiri.
4. Dalam kriteria calon Bupati Sleman lebih memilih calon yang bisa membawa Sleman lebih maju lagi dari sebelum-sebelumnya dan bisa mengatasi persoalan-persoalan yang ada di Kabupaten Sleman.
5. Pemulikada Kabupaten Sleman tahun 2015 dari pada pemilukada 2010 presentasenya sudah lumayan mengalami peningkatan. partisipasi masyarakat cukup antusias dari pada tahun 2010. Itu bisa dilihat dari jumlah warga yang hadir untuk memilih calon Bupati Sleman tahun 2015.

6. Kinerja calon Bupati Sleman pada tahun 2015 sudah lumayan bagus apa lagi pasangan nomor urut 1 yang merupakan warga Dusun Pugeran sendiri. Warga Dusun Pugeran lumayan mengetahui kinerja Ibu Yuni sendiri.
7. Kriteria pemimpin yang semestinya dalam setiap perhelatan Pilkada adalah mereka yang memiliki kompetensi, terdidik, memiliki ahlak yang baik, sopan dan santun kepada sesama, serta yang paling utama adalah memiliki ketaatan kepada Agama.
8. Warga Dusun Pugeran lebih banyak memilih Ibu Yuni Satya Rahayu dikarenakan Ibu Yuni sendiri warga Pugeran. Dan mereka juga lebih tahu kinerja Ibu Yuni dari pada pasangan nomor urut 2. Jadi kebanyakan warga Dusun Pugeran memilih Ibu Yuni dalam Pilkada 2015 kemaren.



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Parasamya Nomor 1 Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta 55511
Telepon (0274) 868800, Faksimilie (0274) 868800
Website: www.bappeda.slemankab.go.id, E-mail : bappeda@slemankab.go.id

SURAT IZIN

Nomor : 070 / Bappeda / 1181 / 2016

**TENTANG
PENELITIAN**

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Dasar : Peraturan Bupati Sleman Nomor : 45 Tahun 2013 Tentang Izin Penelitian, Izin Kuliah Kerja Nyata,
Dan Izin Praktik Kerja Lapangan.
Menunjuk : Surat dari Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Kab. Sleman
Nomor : 070/Kesbang/1919/2016
Hal : Rekomendasi Penelitian

Tanggal : 17 Maret 2016

MENGIZINKAN :

Kepada :
Nama : MUKHYIDDIN
No.Mhs/NIM/NIP/NIK : 11370086
Program/Tingkat : S1
Instansi/Perguruan Tinggi : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Alamat instansi/Perguruan Tinggi : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta
Alamat Rumah : Gempol Gunting Gempolsari Tanggulangin Sidoarjo Jatim
No. Telp / HP : 085747499910
Untuk : Mengadakan Penelitian / Pra Survey / Uji Validitas / PKL dengan judul
**PERILAKU PEMILIH PILKADA SERENTAK 2015 DALAM PERSPEKTIF
SIYASAH (STUDI DUSUN PUGERAN DESA MAGUWOHARJO
KECAMATAN DEPOK KABUPATEN SLEMAN YOGYAKARTA**
Lokasi : Kabupaten Sleman
Waktu : Selama 3 Bulan mulai tanggal 17 Maret 2016 s/d 16 Juni 2016

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. *Wajib melaporkan diri kepada Pejabat Pemerintah setempat (Camat/ Kepala Desa) atau Kepala Instansi untuk mendapat petunjuk seperlunya.*
2. *Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan setempat yang berlaku.*
3. *Izin tidak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan di luar yang direkomendasikan.*
4. *Wajib menyampaikan laporan hasil penelitian berupa 1 (satu) CD format PDF kepada Bupati diserahkan melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.*
5. *Izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan di atas.*

Demikian izin ini dikeluarkan untuk digunakan sebagaimana mestinya, diharapkan pejabat pemerintah/non pemerintah setempat memberikan bantuan seperlunya.

Setelah selesai pelaksanaan penelitian Saudara wajib menyampaikan laporan kepada kami 1 (satu) bulan setelah berakhirnya penelitian.

Dikeluarkan di Sleman

Pada Tanggal : 17 Maret 2016

a.n. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Sekretaris

u.b.

Kepala Bidang Statistik, Penelitian, dan Perencanaan



ERNY MARYATUN, S.I.P, MT

Tembusan :

1. Bupati Sleman (sebagai laporan)
2. Ka. KPU Sleman
3. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Kab. Sleman
4. Camat Depok
5. Kepala Desa Maguwoharjo, Depok
6. Dukuh Pugeran Maguwoharjo Depok
7. Dekan Fak. Syari'ah & Hukum UIN Suka Yk
8. Yang Bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
E-mail : fak.sharia@gmail.com Yogyakarta 55281

No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/ / 2016
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yogyakarta, 16 Maret 2016

Kepada
Yth. Ka.Kantor kesatuan Bangsa
Kabupaten Sleman
Di Sleman

Assalamu'alaikum wr.wb.

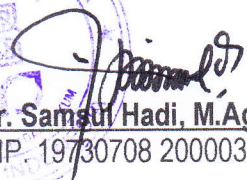
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini

No.	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Mukhyiddin	11370086	Siyasah (Politik Islam)

Untuk mengadakan penelitian di Dusun Pugeran Kelurahan Maguwoharjo Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Yogyakarta guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul **"PERILAKU PEMILIH PILKADA SERENTAK 2015 DALAM PERSPEKTIF SIYASAH (STUDI DUSUN PUGERAN KELURAHAN MAGUWOHARJO KECAMATAN DEPOK KABUPATEN SLEMAN YOGYAKARTA)"**

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. Samsul Hadi, M.Ag.
NIP. 19730708 200003 1 003 2

Tembusan :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
E-mail : fak.sharia@gmail.com Yogyakarta 55281

No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/ / 2016
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yogyakarta, 16 Maret 2016

Kepada
Yth. Kepala Desa Maguwoharjo
Kabupaten Sleman
Di Sleman

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Mukhyiddin	11370086	Siyasah (Politik Islam)

Untuk mengadakan penelitian di Dusun Pugeran Kelurahan Maguwoharjo Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Yogyakarta guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "**PERILAKU PEMILIH PILKADA SERENTAK 2015 DALAM PERSPEKTIF SIYASAH (STUDI DUSUN PUGERAN KELURAHAN MAGUWOHARJO KECAMATAN DEPOK KABUPATEN SLEMAN YOGYAKARTA)**"

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. Samsul Hadi, M.Ag.
NIR. 19730708 200003 1 003

Tembusan :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
E-mail : fak.sharia@gmail.com Yogyakarta 55281

No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/6⁰⁹ / 2016
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yogyakarta, 16 Maret 2016

Kepada
Yth. Kepala Dusun Pugeran
Kabupaten Sleman
Di Sleman

Assalamu'alaikum wr.wb.


Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Mukhyiddin	11370086	Siyasah (Politik Islam)

Untuk mengadakan penelitian di Dusun Pugeran Kelurahan Maguwoharjo Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Yogyakarta guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "**PERILAKU PEMILIH PILKADA SERENTAK 2015 DALAM PERSPEKTIF SIYASAH (STUDI DUSUN PUGERAN KELURAHAN MAGUWOHARJO KECAMATAN DEPOK KABUPATEN SLEMAN YOGYAKARTA)**"

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

an, Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. Samsul Hadi, M.Ag.
NIP. 19730708 200003 1 003 1

Tembusan :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP TPS DALAM WILAYAH DESA/KELURAHAN
DI TINGKAT KECAMATAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2015
diisi berdasarkan formulir Model C1-KWK

MODEL DAA-KWK
Halaman 1-1

KELURAHAN/DESA
KECAMATAN
KABUPATEN/KOTA
PROVINSI

MAGUWOHARJO
DEPOK
SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NO.	URAIAN	RINCIAN																
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	TPS 8	TPS 9	TPS 10	TPS 11	TPS 12	TPS 13	TPS 14	TPS 15	JUMLAH PINDAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A.	DATA PEMILIH																	
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK	96	82	107	133	165	197	133	114	149	130	193	79	132	138	73	1921	
	PR	110	79	115	161	177	234	141	129	142	136	186	93	138	162	98	2.101	
	JML	206	161	222	294	342	431	274	243	291	266	379	172	270	300	171	4.022	
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1)	LK																0	
	PR																0	
	JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh)	LK																0	
	PR																0	
	JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. Pemilih Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2)/pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya	LK		2		1	1					1		1			2	8	
	PR		2		1								1	2		1	7	
	JML	0	4	0	2	1	0	0	0	0	1	0	2	2	0	3	15	
5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4)	LK	96	84	107	134	166	197	133	114	149	131	193	80	132	138	75	1929	
	PR	110	81	115	162	177	234	141	129	142	136	186	94	140	162	99	2.108	
	JML	206	165	222	296	343	431	274	243	291	267	379	174	272	300	174	4.037	
B.	PENGGUNA HAK PILIH																	
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK	73	60	92	96	111	140	104	50	103	80	132	53	51	100	53	1.298	
	PR	90	63	99	114	129	141	113	60	118	95	140	72	63	115	74	1.486	
	JML	163	123	191	210	240	281	217	110	221	175	272	125	114	215	127	2.784	
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1)	LK																0	
	PR																0	
	JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh)	LK																0	
	PR																0	
	JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2)/pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya	LK		2		1	1					1		1			2	8	
	PR		2		1								1	2		1	7	
	JML	0	4	0	2	1	0	0	0	0	1	0	2	2	0	3	15	
5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4)	LK	73	62	92	97	112	140	104	50	103	81	132	54	51	100	55	1.306	
	PR	90	65	99	115	129	141	113	60	118	95	140	73	65	115	75	1.493	
	JML	163	127	191	212	241	281	217	110	221	176	272	127	116	215	130	2.799	

NAMA DAN TANDA TANGAN PPK

1. H. SUDIYONO	2. UMARJAKA	3. RETNANINGSIH	4. DWI ANTORO	5. BAYU DESANTO TRISNAJATI
----------------	-------------	-----------------	---------------	----------------------------

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON

1. KRISTRI HARYONO	2. MISDI BAMBANG PAYADJI, BSc						
--------------------	-------------------------------	--	--	--	--	--	--

NO.	URAIAN	RINCIAN															JUMLAH PINDAHAN
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	TPS 8	TPS 9	TPS 10	TPS 11	TPS 12	TPS 13	TPS 14	TPS 15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4)	213	166	228	302	346	440	281	250	310	273	392	177	278	307	176	4.139
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos											1					1
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan	50	39	37	90	105	159	64	140	89	97	119	50	162	92	46	1.339
4	Jumlah surat suara yang digunakan	163	127	191	212	241	281	217	110	221	176	272	127	116	215	130	2.799

NO.	URAIAN	RINCIAN															JUMLAH PINDAHAN
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	TPS 8	TPS 9	TPS 10	TPS 11	TPS 12	TPS 13	TPS 14	TPS 15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah Suara Sah Seluruh Calon	153	116	165	198	230	269	200	98	179	155	258	114	111	201	125	2.572
2	Jumlah Suara Tidak Sah	10	11	26	14	11	12	17	12	42	21	14	13	5	14	5	227
3	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1 + 2)	163	127	191	212	241	281	217	110	221	176	272	127	116	215	130	2.799

NO.	URAIAN	RINCIAN															JUMLAH PINDAHAN
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	TPS 8	TPS 9	TPS 10	TPS 11	TPS 12	TPS 13	TPS 14	TPS 15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat																0
2	Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih																0

NAMA DAN TANDA TANGAN PPK

1. H. SUDIYONO	2. UMARJAKA	3. RETNANINGSIH	4. DWI ANTORO	5. BAYU DESANTO TRISNAJATI
----------------	-------------	-----------------	---------------	----------------------------

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON

1. KRISTRI HARYONO	2. MISDI BAMBANG PAYADJI, BSc						
--------------------	-------------------------------	--	--	--	--	--	--

NO.	NAMA PASANGAN CALON	RINCIAN															
V.	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	TPS 8	TPS 9	TPS 10	TPS 11	TPS 12	TPS 13	TPS 14	TPS 15	JUMLAH PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Dr. Hj. Yuni Satia Rahayu, SS., M.Hum. dan Danang Wicaksana Sulisty, ST.	120	39	87	160	60	201	131	49	90	80	173	53	46	123	37	1.449
2	Drs. H. Sri Purnomo, M.Si. dan Dra. Hj. Sri Muslimatun, M. Kes.	33	77	78	38	170	68	69	49	89	75	85	61	65	78	88	1.123
	Jumlah Suara Sah Calon	153	116	165	198	230	269	200	98	179	155	258	114	111	201	125	2.572

NAMA DAN TANDA TANGAN PPK				
1. H. SUDIYONO	2. UMARJAKA	3. RETNANINGSIH	4. DWI ANTORO	5. BAYU DESANTO TRISNAJATI
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				
1. KRISTRI HARYONO	2. MISDI BAMBANG PAYADJI, BSc			

KELURAHAN/DESA
KECAMATAN
KABUPATEN/KOTA
PROVINSI

MAGUWO HARJO
DEPOK
SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NO.	URAIAN	RINCIAN																
		JUMLAH PINDAHAN	TPS 16	TPS 17	TPS 18	TPS 19	TPS 20	TPS 21	TPS 22	TPS 23	TPS 24	TPS 25	TPS 26	TPS 27	TPS 28	TPS 29	JUMLAH PINDAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A. DATA PEMILIH																		
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK	1.921	147	138	160	91	133	202	129	163	113	127	134	130	77	137	137	3.802
	PR	2.101	159	131	157	86	142	179	133	170	110	134	130	160	83	145	145	4.020
	JML	4.022	306	269	317	177	275	381	262	333	223	261	264	290	160	282	282	7.822
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1)	LK	0																0
	PR	0																0
	JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPH)	LK	0																0
	PR	0																0
	JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pemilih Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2)/pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya	LK	8		10			1			4				3				26
	PR	7		12			3			7			1		1			31
	JML	15	0	22	0	0	4	0	0	11	0	0	1	3	1	0	0	57
5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4)	LK	1.929	147	148	160	91	134	202	129	167	113	127	134	133	77	137	137	3.828
	PR	2.108	159	143	157	86	145	179	133	177	110	134	131	160	84	145	145	4.051
	JML	4.037	306	291	317	177	279	381	262	344	223	261	265	293	161	282	282	7.879
B. PENGGUNA HAK PILIH																		
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK	1.298	112	93	105	56	88	79	80	78	58	80	92	76	58	98	98	2.451
	PR	1.486	118	87	113	64	110	87	99	81	67	96	99	98	58	116	116	2.779
	JML	2.784	230	180	218	120	198	166	179	159	125	176	191	174	116	214	214	5.230
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1)	LK	0																0
	PR	0																0
	JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPH)	LK	0																0
	PR	0																0
	JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2)/pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya	LK	8		10			1			4				3				26
	PR	7		12			3			7			1		1			31
	JML	15	0	22	0	0	4	0	0	11	0	0	1	3	1	0	0	57
5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4)	LK	1.306	112	103	105	56	89	79	80	82	58	80	92	79	58	98	98	2.477
	PR	1.493	118	99	113	64	113	87	99	88	67	96	100	98	59	116	116	2.810
	JML	2.799	230	202	218	120	202	166	179	170	125	176	192	177	117	214	214	5.287

NAMA DAN TANDA TANGAN PPK				
1. H. SUDIYONO	2. UMARJAKA	3. RETNANINGSIH	4. DWI ANTORO	5. BAYU DESANTO TRISNAJATI
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				
1. KRISTRI HARYONO	2. MISDI BAMBANG PAYADJI, BSc			

NO.	URAIAN	RINCIAN															JUMLAH PINDAHAN
		JUMLAH PINDAHAN	TPS 16	TPS 17	TPS 18	TPS 19	TPS 20	TPS 21	TPS 22	TPS 23	TPS 24	TPS 25	TPS 26	TPS 27	TPS 28	TPS 29	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4)	4.139	314	277	325	182	283	394	269	342	209	268	271	297	164	290	8.024
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos	1															1
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan	1.339	84	75	107	62	81	228	90	172	84	92	79	120	47	76	2.736
4	Jumlah surat suara yang digunakan	2.799	230	202	218	120	202	166	179	170	125	176	192	177	117	214	5.287

NO.	URAIAN	RINCIAN															JUMLAH PINDAHAN
		JUMLAH PINDAHAN	TPS 16	TPS 17	TPS 18	TPS 19	TPS 20	TPS 21	TPS 22	TPS 23	TPS 24	TPS 25	TPS 26	TPS 27	TPS 28	TPS 29	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah Suara Sah Seluruh Calon	2.572	226	196	195	114	174	151	162	160	119	173	179	165	98	191	4.875
2	Jumlah Suara Tidak Sah	227	4	6	23	6	28	15	17	10	6	3	13	12	19	23	412
3	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1 + 2)	2.799	230	202	218	120	202	166	179	170	125	176	192	177	117	214	5.287

NO.	URAIAN	RINCIAN															JUMLAH PINDAHAN
		JUMLAH PINDAHAN	TPS 16	TPS 17	TPS 18	TPS 19	TPS 20	TPS 21	TPS 22	TPS 23	TPS 24	TPS 25	TPS 26	TPS 27	TPS 28	TPS 29	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah Pemilih disabilitas/penyangang cacat	0															0
2	Jumlah Pemilih disabilitas/penyangang cacat yang menggunakan hak pilih	0															0

NAMA DAN TANDA TANGAN PPK

1. H. SUDIYONO	2. UMARJAKA	3. RETNANINGSIH	4. DWI ANTORO	5. BAYU DESANTO TRISNAJATI
----------------	-------------	-----------------	---------------	----------------------------

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON

1. KRISTRI HARYONO	2. MISDI BAMBANG PAYADJI, BSc					
--------------------	-------------------------------	--	--	--	--	--

NO.	NAMA PASANGAN CALON	RINCIAN															
V.	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON	JUMLAH PINDAHAN	TPS 16	TPS 17	TPS 18	TPS 19	TPS 20	TPS 21	TPS 22	TPS 23	TPS 24	TPS 25	TPS 26	TPS 27	TPS 28	TPS 29	JUMLAH PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Dr. Hj. Yuni Satia Rahayu, SS., M.Hum. dan Danang Wicaksana Sulistyia, ST.	1.449	187	163	126	80	97	87	60	64	71	122	93	85	44	108	2.836
2	Drs. H. Sri Purnomo, M.Si. dan Dra. Hj. Sri Muslimatun, M. Kes.	1.123	39	33	69	34	77	64	102	96	48	51	86	80	54	83	2.039
	Jumlah Suara Sah Calon	2.572	226	196	195	114	174	151	162	160	119	173	179	165	98	191	4.875

NAMA DAN TANDA TANGAN PPK				
1. H. SUDIYONO	2. UMARJAKA	3. RETNANINGSIH	4. DWI ANTORO	5. BAYU DESANTO TRISNAJATI
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				
1. KRISTRI HARYONO	2. MISDI BAMBANG PAYADJI, BSc			

KELURAHAN/DESA
KECAMATAN
KABUPATEN/KOTA
PROVINSI

MAGUWOHARJO
DEPOK
SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NO.	URAIAN	RINCIAN																
		JUMLAH PINDAHAN	TPS 30	TPS 31	TPS 32	TPS 33	TPS 34	TPS 35	TPS 36	TPS 37	TPS 38	TPS 39	TPS 40	TPS 41	TPS 42	TPS 43	JUMLAH PINDAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A. DATA PEMILIH																		
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK	3.802	192	155	161	115	157	188	151	122	111	141	86	152	179	129	5.841	
	PR	4.020	209	173	180	129	157	206	154	127	120	138	97	149	185	169	6.213	
	JML	7.822	401	328	341	244	314	394	305	249	231	279	183	301	364	298	12.054	
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1)	LK	0															0	
	PR	0															0	
	JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh)	LK	0															0	
	PR	0															0	
	JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. Pemilih Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2)/pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya	LK	26	1		2					1		1			1	2	34	
	PR	31	2		2				1	2				1		4	43	
	JML	57	3	0	4	0	0	0	1	3	0	1	0	1	1	6	77	
5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4)	LK	3.828	193	155	163	115	157	188	151	123	111	142	86	152	180	131	5.875	
	PR	4.051	211	173	182	129	157	206	155	129	120	138	97	150	185	173	6.256	
	JML	7.879	404	328	345	244	314	394	306	252	231	280	183	302	365	304	12.131	
B. PENGGUNA HAK PILIH																		
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK	2.451	129	96	101	64	94	122	112	86	73	98	59	99	107	89	3.780	
	PR	2.779	160	102	126	76	104	151	128	89	82	102	73	101	143	132	4.348	
	JML	5.230	289	198	227	140	198	273	240	175	155	200	132	200	250	221	8.128	
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1)	LK	0															0	
	PR	0															0	
	JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh)	LK	0															0	
	PR	0															0	
	JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2)/pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya	LK	26	1		2					1		1			1	2	34	
	PR	31	2		2				1	2				1		4	43	
	JML	57	3	0	4	0	0	0	1	3	0	1	0	1	1	6	77	
5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4)	LK	2.477	130	96	103	64	94	122	112	87	73	99	59	99	108	91	3.814	
	PR	2.810	162	102	128	76	104	151	129	91	82	102	73	102	143	136	4.391	
	JML	5.287	292	198	231	140	198	273	241	178	155	201	132	201	251	227	8.205	

NAMA DAN TANDA TANGAN PPK

1. H. SUDIYONO	2. UMARJAKA	3. RETNANINGSIH	4. DWI ANTORO	5. BAYU DESANTO TRISNAJATI
----------------	-------------	-----------------	---------------	----------------------------

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON

1. KRISTRI HARYONO	2. MISDI BAMBANG PAYADJI, BSc						
--------------------	-------------------------------	--	--	--	--	--	--

NO.	URAIAN	RINCIAN															JUMLAH PINDAHAN
		JUMLAH PINDAHAN	TPS 30	TPS 31	TPS 32	TPS 33	TPS 34	TPS 35	TPS 36	TPS 37	TPS 38	TPS 39	TPS 40	TPS 41	TPS 42	TPS 43	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4)	8.024	412	336	351	251	324	404	313	257	237	286	188	309	374	305	12.371
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos	1													0		1
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan	2.736	120	138	120	111	126	131	72	79	82	85	56	108	123	78	4.165
4	Jumlah surat suara yang digunakan	5.287	292	198	231	140	198	273	241	178	155	201	132	201	251	227	8.205

NO.	URAIAN	RINCIAN															JUMLAH PINDAHAN
		JUMLAH PINDAHAN	TPS 30	TPS 31	TPS 32	TPS 33	TPS 34	TPS 35	TPS 36	TPS 37	TPS 38	TPS 39	TPS 40	TPS 41	TPS 42	TPS 43	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah Suara Sah Seluruh Calon	4.875	265	179	208	134	186	259	229	168	145	185	125	180	218	204	7.560
2	Jumlah Suara Tidak Sah	412	27	19	23	6	12	14	12	10	10	16	7	21	33	23	645
3	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1 + 2)	5.287	292	198	231	140	198	273	241	178	155	201	132	201	251	227	8.205

NO.	URAIAN	RINCIAN															JUMLAH PINDAHAN
		JUMLAH PINDAHAN	TPS 30	TPS 31	TPS 32	TPS 33	TPS 34	TPS 35	TPS 36	TPS 37	TPS 38	TPS 39	TPS 40	TPS 41	TPS 42	TPS 43	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah Pemilih disabilitas/penyangang cacat	0															0
2	Jumlah Pemilih disabilitas/penyangang cacat yang menggunakan hak pilih	0															0

NAMA DAN TANDA TANGAN PPK

1. H. SUDIYONO	2. UMARJAKA	3. RETNANINGSIH	4. DWI ANTORO	5. BAYU DESANTO TRISNAJATI
----------------	-------------	-----------------	---------------	----------------------------

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON

1. KRISTRI HARYONO	2. MISDI BAMBANG PAYADJI, BSc						
--------------------	-------------------------------	--	--	--	--	--	--

NO.	NAMA PASANGAN CALON	RINCIAN															
V.	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON	JUMLAH PINDAHAN	TPS 30	TPS 31	TPS 32	TPS 33	TPS 34	TPS 35	TPS 36	TPS 37	TPS 38	TPS 39	TPS 40	TPS 41	TPS 42	TPS 43	JUMLAH PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Dr. Hj. Yuni Satia Rahayu, SS., M.Hum. dan Danang Wicaksana Sulistyia, ST.	2.836	127	84	121	59	128	207	139	64	73	103	45	72	84	109	4.251
2	Drs. H. Sri Purnomo, M.Si. dan Dra. Hj. Sri Muslimatun, M. Kes.	2.039	138	95	87	75	58	52	90	104	72	82	80	108	134	95	3.309
	Jumlah Suara Sah Calon	4.875	265	179	208	134	186	259	229	168	145	185	125	180	218	204	7.560

NAMA DAN TANDA TANGAN PPK				
1. H. SUDIYONO	2. UMARJAKA	3. RETNANINGSIH	4. DWI ANTORO	5. BAYU DESANTO TRISNAJATI
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				
1. KRISTRI HARYONO	2. MISDI BAMBANG PAYADJI, BSc			

KELURAHAN/DESA
KECAMATAN
KABUPATEN/KOTA
PROVINSI

MAGUWOHARJO
DEPOK
SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NO.	URAIAN			RINCIAN														
	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH			JUMLAH PINDAHAN	TPS 44	TPS 45	TPS 46	TPS 47	TPS 48	TPS 49	TPS 50	TPS 51	TPS 52	TPS 53	TPS 54	TPS 55	TPS 56	TPS 57
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A. DATA PEMILIH																		
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK	5.841	154	70	187	124	161	142	115	126	104	188	127	148	200	185	7.872	
	PR	6.213	151	72	172	129	170	136	120	126	99	189	123	157	208	212	8.277	
	JML	12.054	305	142	359	253	331	278	235	252	203	377	250	305	408	397	16.149	
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1)	LK	0															0	
	PR	0															0	
	JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPH)	LK	0															0	
	PR	0															0	
	JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. Pemilih Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2)/pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya	LK	34		1		2					2	7	1				1	48
	PR	43				2				1	1	8	1			1		57
	JML	77	0	1	0	4	0	0	0	1	3	15	2	0	1	1	105	
5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4)	LK	5.875	154	71	187	126	161	142	115	126	106	195	128	148	200	186	7.920	
	PR	6.256	151	72	172	131	170	136	120	127	100	197	124	157	209	212	8.334	
	JML	12.131	305	143	359	257	331	278	235	253	206	392	252	305	409	398	16.254	
B. PENGGUNA HAK PILIH																		
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK	3.780	100	39	98	82	111	105	82	87	79	103	86	109	105	136	5.102	
	PR	4.348	120	40	111	94	127	105	100	93	72	131	75	121	100	157	5.794	
	JML	8.128	220	79	209	176	238	210	182	180	151	234	161	230	205	293	10.896	
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1)	LK	0										0					0	
	PR	0										0					0	
	JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPH)	LK	0															0	
	PR	0															0	
	JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2)/pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya	LK	34		1		2					2	7	1				1	48
	PR	43				2				1	1	8	1			1		57
	JML	77	0	1	0	4	0	0	0	1	3	15	2	0	1	1	105	
5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4)	LK	3.814	100	40	98	84	111	105	82	87	81	110	87	109	105	137	5.150	
	PR	4.391	120	40	111	96	127	105	100	94	73	139	76	121	101	157	5.851	
	JML	8.205	220	80	209	180	238	210	182	181	154	249	163	230	206	294	11.001	

NAMA DAN TANDA TANGAN PPK				
1. H. SUDIYONO	2. UMARJAKA	3. RETNANINGSIH	4. DWI ANTORO	5. BAYU DESANTO TRISNAJATI
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				
1. KRISTRI HARYONO	2. MISDI BAMBANG PAYADJI, BSc			

NO.	URAIAN	RINCIAN															JUMLAH PINDAHAN
		JUMLAH PINDAHAN	TPS 44	TPS 45	TPS 46	TPS 47	TPS 48	TPS 49	TPS 50	TPS 51	TPS 52	TPS 53	TPS 54	TPS 55	TPS 56	TPS 57	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4)	12.371	313	146	368	360	340	285	242	259	209	386	257	313	419	407	16.675
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos	1															1
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan	4.165	93	66	159	180	102	75	60	78	55	137	94	83	213	113	5.673
4	Jumlah surat suara yang digunakan	8.205	220	80	209	180	238	210	182	181	154	249	163	230	206	294	11.001

NO.	URAIAN	RINCIAN															JUMLAH PINDAHAN
		JUMLAH PINDAHAN	TPS 44	TPS 45	TPS 46	TPS 47	TPS 48	TPS 49	TPS 50	TPS 51	TPS 52	TPS 53	TPS 54	TPS 55	TPS 56	TPS 57	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah Suara Sah Seluruh Calon	7.560	199	73	194	170	229	195	170	161	148	239	149	209	199	270	10.165
2	Jumlah Suara Tidak Sah	645	21	7	15	10	9	15	12	20	6	10	14	21	7	24	836
3	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1 + 2)	8.205	220	80	209	180	238	210	182	181	154	249	163	230	206	294	11.001

NO.	URAIAN	RINCIAN															JUMLAH PINDAHAN
		JUMLAH PINDAHAN	TPS 44	TPS 45	TPS 46	TPS 47	TPS 48	TPS 49	TPS 50	TPS 51	TPS 52	TPS 53	TPS 54	TPS 55	TPS 56	TPS 57	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah Pemilih disabilitas/penyangang cacat	0															0
2	Jumlah Pemilih disabilitas/penyangang cacat yang menggunakan hak pilih	0															0

NAMA DAN TANDA TANGAN PPK

1. H. SUDIYONO	2. UMARJAKA	3. RETNANINGSIH	4. DWI ANTORO	5. BAYU DESANTO TRISNAJATI
----------------	-------------	-----------------	---------------	----------------------------

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON

1. KRISTRI HARYONO	2. MISDI BAMBANG PAYADJI, BSc					
--------------------	-------------------------------	--	--	--	--	--

NO.	NAMA PASANGAN CALON	RINCIAN															
V.	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON	JUMLAH PINDAHAN	TPS 44	TPS 45	TPS 46	TPS 47	TPS 48	TPS 49	TPS 50	TPS 51	TPS 52	TPS 53	TPS 54	TPS 55	TPS 56	TPS 57	JUMLAH PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Dr. Hj. Yuni Satia Rahayu, SS., M.Hum. dan Danang Wicaksana Sulistyia, ST.	4.251	62	45	96	84	107	111	103	94	76	131	41	65	41	100	5.407
2	Drs. H. Sri Purnomo, M.Si. dan Dra. Hj. Sri Muslimatun, M. Kes.	3.309	137	28	98	86	122	84	67	67	72	108	108	144	158	170	4.758
	Jumlah Suara Sah Calon	7.560	199	73	194	170	229	195	170	161	148	239	149	209	199	270	10.165

NAMA DAN TANDA TANGAN PPK				
1. H. SUDIYONO	2. UMARJAKA	3. RETNANINGSIH	4. DWI ANTORO	5. BAYU DESANTO TRISNAJATI
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				
1. KRISTRI HARYONO	2. MISDI BAMBANG PAYADJI, BSc			

KELURAHAN/DESA
KECAMATAN
KABUPATEN/KOTA
PROVINSI

MAGUWOHARJO
DEPOK
SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NO.	URAIAN	RINCIAN																
		JUMLAH PINDAHAN	TPS 58	TPS 59	TPS 60	TPS 61	TPS 62	TPS 63	TPS 64	TPS 65	TPS 66	TPS 67	TPS 68	TPS 69	TPS 70	TPS 71	JUMLAH PINDAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A. DATA PEMILIH																		
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK	7.872	189	161	65	161	144	176	160	200	93	124	104	47	135	211	9.842	
	PR	8.277	202	176	77	166	133	190	170	187	108	133	118	51	140	212	10.340	
	JML	16.149	391	337	142	327	277	366	330	387	201	257	222	98	275	423	20.182	
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1)	LK	0															0	
	PR	0															0	
	JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh)	LK	0															0	
	PR	0															0	
	JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. Pemilih Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2)/pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya	LK	48	1			2		2	2		1			1			57	
	PR	57	1		1	4		1	2								66	
	JML	105	2	0	1	6	0	3	4	0	1	0	0	1	0	0	123	
5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4)	LK	7.920	190	161	65	163	144	178	162	200	94	124	104	48	135	211	9.899	
	PR	8.334	203	176	78	170	133	191	172	187	108	133	118	51	140	212	10.406	
	JML	16.254	393	337	143	333	277	369	334	387	202	257	222	99	275	423	20.305	
B. PENGGUNA HAK PILIH																		
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK	5.102	126	107	43	106	80	103	107	139	66	80	67	39	104	127	6.396	
	PR	5.794	125	126	51	124	95	137	117	146	78	106	83	45	123	125	7.275	
	JML	10.896	251	233	94	230	175	240	224	285	144	186	150	84	227	252	13.671	
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1)	LK	0															0	
	PR	0															0	
	JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh)	LK	0															0	
	PR	0															0	
	JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2)/pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya	LK	48	1			2		2	2		1			1			57	
	PR	57	1		1	4		1	2								66	
	JML	105	2	0	1	6	0	3	4	0	1	0	0	1	0	0	123	
5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4)	LK	5.150	127	107	43	108	80	105	109	139	67	80	67	40	104	127	6.453	
	PR	5.851	126	126	52	128	95	138	119	146	78	106	83	45	123	125	7.341	
	JML	11.001	253	233	95	236	175	243	228	285	145	186	150	85	227	252	13.794	

NAMA DAN TANDA TANGAN PPK				
1. H. SUDIYONO	2. UMARJAKA	3. RETNANINGSIH	4. DWI ANTORO	5. BAYU DESANTO TRISNAJATI
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				
1. KRISTRI HARYONO	2. MISDI BAMBANG PAYADJI, BSc			

NO.	URAIAN	RINCIAN															JUMLAH PINDAHAN
		JUMLAH PINDAHAN	TPS 58	TPS 59	TPS 60	TPS 61	TPS 62	TPS 63	TPS 64	TPS 65	TPS 66	TPS 67	TPS 68	TPS 69	TPS 70	TPS 71	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4)	16.675	408	346	147	336	282	376	341	398	207	264	228	101	282	436	20.827
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos	1															1
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan	5.673	155	113	52	100	107	133	113	113	62	78	78	16	55	184	7.032
4	Jumlah surat suara yang digunakan	11.001	253	233	95	236	175	243	228	285	145	186	150	85	227	252	13.794

NO.	URAIAN	RINCIAN															JUMLAH PINDAHAN
		JUMLAH PINDAHAN	TPS 58	TPS 59	TPS 60	TPS 61	TPS 62	TPS 63	TPS 64	TPS 65	TPS 66	TPS 67	TPS 68	TPS 69	TPS 70	TPS 71	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah Suara Sah Seluruh Calon	10.165	236	219	83	204	155	225	204	270	132	169	143	81	218	231	12.735
2	Jumlah Suara Tidak Sah	836	17	14	12	32	20	18	24	15	13	17	7	4	9	21	1.059
3	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1 + 2)	11.001	253	233	95	236	175	243	228	285	145	186	150	85	227	252	13.794

NO.	URAIAN	RINCIAN															JUMLAH PINDAHAN
		JUMLAH PINDAHAN	TPS 58	TPS 59	TPS 60	TPS 61	TPS 62	TPS 63	TPS 64	TPS 65	TPS 66	TPS 67	TPS 68	TPS 69	TPS 70	TPS 71	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah Pemilih disabilitas/penyangang cacat	0															0
2	Jumlah Pemilih disabilitas/penyangang cacat yang menggunakan hak pilih	0															0

NAMA DAN TANDA TANGAN PPK

1. H. SUDIYONO	2. UMARJAKA	3. RETNANINGSIH	4. DWI ANTORO	5. BAYU DESANTO TRISNAJATI
----------------	-------------	-----------------	---------------	----------------------------

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON

1. KRISTRI HARYONO	2. MISDI BAMBANG PAYADJI, BSc					
--------------------	-------------------------------	--	--	--	--	--

NO.	NAMA PASANGAN CALON	RINCIAN															
V.	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON	JUMLAH PINDAHAN	TPS 58	TPS 59	TPS 60	TPS 61	TPS 62	TPS 63	TPS 64	TPS 65	TPS 66	TPS 67	TPS 68	TPS 69	TPS 70	TPS 71	JUMLAH PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Dr. Hj. Yuni Satia Rahayu, SS., M.Hum. dan Danang Wicaksana Sulistya, ST.	5.407	73	105	36	102	63	104	121	99	39	76	50	26	100	118	6.519
2	Drs. H. Sri Purnomo, M.Si. dan Dra. Hj. Sri Muslimatun, M. Kes.	4.758	163	114	47	102	92	121	83	171	93	93	93	55	118	113	6.216
	Jumlah Suara Sah Calon	10.165	236	219	83	204	155	225	204	270	132	169	143	81	218	231	12.735

NAMA DAN TANDA TANGAN PPK				
1. H. SUDIYONO	2. UMARJAKA	3. RETNANINGSIH	4. DWI ANTORO	5. BAYU DESANTO TRISNAJATI
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				
1. KRISTRI HARYONO	2. MISDI BAMBANG PAYADJI, BSc			

KELURAHAN/DESA
KECAMATAN
KABUPATEN/KOTA
PROVINSI

MAGUWO HARJO
DEPOK
SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NO.	URAIAN	RINCIAN																
		JUMLAH PINDAHAN	TPS 72	TPS 73	TPS 74	TPS 75	TPS 76	TPS 77	TPS 78	TPS 79	TPS 80	TPS 81	TPS 82	TPS 83	TPS 84	TPS 85	JUMLAH PINDAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A. DATA PEMILIH																		
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK	9.842	100	146	140	119	103	158	112	78	124	141	166	119	168	187	11.703	
	PR	10.340	127	169	159	149	117	183	115	53	171	144	187	123	183	182	12.402	
	JML	20.182	227	315	299	268	220	341	227	131	295	285	353	242	351	369	24.105	
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1)	LK	0															0	
	PR	0															0	
	JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh)	LK	0															0	
	PR	0															0	
	JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. Pemilih Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2)/pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya	LK	57	1		2		1	1				1		3		3	69	
	PR	66	2		5				1			1			1		76	
	JML	123	3	0	7	0	1	1	1	0	0	2	0	3	1	3	145	
5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4)	LK	9.899	101	146	142	119	104	159	112	78	124	142	166	122	168	190	11.772	
	PR	10.406	129	169	164	149	117	183	116	53	171	145	187	123	184	182	12.478	
	JML	20.305	230	315	306	268	221	342	228	131	295	287	353	245	352	372	24.250	
B. PENGGUNA HAK PILIH																		
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK	6.396	72	83	81	78	47	121	73	28	74	72	91	90	109	88	7.503	
	PR	7.275	102	121	104	110	73	96	75	26	102	75	113	97	141	98	8.608	
	JML	13.671	174	204	185	188	120	217	148	54	176	147	204	187	250	186	16.111	
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1)	LK	0															0	
	PR	0															0	
	JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh)	LK	0															0	
	PR	0															0	
	JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2)/pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya	LK	57	1		2		1	1				1		3		3	69	
	PR	66	2		5				1			1			1		76	
	JML	123	3	0	7	0	1	1	1	0	0	2	0	3	1	3	145	
5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4)	LK	6.453	73	83	83	78	48	122	73	28	74	73	91	93	109	91	7.572	
	PR	7.341	104	121	109	110	73	96	76	26	102	76	113	97	142	98	8.684	
	JML	13.794	177	204	192	188	121	218	149	54	176	149	204	190	251	189	16.256	

NAMA DAN TANDA TANGAN PPK				
1. H. SUDIYONO	2. UMARJAKA	3. RETNANINGSIH	4. DWI ANTORO	5. BAYU DESANTO TRISNAJATI
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				
1. KRISTRI HARYONO	2. MISDI BAMBANG PAYADJI, BSc			

NO.	URAIAN	RINCIAN															JUMLAH PINDAHAN
		JUMLAH PINDAHAN	TPS 72	TPS 73	TPS 74	TPS 75	TPS 76	TPS 77	TPS 78	TPS 79	TPS 80	TPS 81	TPS 82	TPS 83	TPS 84	TPS 85	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4)	20.827	233	327	307	275	226	350	234	135	305	293	362	249	360	383	24.866
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos	1				1		1									3
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan	7.032	56	123	115	86	105	131	85	81	129	144	158	59	109	194	8.607
4	Jumlah surat suara yang digunakan	13.794	177	204	192	188	121	218	149	54	176	149	204	190	251	189	16.256

NO.	URAIAN	RINCIAN															JUMLAH PINDAHAN
		JUMLAH PINDAHAN	TPS 72	TPS 73	TPS 74	TPS 75	TPS 76	TPS 77	TPS 78	TPS 79	TPS 80	TPS 81	TPS 82	TPS 83	TPS 84	TPS 85	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah Suara Sah Seluruh Calon	12.735	163	194	179	178	107	195	143	51	161	137	184	179	238	180	15.024
2	Jumlah Suara Tidak Sah	1.059	14	10	13	10	14	23	6	3	15	12	20	11	13	9	1.232
3	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1 + 2)	13.794	177	204	192	188	121	218	149	54	176	149	204	190	251	189	16.256

NO.	URAIAN	RINCIAN															JUMLAH PINDAHAN
		JUMLAH PINDAHAN	TPS 72	TPS 73	TPS 74	TPS 75	TPS 76	TPS 77	TPS 78	TPS 79	TPS 80	TPS 81	TPS 82	TPS 83	TPS 84	TPS 85	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah Pemilih disabilitas/penyangang cacat	0															0
2	Jumlah Pemilih disabilitas/penyangang cacat yang menggunakan hak pilih	0															0

NAMA DAN TANDA TANGAN PPK

1. H. SUDIYONO	2. UMARJAKA	3. RETNANINGSIH	4. DWI ANTORO	5. BAYU DESANTO TRISNAJATI
----------------	-------------	-----------------	---------------	----------------------------

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON

1. KRISTRI HARYONO	2. MISDI BAMBANG PAYADJI, BSc					
--------------------	-------------------------------	--	--	--	--	--

NO.	NAMA PASANGAN CALON	RINCIAN															
V.	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON	JUMLAH PINDAHAN	TPS 72	TPS 73	TPS 74	TPS 75	TPS 76	TPS 77	TPS 78	TPS 79	TPS 80	TPS 81	TPS 82	TPS 83	TPS 84	TPS 85	JUMLAH PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Dr. Hj. Yuni Satia Rahayu, SS., M.Hum. dan Danang Wicaksana Sulistya, ST.	6.519	108	91	113	79	58	105	75	18	81	81	89	118	128	80	7.743
2	Drs. H. Sri Purnomo, M.Si. dan Dra. Hj. Sri Muslimatun, M. Kes.	6.216	55	103	66	99	49	90	68	33	80	56	95	61	110	100	7.281
	Jumlah Suara Sah Calon	12.735	163	194	179	178	107	195	143	51	161	137	184	179	238	180	15.024

NAMA DAN TANDA TANGAN PPK				
1. H. SUDIYONO	2. UMARJAKA	3. RETNANINGSIH	4. DWI ANTORO	5. BAYU DESANTO TRISNAJATI
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				
1. KRISTRI HARYONO	2. MISDI BAMBANG PAYADJI, BSc			

KELURAHAN/DESA
KECAMATAN
KABUPATEN/KOTA
PROVINSI

MAGUWOHARJO
DEPOK
SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NO.	URAIAN	RINCIAN																
		JUMLAH PINDAHAN	TPS 86	TPS 87												JUMLAH AKHIR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A. DATA PEMILIH																		
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK	11.703	91	141														11.935
	PR	12.402	83	140														12.625
	JML	24.105	174	281														24.560
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1)	LK	0																0
	PR	0																0
	JML	0	0	0														0
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh)	LK	0																0
	PR	0																0
	JML	0	0	0														0
4. Pemilih Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2)/pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya	LK	69	1															70
	PR	76	1															77
	JML	145	2	0														147
5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4)	LK	11.772	92	141														12.005
	PR	12.478	84	140														12.702
	JML	24.250	176	281														24.707
B. PENGGUNA HAK PILIH																		
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK	7.503	52	76														7.631
	PR	8.608	49	91														8.748
	JML	16.111	101	167														16.379
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1)	LK	0																0
	PR	0																0
	JML	0	0	0														0
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh)	LK	0																0
	PR	0																0
	JML	0	0	0														0
4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2)/pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya	LK	69	1															70
	PR	76	1															77
	JML	145	2	0														147
5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4)	LK	7.572	53	76														7.701
	PR	8.684	50	91														8.825
	JML	16.256	103	167														16.526

NAMA DAN TANDA TANGAN PPK				
1. H. SUDIYONO	2. UMARJAKA	3. RETNANINGSIH	4. DWI ANTORO	5. BAYU DESANTO TRISNAJATI
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				
1. KRISTRI HARYONO	2. MISDI BAMBANG PAYADJI, BSc			

NO.	URAIAN	RINCIAN															JUMLAH AKHIR
		JUMLAH PINDAHAN	TPS 86	TPS 87													
II.	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4)	24.866	179	289													25.334
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos	3		2													5
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan	8.607	76	120													8.803
4	Jumlah surat suara yang digunakan	16.256	103	167													16.526

NO.	URAIAN	RINCIAN															JUMLAH AKHIR
		JUMLAH PINDAHAN	TPS 86	TPS 87													
III.	DATA JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah Suara Sah Seluruh Calon	15.024	96	156													15.276
2	Jumlah Suara Tidak Sah	1.232	7	11													1.250
3	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1 + 2)	16.256	103	167													16.526

NO.	URAIAN	RINCIAN															JUMLAH AKHIR
		JUMLAH PINDAHAN	TPS 86	TPS 87													
IV.	DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah Pemilih disabilitas/penyangang cacat	0															0
2	Jumlah Pemilih disabilitas/penyangang cacat yang menggunakan hak pilih	0															0

NAMA DAN TANDA TANGAN PPK

1. H. SUDIYONO	2. UMARJAKA	3. RETNANINGSIH	4. DWI ANTORO	5. BAYU DESANTO TRISNAJATI
----------------	-------------	-----------------	---------------	----------------------------

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON

1. KRISTRI HARYONO	2. MISDI BAMBANG PAYADJI, BSc					
--------------------	-------------------------------	--	--	--	--	--

NO.	NAMA PASANGAN CALON	RINCIAN															
V.	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON	JUMLAH PINDAHAN	TPS 86	TPS 87													JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Dr. Hj. Yuni Satia Rahayu, SS., M.Hum. dan Danang Wicaksana Sulistyia, ST.	7.743	41	74													7.858
2	Drs. H. Sri Purnomo, M.Si. dan Dra. Hj. Sri Muslimatun, M. Kes.	7.281	55	82													7.418
	Jumlah Suara Sah Calon	15.024	96	156													15.276

NAMA DAN TANDA TANGAN PPK				
1. H. SUDIYONO	2. UMARJAKA	3. RETNANINGSIH	4. DWI ANTORO	5. BAYU DESANTO TRISNAJATI
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				
1. KRISTRI HARYONO	2. MISDI BAMBANG PAYADJI, BSc			

KELURAHAN/DESA
KECAMATAN
KABUPATEN/KOTA
PROVINSI

MAGUWO HARJO
DEPOK
SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NO.	URAIAN			RINCIAN														JUMLAH AKHIR
	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH			JUMLAH PINDAHAN														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A. DATA PEMILIH																		
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK		11.935															11.935
	PR		12.625															12.625
	JML		24.560															24.560
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1)	LK		0															0
	PR		0															0
	JML		0															0
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh)	LK		0															0
	PR		0															0
	JML		0															0
4. Pemilih Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2)/pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya	LK		70															70
	PR		77															77
	JML		147															147
5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4)	LK		12.005															12.005
	PR		12.702															12.702
	JML		24.707															24.707
B. PENGGUNA HAK PILIH																		
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK		7.631															7.631
	PR		8.748															8.748
	JML		16.379															16.379
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1)	LK		0															0
	PR		0															0
	JML		0															0
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh)	LK		0															0
	PR		0															0
	JML		0															0
4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2)/pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya	LK		70															70
	PR		77															77
	JML		147															147
5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4)	LK		7.701															7.701
	PR		8.825															8.825
	JML		16.526															16.526

NAMA DAN TANDA TANGAN PPK				
1. H. SUDIYONO	2. UMARJAKA	3. RETNANINGSIH	4. DWI ANTORO	5. BAYU DESANTO TRISNAJATI
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				
1. KRISTRI HARYONO	2. MISDI BAMBANG PAYADJI, BSc			

NO.	NAMA PASANGAN CALON	RINCIAN															
V.	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON	JUMLAH PINDAHAN															JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Dr. Hj. Yuni Satia Rahayu, SS., M.Hum. dan Danang Wicaksana Sulistyia, ST.	7.858															7.858
2	Drs. H. Sri Purnomo, M.Si. dan Dra. Hj. Sri Muslimatun, M. Kes.	7.418															7.418
	Jumlah Suara Sah Calon	15.276															15.276

NAMA DAN TANDA TANGAN PPK				
1. H. SUDIYONO	2. UMARJAKA	3. RETNANINGSIH	4. DWI ANTORO	5. BAYU DESANTO TRISNAJATI
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				
1. KRISTRI HARYONO	2. MISDI BAMBANG PAYADJI, BSc			



**SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KECAMATAN
DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2015**
diisi berdasarkan formulir Model DA1-KWK

MODEL DB1-KWK
Halaman 1-1

KABUPATEN/KOTA
PROVINSI

SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NO.	URAIAN	RINCIAN																
		BERBAH	CANGKRINGAN	DEPOK	GAMPING	GODEAN	KALASAN	MINGGIR	MLATI	MOYUDAN	NGAGLIK	NGEMPLAK	PAKEM	PRAMBANAN	SEYEGAN	SLEMAN	JUMLAH PINDAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A. DATA PEMILIH																		
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK	18.858	11.038	42.991	32.405	25.312	28.006	12.133	33.652	12.318	32.700	20.962	12.814	19.203	17.776	23.899	344.067	
	PR	20.564	11.991	45.165	33.483	26.143	29.755	13.349	34.667	13.364	34.501	22.581	13.914	20.278	19.458	25.690	364.903	
	JML	39.422	23.029	88.156	65.888	51.455	57.761	25.482	68.319	25.682	67.201	43.543	26.728	39.481	37.234	49.589	708.970	
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1)	LK	8	8	21	45	30	45	4	26	6	8	22	5	9	9	36	282	
	PR	9	11	31	39	26	24	4	22	5	14	21	3	19	19	48	295	
	JML	17	19	52	84	56	69	8	48	11	22	43	8	28	28	84	577	
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh)	LK	0	0	1	16	1	6	20	48	4	0	1	12	1	2	49	161	
	PR	0	0	1	18	1	10	7	50	8	2	0	9	0	0	47	153	
	JML	0	0	2	34	2	16	27	98	12	2	1	21	1	2	96	314	
4. Pemilih Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2)/pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya	LK	56	16	301	99	85	125	29	171	20	215	75	38	59	39	73	1.401	
	PR	55	20	380	130	115	135	29	193	35	262	82	42	77	45	102	1.702	
	JML	111	36	681	229	200	260	58	364	55	477	157	80	136	84	175	3.103	
5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4)	LK	18.922	11.062	43.314	32.565	25.428	28.182	12.186	33.897	12.348	32.923	21.060	12.869	19.272	17.826	24.057	345.911	
	PR	20.628	12.022	45.577	33.670	26.285	29.924	13.389	34.932	13.412	34.779	22.684	13.968	20.374	19.522	25.887	367.053	
	JML	39.550	23.084	88.891	66.235	51.713	58.106	25.575	68.829	25.760	67.702	43.744	26.837	39.646	37.348	49.944	712.964	
B. PENGGUNA HAK PILIH																		
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK	13.155	8.441	25.361	21.992	18.577	18.545	8.967	21.563	9.450	21.088	14.681	9.800	13.167	13.827	18.056	236.670	
	PR	15.277	9.768	29.219	24.351	20.001	21.692	10.437	24.266	10.689	24.037	17.104	11.325	15.290	15.195	20.367	269.018	
	JML	28.432	18.209	54.580	46.343	38.578	40.237	19.404	45.829	20.139	45.125	31.785	21.125	28.457	29.022	38.423	505.688	
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1)	LK	4	4	17	15	19	15	4	8	6	3	14	5	6	5	17	142	
	PR	4	5	18	11	14	10	4	12	5	7	13	3	13	13	31	163	
	JML	8	9	35	26	33	25	8	20	11	10	27	8	19	18	48	305	
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh)	LK	0	0	1	8	0	6	20	36	4	0	1	12	1	2	49	140	
	PR	0	0	1	12	0	10	7	41	8	2	0	9	0	0	47	137	
	JML	0	0	2	20	0	16	27	77	12	2	1	21	1	2	96	277	
4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2)/pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya	LK	56	16	301	99	85	125	29	171	20	215	75	38	59	39	73	1.401	
	PR	55	20	380	130	115	135	29	193	35	262	82	42	77	45	102	1.702	
	JML	111	36	681	229	200	260	58	364	55	477	157	80	136	84	175	3.103	
5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4)	LK	13.215	8.461	25.680	22.114	18.681	18.691	9.020	21.778	9.480	21.306	14.771	9.855	13.233	13.873	18.195	238.353	
	PR	15.336	9.793	29.618	24.504	20.130	21.847	10.477	24.512	10.737	24.308	17.199	11.379	15.380	15.253	20.547	271.020	
	JML	28.551	18.254	55.298	46.618	38.811	40.538	19.497	46.290	20.217	45.614	31.970	21.234	28.613	29.126	38.742	509.373	

NAMA DAN TANDA TANGAN KPU KABUPATEN/KOTA				
1. Ahmad Shidqi, S.Th.I., M.Hum.	2. Imanda Yulianto, S.Sos.	3. Indah S. Wulandari, S.E., M.Sc.	4. Haryanta, S.P.	5. Aswino Wardhana, S.IP
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				
1. Purwanto, SE	2. Sugiyatna, S.Ag			

KABUPATEN/KOTA
PROVINSI

SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NO.	URAIAN	RINCIAN																
		JUMLAH PINDAHAN	TEMPEL	TURI													JUMLAH AKHIR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A. DATA PEMILIH																		
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK	344.067	19.227	13.017														376.311
	PR	364.903	20.409	13.820														399.132
	JML	708.970	39.636	26.837														775.443
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1)	LK	282	1	11														294
	PR	295	4	11														310
	JML	577	5	22														604
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh)	LK	161	0	1														162
	PR	153	0	0														153
	JML	314	0	1														315
4. Pemilih Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2)/pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya	LK	1.401	36	13														1.450
	PR	1.702	51	23														1.776
	JML	3.103	87	36														3.226
5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4)	LK	345.911	19.264	13.042														378.217
	PR	367.053	20.464	13.854														401.371
	JML	712.964	39.728	26.896														779.588
B. PENGGUNA HAK PILIH																		
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK	236.670	15.201	10.212														262.083
	PR	269.018	16.739	11.423														297.180
	JML	505.688	31.940	21.635														559.263
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1)	LK	142	0	6														148
	PR	163	1	10														174
	JML	305	1	16														322
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh)	LK	140	0	1														141
	PR	137	0	0														137
	JML	277	0	1														278
4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2)/pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya	LK	1.401	36	13														1.450
	PR	1.702	51	23														1.776
	JML	3.103	87	36														3.226
5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4)	LK	238.353	15.237	10.232														263.822
	PR	271.020	16.791	11.456														299.267
	JML	509.373	32.028	21.688														563.089

NAMA DAN TANDA TANGAN KPU KABUPATEN/KOTA

1. Ahmad Shidqi, S.Th.I., M.Hum

2. Imanda Yulianto, S.Sos.

3. Indah S. Wulandari, S.E., M.Sc.

4. Haryanta, S.P.

5. Aswino Wardhana, S.IP

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON

1. Purwanto, S.

2. Sugiyatna, S.A.

KABUPATEN/KOTA
PROVINSI

SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NO.	URAIAN	RINCIAN															
		BERBAH	CANGKRINGAN	DEPOK	GAMPING	GODEAN	KALASAN	MINGGIR	MLATI	MOYUDAN	NGAGLIK	NGEMPLAK	PAKEM	PRAMBANAN	SEYEGAN	SLEMAN	JUMLAH PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4)	40.505	23.646	90.701	67.772	52.891	59.248	26.169	70.107	26.334	68.829	44.893	27.422	40.488	38.122	50.869	727.996
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos	14	2	32	104	27	41	69	123	31	32	17	1	39	62	22	616
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan	11.940	5.390	35.371	21.050	14.053	18.669	6.603	23.694	6.086	23.183	12.906	6.187	11.836	8.934	12.105	218.007
4	Jumlah surat suara yang digunakan	28.551	18.254	55.298	46.618	38.811	40.538	19.497	46.290	20.217	45.614	31.970	21.234	28.613	29.126	38.742	509.373

NO.	URAIAN	RINCIAN															
		BERBAH	CANGKRINGAN	DEPOK	GAMPING	GODEAN	KALASAN	MINGGIR	MLATI	MOYUDAN	NGAGLIK	NGEMPLAK	PAKEM	PRAMBANAN	SEYEGAN	SLEMAN	JUMLAH PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah Suara Sah Seluruh Calon	26.754	16.852	51.502	43.294	35.960	38.204	18.148	42.727	19.098	42.600	29.771	19.757	26.759	27.076	36.300	474.802
2	Jumlah Suara Tidak Sah	1.797	1.402	3.796	3.324	2.851	2.334	1.349	3.563	1.119	3.014	2.199	1.477	1.854	2.050	2.442	34.571
3	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1 + 2)	28.551	18.254	55.298	46.618	38.811	40.538	19.497	46.290	20.217	45.614	31.970	21.234	28.613	29.126	38.742	509.373

NO.	URAIAN	RINCIAN															
		BERBAH	CANGKRINGAN	DEPOK	GAMPING	GODEAN	KALASAN	MINGGIR	MLATI	MOYUDAN	NGAGLIK	NGEMPLAK	PAKEM	PRAMBANAN	SEYEGAN	SLEMAN	JUMLAH PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah Pemilih disabilitas/penyangang cacat	25	73	48	99	108	66	98	109	163	85	158	69	46	63	62	1.272
2	Jumlah Pemilih disabilitas/penyangang cacat yang menggunakan hak pilih	9	0	7	23	26	32	21	3	16	41	38	14	9	10	15	264

NAMA DAN TANDA TANGAN KPU KABUPATEN/KOTA				
1. Ahmad Shidqi, S.Th.I., M.Hum.	2. Imanda Yulianto, S.Sos.	3. Indah S. Wulandari, S.E., M.Sc.	4. Haryanta, S.P.	5. Aswino Wardhana, S.IP
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				
1. Purwanto, S.	2. Sugiyatna, S.			

KABUPATEN/KOTA
PROVINSI

SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

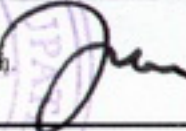

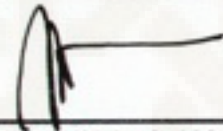
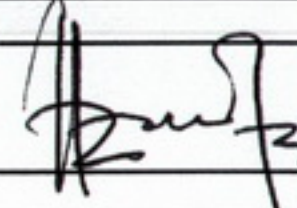
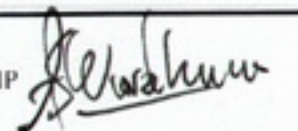

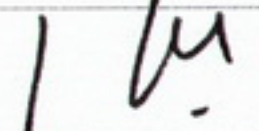
NO.	URAIAN	RINCIAN															
		JUMLAH PINDAHAN	TEMPEL	TURI												JUMLAH AKHIR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4)	727.996	40.675	27.558													796.229
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos	616	10	73													699
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan	218.007	8.637	5.797													232.441
4	Jumlah surat suara yang digunakan	509.373	32.028	21.688													563.089

NO.	URAIAN	RINCIAN															
		JUMLAH PINDAHAN	TEMPEL	TURI												JUMLAH AKHIR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah Suara Sah Seluruh Calon	474.802	29.734	20.364													524.900
2	Jumlah Suara Tidak Sah	34.571	2.294	1.324													38.189
3	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1 + 2)	509.373	32.028	21.688													563.089

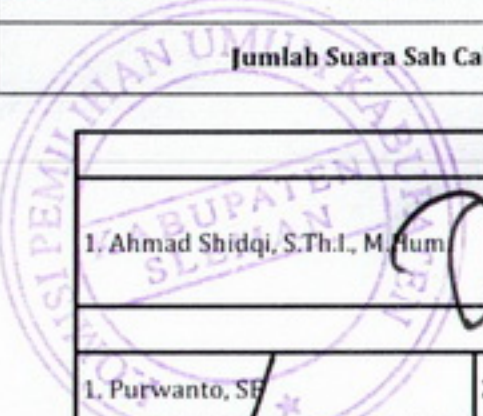
NO.	URAIAN	RINCIAN															
		JUMLAH PINDAHAN	TEMPEL	TURI												JUMLAH AKHIR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah Pemilih disabilitas/penyangang cacat	1.272	115	93													1.480
2	Jumlah Pemilih disabilitas/penyangang cacat yang menggunakan hak pilih	264	18	11													293

NAMA DAN TANDA TANGAN KPU KABUPATEN/KOTA				
1. Ahmad Shidqi, S.Th.I., M.Hum.	2. Imanda Yulianto, S.Sos.	3. Indah S. Wulandari, S.E., M.Sc.	4. Haryanta, S.P.	5. Aswino Wardhana, S.IP
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				
1. Purwanto, SE	2. Sugiyatna, S.Ag			

NO.	NAMA PASANGAN CALON	RINCIAN															
		BERBAH	CANGKRINGAN	DEPOK	GAMPING	GODEAN	KALASAN	MINGGIR	MLATI	MOYUDAN	NGAGLIK	NGEMPLAK	PAKEM	PRAMBANAN	SEYEGAN	SLEMAN	JUMLAH PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Dr. Hj. Yuni Satia Rahayu, SS., M.Hum. dan Danang Wicaksana Sulistya, ST.	12.153	7.855	25.637	18.553	15.447	15.428	7.953	19.138	6.570	19.476	13.871	7.733	10.301	11.222	14.668	206.005
2	Drs. H. Sri Purnomo, M.Si. dan Dra. Hj. Sri Muslimatun, M. Kes.	14.601	8.997	25.865	24.741	20.513	22.776	10.195	23.589	12.528	23.124	15.900	12.024	16.458	15.854	21.632	268.797
Jumlah Suara Sah Calon		26.754	16.852	51.502	43.294	35.960	38.204	18.148	42.727	19.098	42.600	29.771	19.757	26.759	27.076	36.300	474.802

NAMA DAN TANDA TANGAN KPU KABUPATEN/KOTA				
1. Ahmad Shidqi, S.Th.I., M.Hum. 	2. Imanda Yulianto, S.Sos. 	3. Indah S. Wulandari, S.E., M.Sc. 	4. Haryanta, S.P. 	5. Aswino Wardhana, S.IP. 
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				
1. Purwanto, S.E. 	2. Sugiyatna, S.Ag. 			

NO.	NAMA PASANGAN CALON	RINCIAN															
		JUMLAH PINDAHAN	TEMPEL	TURI												JUMLAH AKHIR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Dr. Hj. Yuni Satia Rahayu, SS., M.Hum. dan Danang Wicaksana Sulistya, ST.	206.005	12.912	8.716													227.633
2	Drs. H. Sri Purnomo, M.Si. dan Dra. Hj. Sri Muslimatun, M. Kes.	268.797	16.822	11.648													297.267
	Jumlah Suara Sah Calon	474.802	29.734	20.364													524.900

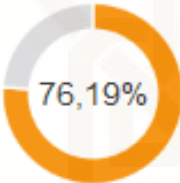
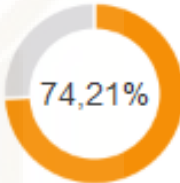
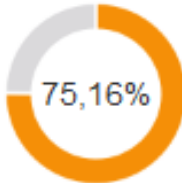


NAMA DAN TANDA TANGAN KPU KABUPATEN/KOTA				
1. Ahmad Shidqi, S.Th.I., M. Hum	2. Imanda Yulianto, S.Sos.	3. Indah S. Wulandari, S.E., M.Sc.	4. Haryanta, S.P.	5. Aswino Wardhana, S.IP.
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				
1. Purwanto, ST	2. Sugiyatna, S.Ag			



Daftar Pemilih Tetap TPS 16 Dari Situs Resmi KPU Sleman

Informasi Kelurahan Maguwoharjo

Pemilih dan Pengguna Hak Pilih			
	Laki-laki	Perempuan	Total
Pemilih	147	159	306
Pengguna Hak Pilih	112	118	230
Partisipasi	 76,19%	 74,21%	 75,16%

Suara Sah dan Tidak Sah	
Suara Sah	226 Suara
Suara Tidak Sah	4 Suara
Jumlah	230 Suara

Prosentase Suara Sah



98,26%

Partisipasi Pemilih dengan Disabilitas

Tidak ada pemilih dengan disabilitas

16. **Stop Jjin Hotel dan Apartemen Baru**

Terkait dengan maraknya investasi yang deras ke Sleman, juga adanya penolakan sejumlah warga terhadap pendirian hunian untuk komersial, kebijakan moratorium pembangunan hotel, apartemen dan kondotel mendesak diberlakukan. Kebijakan moratorium bertujuan jelas pembangunan infrastruktur harus lebih berpihak kepada warga dan rakyat Sleman dan mengurangi beban lingkungan dan menjaga ekosistem.

17. **Pelayanan Perijinan yang Cepat dan Bebas Pungli dengan Teknologi Informasi**

Pelayanan publik ke masyarakat terutama untuk layanan perijinan butuh reformasi pelayanan agar lebih cepat, lebih mudah dan transparan dengan memaksimalkan layanan berbasis teknologi informasi (IT).

18. **Jjin UKM Gratis**

19. **Membuat 20.000 Jamban Keluarga Miskin**

20. **Memajukan Olahraga dan Meningkatkan Prestasi PSS**

21. **Memajukan Kesenian Khas Sleman**

Membangun Sleman lebih baik ke depan tentunya harus pula meningkatkan dan mengembangkan kelompok seni tradisi yang selama ini ada. Pelaku seni tradisi bisa jadi bagian atraksi wisata yang perlu mendapatkan ruang pantas dan fasilitas sesuai kebutuhan.

22. **Meningkatkan Partisipasi dan Emansipasi Wanita dalam Pembangunan**

Tentu saja, seluruh program pembangunan butuh partisipasi semua pihak. Pembangunan yang melayani kebutuhan semua dengan pengarus-utamaan gender di semua program dan kegiatan akan jadi semangat untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat Sleman lebih baik, lebih berkualitas, berkeadilan dan bermartabat.

23. **Mengurangi Pengangguran dengan Mewajibkan 70% Pekerja Berasal Dari Sleman**

24. **Membangun Kawasan Industri yang Aman dan Ramah Lingkungan**

Yuni Seti Rahayu-Danang Wicaksono Sulistyia percaya pelibatan aktif publik dalam kebijakan pembangunan di Sleman ke depan adalah energi positif guna mewujudkan 24 rencana aksi program dan kegiatan yang terpilih

Yuni Seti Rahayu Dangan Wicaksono Sulistyia

Percaya pelibatan aktif publik dalam kebijakan pembangunan di Sleman ke depan adalah energi positif guna mewujudkan 24 rencana aksi program dan kegiatan yang terpilih

Suara Anda Penting
Untuk Kita & Sleman

MUMPUNI
NGAJENI
ORA NGAPUSI



MEMBANGUN
SLEMAN
LEBIH BAIK!



MEMBANGUN
SLEMAN
LEBIH BAIK

MEMBANGUN SLEMAN LEBIH BAIK. MUMPUNI NGAJENI ORA NGAPUSI

Yuni Satia Rahayu - Danang Wicaksono Sulistya MEMBANGUN SLEMAN LEBIH BAIK

Membangun Sleman menjadi lebih baik ke depan butuh aksi nyata dan kepemimpinan yang kuat, fokus dalam program kerja dan berpihak pada kepentingan warga. Yuni Satia Rahayu-Danang Wicaksono Sulistya dalam rekam jejaknya jelas memiliki keberpihakan mengabdikan hidupnya untuk rakyat.

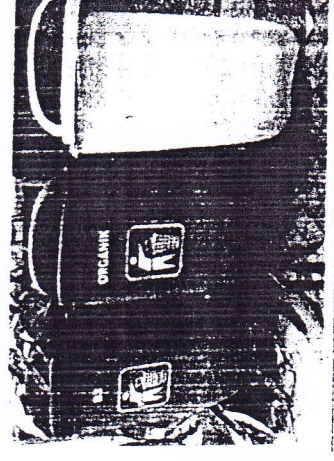
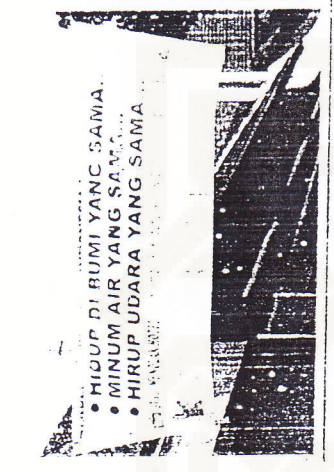
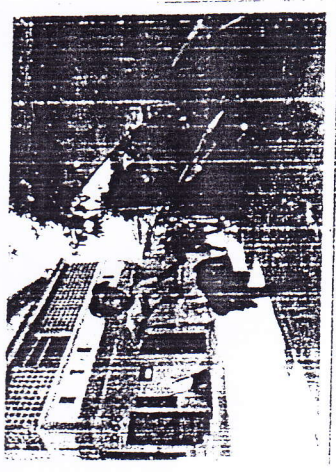
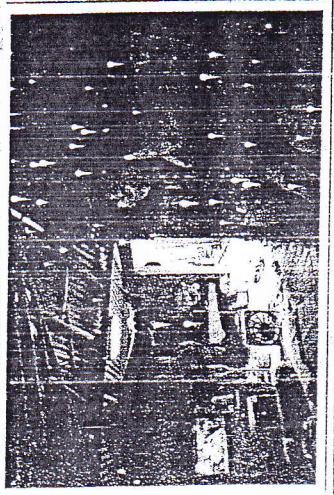
Kabupaten Sleman dengan 17 kecamatan memiliki sejumlah masalah yang butuh solusi kebijakan dan langkah strategis untuk membawa rakyat Sleman lebih sejahtera. Di tingkat padukuhan ada kebutuhan pembangunan yang meliputi, adanya laju alih fungsi lahan pertanian produktif, keberpihakan pada petani, kecepatan pelayanan birokrasi, problematika kemiskinan, hingga beban lingkungan akibat pengembangan kawasan hunian dan tumbuhnya pusat ekonomi baru.

Pasangan yang maju dengan dukungan penuh dari PDI Perjuangan, Partai GERINDRA dan Partai Keadilan Sejahtera ini menetapkan visi Kabupaten Sleman, 2016-2021 yaitu "Terwujudnya Kesejahteraan rakyat Sleman yang modern dan dinamis berbasis budaya lokal".

Mewujudkan visi tersebut ada tujuh pokok misi yang jadi pedoman yaitu: (1) meningkatkan kualitas kinerja pemerintah daerah guna mengoptimalkan pelayanan kepada rakyat, (2) meningkatkan kualitas pelayanan umum, (3) meningkatkan jumlah ketersediaan dan kualitas pelayanan umum, (4) mengurangi kemiskinan, (5) meningkatkan kesempatan belajar serta mengembangkan pendidikan formal, informal dan non formal, (6) melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai tradisi, budaya dan kesenian Sleman, (7) mengembangkan nilai-nilai keharmonisan dan pola asah-asih-asuh dalam kehidupan masyarakat.

Bagaimana langkah membangun Sleman lebih baik? Tentu saja tidak dengan sekedar pembangunan fisik namun pembangunan sumber daya manusia seutuhnya. Ada 24 Rencana Aksi yang menjadi landasan penting mewujudkan visi dan misi guna menjadikan rakyat Sleman sejahtera.

- 1. Dana Pembangunan Dukung 60 Juta /Tahun** (Ralat : Penulisan '60 Juta' yang benar '50 Juta')
Pembangunan wilayah fokus di tingkat padukuhan dengan mengalokasikan dana Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)/padukuhan/tahun
- 2. Dana Pembangunan Desa 1-1,5 Miliar/Tahun**
Pembangunan wilayah fokus di tingkat pedesaan dengan mengalokasikan dana Rp. 1-1,5 M (satu sampai satu setengah miliar rupiah)/desa/tahun.
- 3. Pajak Sawah Gratis**
Membebaskan pajak tanah pertanian lahan basah (sawah).
- 4. Rumah Sakit Gratis**
Guna mewujudkan tingkat kualitas hidup masyarakat, program Jamkesda Mandiri Sleman perlu ditingkatkan menjadi jaminan kesehatan semesta. Trep warga yang ber-KTP Sleman berhak mendapatkan pengobatan gratis di Rumah Sakit milik pemda Sleman secara gratis.
- 5. Perbaikan 4.000 Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin.**
- 6. Membangun Taman Keluarga di Semua Kecamatan**
Pembangunan fisik di Sleman harus berpedoman untuk meningkatkan kualitas hidup warga, termasuk bagaimana menyediakan fasilitas umum yang ramah difabel. Tumbuhnya pusat perekonomian yang baru di sejumlah wilayah perlu diikuti dengan kebijakan yang memastikan terbangunnya Ruang Terbuka Hijau di 17 Kecamatan. Semua tentu paham, ruang terbuka hijau bisa jadi paru-paru kota sekaligus bisa bermanfaat untuk sarana bermain anak.



- 7. Program PNS Bell Beras Petani**
Pengalangan beras untuk PNS yang direli dari petani adalah jalan strategis mewujudkan kedaulatan pangan di Sleman.
- 8. Meningkatkan Produksi Ternak 10.000 Ekor Sapi Potong**
Memberikan insentif kepada kelompok tani/ternak diharapkan bisa mempercepat pemenuhan target populasi ternak sebanyak 10.000 ekor sapi
- 9. Perbaikan 15 pasar Tradisional**
Dukungan kebijakan peningkatan perekonomian warga adalah kebutuhan strategis Sleman-pilihan program aksi renovasi di 15 pasar tradisional.
- 10. Stop Ijin Toko Modern (Mart)**
Memberlakukan moratorium pendirian toko berjejeran perlu dilakukan untuk merajam perikonomian rakyat bisa tumbuh.
- 11. Penyediaan 250.000 Tempat Sampah Terpilah**
Ke depan, dengan laju pembangunan wilayah yang pesat tentu akan berhadapan dengan masalah sampah perkotaan. Menyumbuhkan kesadaran pengelolaan sampah yang partisipatif adalah satu rencana aksi yang penting penyediaan 250.000 unit tempat sampah terpilah menjadi prioritas program kerja.
- 12. Penyambungan Listrik Gratis Bagi 4250 Keluarga Miskin**
- 13. Pola Pengasuhan Anak Hingga Remaja Oleh Keluarga dan Lingkungan**
Sementara untuk peningkatan kualitas kehidupan di tingkat keluarga, program bela kesehatan (parenting) dan bayi hingga remaja dan perubahan yang dilakukan pemerintahan di tingkat kabupaten harus kesadaraan bersama warga Sleman.
- 14. Penerbitan Kostilan Membuat Aturan Jam Belajar**
Menggalakan kembali jam belajar masyarakat untuk bisa jeda-jeda untuk bisa melanjutkan pendidikan yang lebih lanjut bagi masyarakat yang kurang mampu yang harus bisa di tingkat kabupaten. Tentu saja harus di dukung oleh pemerintah agar terdapat kebijakan yang mendukung proses untuk bisa melanjutkan dan penempatan untuk di tingkat kabupaten.
- 15. Penyediaan Fasilitas umum untuk orang cacat**

Gambar 1



Gambar 2



Gambar 3



Gambar 4



CURICULUM VITAE

Nama : Mukhyiddin
TTL : Sidoarjo, 17 September 1991
Email : Idynidyn177@yahoo.com
CP : 085747499910
Bapak : Abd kohar
Ibu : Machnunah
Alamat asal : Ds. Gempolsari RT 15/RW 04 Kec. Tanggulangin
Kab. Sidoarjo Jawa Timur
Alamat Jogja : Ambarukmo, Depok, Sleman, Yogyakarta

Riwayat Pendidikan :

1. MI Al-Huda Sidoarjo 1998-2004
2. MTS Manba'ul Hikam Sidoarjo 2004-2007
3. MAN Tambakberas Jombang 2008-2011
4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2011- selesai